



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- b. bahwa terdapat perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. BAB I PENDAHULUAN.
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2015.
- c. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.
- d. BAB IV PENUTUP.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

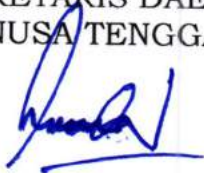
Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 25 Juli 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, W.



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR
025

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 JULI 2016

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1. Maksud	4
1.3.2. Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN	
 TRIWULAN II TAHUN 2016.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016	6
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Keadaan Triwulan	
II Tahun 2016.....	6
2.3. Penyesuaian Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Daerah.....	18
2.3.1. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Nusa	
Tenggara Timur.....	18
2.3.2. Lain-Lain Asumsi.....	28
2.4. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	37
2.5. Perubahan Belanja Daerah.....	39
2.6. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	40
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM	
 PERUBAHANRKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN	
 2016.....	41
BAB IV PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan pemerintah daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun 2016.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan; atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja

SKPD Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016;
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016.

Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan IV, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perlu untuk melakukan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2016 yang juga mengharmoniskan dan menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

- **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016.

- **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD**

Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2015, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

- **BAB IV PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Keadaan Triwulan II Tahun 2016

Mengingat pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2016 telah memasuki Triwulan III, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

- I. Misi I: Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.
Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:
 - A. Program Urusan Pendidikan
 - 1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
 - 2) Program Pengembangan dan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
 - 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
 - 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 5) Program Hibah Pendidikan
 - 6) Program Bantuan Sosial Kependidikan
 - B. Program Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - C. Program Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - 3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

II. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang, dengan Program Priotas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- 3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4) Program Peningkatan Gizi
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
- 7) Program Upaya Kesehatan Perorangan
- 8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
- 10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan

III. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 11 SKPD, yaitu:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT
- Kantor P2TSP Provinsi NTT
- Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
- Dinas Peternakan Provinsi NTT
- Dinas Kehutanan Provinsi NTT
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

Program Priotas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Ketenagakerjaan

- 1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
- 2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 3) Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi

B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
- 2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 3) Program Hibah Koperasi

C. Program Urusan Penanaman Modal

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Investasi Daerah
- 3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
- 5) Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
- 7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian

D. Program Urusan Pariwisata

- 1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- 3) Program Hibah Pariwisata

E. Program Urusan Ketahanan Pangan

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani

F. Program Urusan Pertanian

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan

G. Program Urusan Kehutanan

- 1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan

H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
- 4) Program Hibah Bidang Perekonomian

IV. Misi 4: Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 SKPD, yaitu:

- 1) Bappeda Provinsi NTT
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- 3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT
- 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT
- 5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
- 6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT
- 7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
- 8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
- 9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
- 10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
- 11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
- 12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT
- 13) Inspektorat Provinsi NTT
- 14) Kantor Penghubung Provinsi NTT
- 15) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
- 16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
- 17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
- 18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT
- 19) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT
- 20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
- 22) Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT
- 23) Komisi Penyiaran dan Indonesia Daerah Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Perencanaan

- 1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional

B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitas Kewaspadaan Nasional
- 2) Program Fasilitas Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah

5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban

C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
- 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 7) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
- 8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
- 9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- 11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
- 12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
- 13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan Dan Otonomi Daerah
- 15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- 16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- 18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat
- 20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penataan Aset
- 21) Program Pendidikan Kedinasan
- 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
- 24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
- 25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
- 26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
- 27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian

D. Program Urusan Kearsipan

- 1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi

- 1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
- 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- 3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
- 4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
- 5) Program Pengembangan Data dan Informasi

F. Program Urusan Umum

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 SKPD, yaitu:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- 3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT
- 4) Bappeda Provinsi NTT
- 5) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT
- 6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
- 7) Kesatuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mutis Timau Provinsi NTT
- 8) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT

Program Priotas yang dilaksanakan adalah:

A. Program Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pengolahan Sumber Daya Air
- 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
- 5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
- 6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum

B. Program Urusan Kesehatan

- 1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

C. Program Urusan Perhubungan

- 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

D. Program Urusan Perencanaan

- 1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

E. Program Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan

F. Program Urusan Kehutanan

- 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
- 2) Program Pengembangan Pertambangan
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

VI. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

VII. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan

VIII. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu:

- 1) Bappeda Provinsi NTT
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT
- 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
- 4) Dinas Sosial Provinsi NTT
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

Program Priotas yang dijalankan adalah:

- A. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Desa Mandiri Anggur Merah
 - 2) Program Hibah Ekonomi Produktif
- B. Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa
 - 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
 - 3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
 - 4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)
- C. Program Urusan Perbatasan
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- D. Program Urusan Sosial
 - 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 3) Program Penyandang Penyakit Sosial
 - 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
- E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra SKPD Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permengadri No. 54 Tahun 2010, pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh SKPD.

Laporan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja SKPD ini dikompilasi kedalam laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2016 untuk keadaan triwulan II, sesuai arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hasil kompilasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan diselesaikannya Laporan ini, dari 50 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, sebagian besar SKPD tidak menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2016 untuk keadaan Triwulan II. Banyak SKPD yang tidak melaporkan Laporan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2016 untuk keadaan Triwulan II merupakan salah satu faktor utama sulitnya Bappeda Provinsi NTT melakukan evaluasi dimaksud.

Disamping faktor utama tersebut, terdapat beberapa hal yang juga menjadi kendala pelaksanaan evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan IV, yaitu:

1. Ketidapahaman SKPD dalam mengisi format isian pelaporan. Padahal pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda, terdapat *Contact Person* yang dapat dihubungi apabila pihak SKPD belum jelas dan paham terhadap cara pengisian Format Pelaporan tersebut.
2. Program dan Kegiatan pada Belanja Pegawai yang nota bene memiliki substansi yang sama pada setiap SKPD namun satuan volume *Output/Keluaran* sebagai standar ukuran kinerja yang ditetapkan masing-masing SKPD berbeda-beda.
3. Di hampir seluruh Kegiatan yang dilaksanakan SKPD, realisasi capaian Kinerja masih dianggap berbanding lurus dengan realisasi capaian anggaran padahal hampir seluruh kegiatan pada pelaksanaan RKPD Tahun 2015, seharusnya telah dapat diukur kinerja setiap kegiatan atau sudah bersifat kuantitatif.

Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran dari 50 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Urusan Pemerintahan (Urusan Wajib dan Pilihan) pada Belanja Langsung SKPD sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Per-Urusan Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2016

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU	REALISASI	
I	URUSAN WAJIB	1,240,595,574,500.00	364,349,592,950.00	29.37
1	PENDIDIKAN	45,487,782,300.00	16,797,910,298.00	36.93
	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	45,487,782,300.00	16,797,910,298.00	36.93
2	KESEHATAN	223,469,288,900.00	39,959,375,468.00	17.88
	Dinas Kesehatan	78,918,222,000.00	3,500,636,034.00	4.44
	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	144,551,066,900.00	36,458,739,434.00	25.22
3	PEKERJAAN UMUM	390,415,407,800.00	100,983,203,029.00	25.87
	Dinas Pekerjaan Umum	390,415,407,800.00	100,983,203,029.00	25.87
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	53,355,861,000.00	17,475,384,844.00	32.75

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU	REALISASI	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47,147,591,000.00	14,722,061,934.00	31.23
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,636,146,000.00	1,208,764,110.00	45.85
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,572,124,000.00	1,544,558,800.00	43.24
5	PERHUBUNGAN	19,006,207,000.00	7,330,236,159.00	38.57
	Dinas Perhubungan	19,006,207,000.00	7,330,236,159.00	38.57
6	LINGKUNGAN HIDUP	5,137,488,000.00	1,825,885,601.00	35.54
	Badan Lingkungan Hidup Daerah	5,137,488,000.00	1,825,885,601.00	35.54
7	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,301,687,000.00	1,562,744,837.00	36.33
	Badan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,301,687,000.00	1,562,744,837.00	36.33
8	SOSIAL	29,488,038,900.00	12,953,426,850.00	43.93
	Dinas Sosial	29,488,038,900.00	12,953,426,850.00	43.93
9	KETENAGAKERJAAN	10,158,857,000.00	3,150,781,100.00	31.02
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10,158,857,000.00	3,150,781,100.00	31.02
10	KOPERASI DAN UKM	9,287,927,000.00	2,796,421,691.00	30.11
	Dinas Koperasi dan UMK	9,287,927,000.00	2,796,421,691.00	30.11
11	PENANAMAN MODAL	18,845,759,000.00	4,313,299,547.00	22.89
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	18,845,759,000.00	4,313,299,547.00	22.89
12	PEMUDA DAN OLAHRAGA	12,038,124,000.00	2,288,909,549.00	19.01
	Dinas Pemuda dan Olahraga	12,038,124,000.00	2,288,909,549.00	19.01
13	KESBANGPOL DAN LINMAS	14,104,765,900.00	5,484,376,308.00	38.88
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,699,305,900.00	1,600,672,250.00	43.27
	Satuan Polisi Pamong Praja	4,535,816,000.00	1,913,743,375.00	42.19
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,869,644,000.00	1,969,960,683.00	33.56
14	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	372,831,638,900.00	132,163,259,073.00	35.45
	Biro Umum	169,257,247,000.00	52,137,746,174.00	30.80
	Biro Keuangan	17,642,453,000.00	5,251,976,754.00	29.77
	Biro Hukum	3,363,072,000.00	1,369,836,000.00	40.73
	Biro Organisasi	2,600,297,000.00	1,118,834,250.00	43.03
	Biro Administrasi Pembangunan	5,598,278,000.00	1,815,043,056.00	32.42
	Biro Perekonomian	3,897,810,000.00	2,321,201,700.00	59.55
	Biro Kesejahteraan Rakyat	7,988,622,000.00	2,225,499,460.00	27.86
	Biro Pemerintahan	2,891,457,000.00	1,699,331,550.00	58.77
	Biro Hubungan Masyarakat	8,003,785,000.00	1,579,504,952.00	19.73
	Sekretariat DPRD	55,335,176,000.00	23,206,929,011.00	41.94

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN RKPD (%)
		PAGU	REALISASI	
	Inspektorat	9,679,688,000.00	3,169,030,738.00	32.74
	Kantor Penghubung	5,208,579,000.00	2,109,464,450.00	40.50
	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	45,123,759,900.00	15,054,292,791.00	33.36
	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20,491,857,000.00	10,921,238,480.00	53.30
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2,010,531,000.00	1,076,547,207.00	53.55
	Sekretariat DP. KORPRI	2,686,842,000.00	979,562,540.00	36.46
	Badan Kepegawaian Daerah	11,052,185,000.00	6,127,219,960.00	55.44
15	KETAHANAN PANGAN	7,758,994,000.00	3,433,305,081.00	44.25
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	7,758,994,000.00	3,433,305,081.00	44.25
16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	10,274,939,800.00	4,923,281,768.00	47.92
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10,274,939,800.00	4,923,281,768.00	47.92
17	KEARSIPAN	2,468,845,000.00	1,492,864,414.00	60.47
	Badan Arsip	2,468,845,000.00	1,492,864,414.00	60.47
18	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,969,037,000.00	4,145,684,948.00	52.02
	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,864,145,000.00	2,070,715,601.00	53.59
	Kantor Pengolahan Data Elektronik	2,757,133,000.00	1,484,099,897.00	53.83
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	1,347,759,000.00	590,869,450.00	43.84
19	PERPUSTAKAAN	4,194,926,000.00	1,269,242,385.00	30.26
	Badan Perpustakaan Daerah	4,194,926,000.00	1,269,242,385.00	30.26
II	URUSAN PILIHAN	219,844,431,300.00	58,927,854,802.00	26.80
1	PERTANIAN	95,007,681,000.00	13,619,629,483.00	14.34
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	55,917,107,000.00	8,435,083,292.00	15.08
	Dinas Peternakan	39,090,574,000.00	5,184,546,191.00	13.26
2	KEHUTANAN	19,331,916,000.00	3,003,047,979.00	15.53
	Dinas Kehutanan	14,355,195,000.00	2,133,200,124.00	14.86
	Kantor KPHL Model Mutis Timau Unit XIX	4,976,721,000.00	869,847,855.00	17.48
3	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	28,827,344,700.00	3,946,184,984.00	13.69
	Dinas Pertambangan dan Energi	28,827,344,700.00	3,946,184,984.00	13.69
4	PARIWISATA	17,739,147,000.00	9,039,007,666.00	50.96
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	17,739,147,000.00	9,039,007,666.00	50.96
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	45,495,739,600.00	24,773,583,100.00	54.45
	Dinas Kelautan dan Perikanan	45,495,739,600.00	24,773,583,100.00	54.45
6	PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	13,442,603,000.00	4,546,401,590.00	33.82
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13,442,603,000.00	4,546,401,590.00	33.82

Sumber: Bidang PP IV Bappeda Provinsi NTT

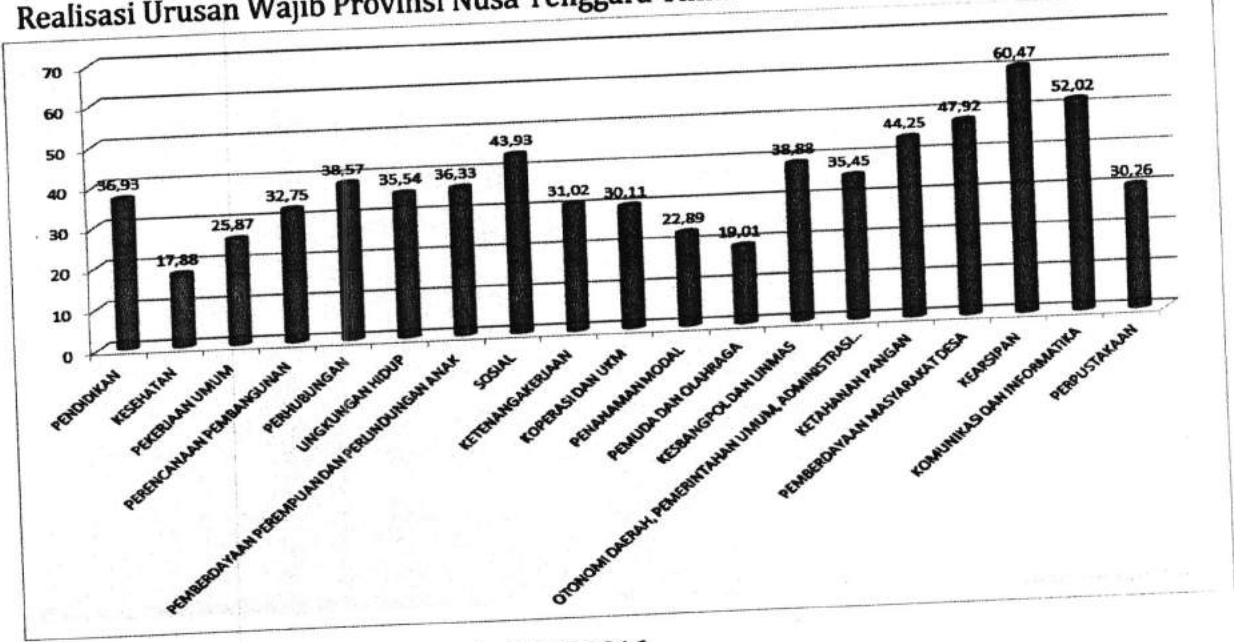
Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi sementara capaian anggaran pelaksanaan APBD sampai dengan keadaan Triwulan II Tahun 2016 menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan memiliki predikat yang Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Untuk Urusan Pemerintahan yang berpredikat Rendah (R) yaitu Urusan Kearsipan (60,47%), Urusan Kelautan dan Perikanan (54,45%) serta Urusan Komunikasi dan Informatika (52,02%). Sedangkan Urusan dengan tingkat realisasi terkecil yaitu Urusan Pertambangan dan Energi (13,69%), Urusan Pertanian (14,34%) serta Urusan Kehutanan (15,53%).

Tabel 2.2.
Interval Penilaian Predikat Kinerja

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran untuk Belanja Langsung dari 50 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1.
Realisasi Urusan Wajib Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Triwulan II Tahun 2016



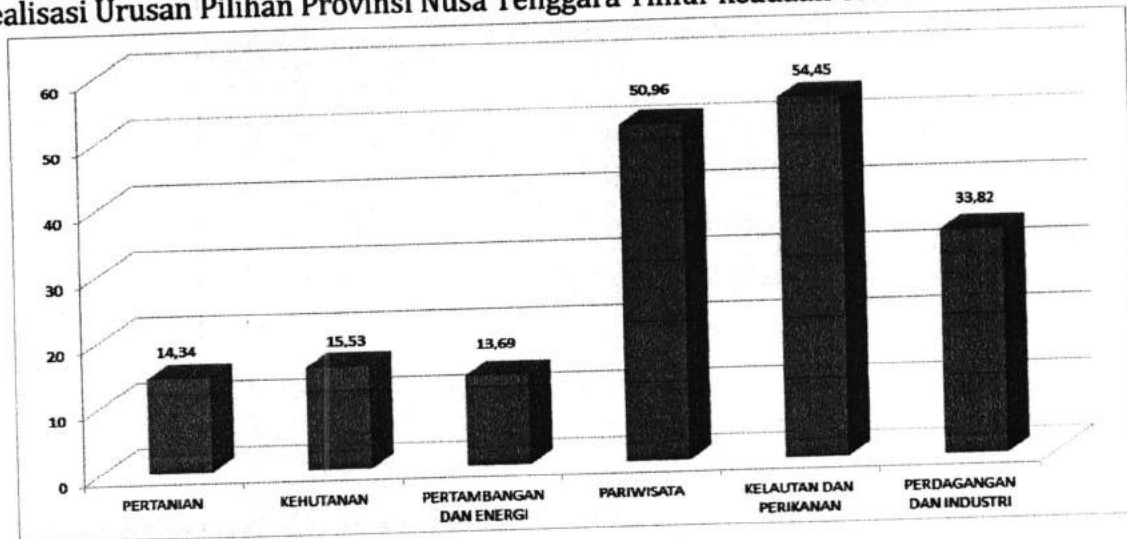
Sumber: Bidang PP IV, Bappeda Provinsi NTT 2016

Pada Gambar 2.1. diatas realisasi Urusan Wajib sampai dengan keadaan Triwulan II Tahun 2016 tertinggi yaitu Urusan Kearsipan (60,47%), Urusan Komunikasi dan Informatika (52,02%) serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (47,92%). Sedangkan

Urusan Wajib dengan tingkat realisasi terendah yaitu Urusan Kesehatan (17,88%) serta Urusan Pemuda dan Olahraga (19,01%).

Gambar 2.2.

Realisasi Urusan Pilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan Triwulan II Tahun 2016



Sumber: Bidang PP IV, Bappeda Provinsi NTT 2016

Pada Gambar 2.2. diatas tingkat realisasi Urusan Pilihan keadaan Triwulan II Tahun 2016 dengan tingkat realisasi terbesar yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan (54,45%) serta Urusan Pariwisata (50,96%). Sedangkan urusan dengan tingkat realisasi terendah yaitu Urusan Pertambangan dan Energi (13,69%) serta Urusan Pertanian (14,34%).

2.3. Penyesuaian Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Daerah

2.3.1. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Pada penyusunan APBD Tahun 2016 asumsi terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2015 yang diukur berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.76.432 Milyar atau naik sebesar Rp.7.834 Milyar sejak Tahun 2014.

Struktur PDRB Nusa Tenggara Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Triwulan I Tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan berarti. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib serta Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih mendominasi perekonomian di Nusa Tenggara Timur.

Melihat dinamika pembangunan yang berkembang, dimana sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi disemua lapangan

usaha utama di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku Triwulan I Tahun 2015 mencapai Rp.17,471 Milyar dan pada Triwulan I Tahun 2016 naik menjadi Rp. 19,693 Milyar. Rincian PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. dibawah ini:

Tabel 2.3.
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010-Triwulan I 2016 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Triw I 2015	Triw I 2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,963	15,196	16,528	18,272	20,447	22,666	5,364	5,836
Pertambangan dan Penggalian	629	689	767	894	1,070	1,308	274	315
Industri Pengolahan	555	616	685	758	844	941	216	239
Pengadaan Listrik dan Gas	22	23	23	23	32	40	9	13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31	34	37	41	46	47	11	11
Konstruksi	4,436	5,017	5,715	6,344	7,096	7,908	1,713	2,018
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,753	5,410	5,934	6,570	7,297	8,247	1,883	2,098
Transportasi dan Pergudangan	2,152	2,412	2,766	3,195	3,567	3,976	904	1,056
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	247	276	316	367	422	487	106	122
Informasi dan Komunikasi	3,508	3,848	4,427	4,660	5,134	5,477	1,276	1,384
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,403	1,651	2,011	2,389	2,699	2,995	712	782
Real Estat	1,161	1,295	1,487	1,705	1,861	2,054	464	515
Jasa Perusahaan	125	144	166	188	211	236	54	60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,135	5,764	6,738	7,592	8,393	9,400	2,091	2,469
Jasa Pendidikan	3,767	4,247	4,904	5,679	6,568	7,368	1,646	1,897
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	931	1,072	1,165	1,279	1,415	1,616	360	426
Jasa lainnya	1,019	1,114	1,214	1,361	1,497	1,640	387	422
Produk Domestik Regional Bruto	43,846	48,815	54,893	61,325	68,598	76,432	17,471	19,693

Sumber: BPS 2016

Selanjutnya, PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga konstan pada Tahun 2014 senilai Rp.54,106 Milyar yang naik menjadi Rp.56,820 Milyar pada Tahun 2015. Sedangkan untuk Triwulan I Tahun 2015 Nusa Tenggara Timur mencatatkan angka

PDRB atas dasar harga konstan senilai Rp.13,369 dan pada Triwulan I Tahun 2016 mencapai Rp.14,046 Milyar atau naik Rp.677 Milyar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4. dibawah ini:

Tabel 2.4.
PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2011-Triwulan I 2016 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013	2014	2015	Triw I 2015	Triw I 2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,244	14,669	15,069	15,611	16,068	3,886	3,956
Pertambangan dan Penggalian	664	705	740	781	831	179	192
Industri Pengolahan	587	622	652	675	710	167	175
Pengadaan Listrik dan Gas	25	27	29	34	38	9	10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33	35	37	39	40	9	9
Konstruksi	4,834	5,178	5,450	5,733	6,033	1,356	1,474
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,090	5,422	5,826	6,112	6,495	1,517	1,580
Transportasi dan Pergudangan	2,296	2,402	2,536	2,702	2,851	669	726
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263	279	299	318	338	76	81
Informasi dan Komunikasi	3,756	4,023	4,268	4,595	4,924	1,152	1,236
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,561	1,730	1,940	2,058	2,177	529	557
Real Estat	1,235	1,311	1,383	1,403	1,457	339	348
Jasa Perusahaan	135	143	150	158	165	39	40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,571	5,968	6,405	6,786	7,267	1,687	1,812
Jasa Pendidikan	3,986	4,216	4,490	4,770	5,002	1,180	1,239
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	990	1,045	1,108	1,149	1,212	282	307
Jasa lainnya	1,057	1,081	1,123	1,172	1,216	293	303
Produk Domestik Regional Bruto	46,334	48,863	51,512	54,106	56,820	13,369	14,046

Sumber: BPS 2016

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran

Pengeluaran Penduduk Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 mengalami pertumbuhan disemua sektor pengeluaran. Sektor Pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar yaitu sektor Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp.5,82 Triliun dari kondisi Tahun 2014 senilai Rp.26,69 Triliun menjadi Rp.32,51 Triliun pada Tahun 2015. Diikuti oleh sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu bertumbuh sebesar Rp.5,08 Triliun dari Rp.50,95 Triliun pada Tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp.56,03

Triliun pada Tahun 2015. Sedangkan Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sektor Ekspor Barang dan Jasa terjadi penurunan sebesar Rp.4,57 Triliun dari kondisi Tahun 2014 senilai Rp.17,31 Triliun menjadi Rp.12,74 Triliun pada Tahun 2015 serta sektor Perubahan Inventori terjadi penurunan sebesar Rp.0,05 Triliun dari kondisi Tahun 2014 sejumlah Rp.1,02 Triliun menjadi Rp.0,97 Triliun pada Tahun 2015. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada table 2.5. dibawah ini:

Tabel 2.5.

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-Triwulan I 2016 (Triliun Rupiah)

No.	Lapangan usaha	Harga Berlaku			
		2014	2015	Triwulan I 2015	Triwulan I 2016
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,95	56,03	12,97	14,71
2.	Pengeluaran konsumsi LNPR	2,32	2,54	0,54	0,58
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20,59	23,71	2,81	3,15
4.	Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto	26,69	32,51	6,85	8,19
5.	Perubahan Inventori	1,02	0,97	0,05	0,02
6.	Ekspor Barang dan Jasa	17,31	12,74	3,17	3,13
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	50,30	52,06	8,91	10,1
	PDRB	68,60	76,43	17,47	19,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari Tabel 2.3. diatas, terlihat perbandingan Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I tahun 2015 dan Triwulan I 2016, dimana terjadi peningkatan pertumbuhan di beberapa sector pengeluaran, antara lain sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terjadi peningkatan sebesar Rp.1,74 Triliun dari kondisi triwulan I Tahun 2015 senilai Rp.12,97 Triliun menjadi Rp.14,71 Triliun pada triwulan I Tahun 2016, Sektor Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto terjadi peningkatan sebesar Rp.1,34 Triliun dari kondisi triwulan I tahun 2015 senilai Rp.6,85 Triliun menjadi Rp.8,19 Triliun pada triwulan I tahun 2016. Sedangkan sektor pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu sektor Ekpor Barang dan Jasa terjadi penurunan sebesar Rp.0,04 Triliun dari kondisi triwulan I tahun 2015 senilai Rp.3,17 Triliun menjadi Rp.3,13 Triliun pada triwulan I Tahun 2016 serta sektor Perubahan Inventori terjadi penurunan sebesar Rp.0,03 Triliun dari kondisi triwulan I Tahun 2015 senilai Rp. Rp.0,05 Triliun menjadi Rp.0.02 Triliun pada triwulan I Tahun 2016.

PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan (2010) Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami peningkatan sejak Tahun 2014. Sektor yang mengalami peningkatan terbesar yaitu sektor Impor Barang dan Jasa terjadi peningkatan sebesar Rp.4,62 Triliun dari kondisi tahun 2014 senilai Rp.34,58 Triliun menjadi Rp.39,20 Triliun pada Tahun 2015, sektor Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto terjadi peningkatan

sebesar Rp.3,82 Triliun dari kondisi tahun 2014 sejumlah Rp.22,22 Triliun menjadi Rp.26,04 Triliun pada tahun 2015 serta sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terjadi peningkatan sebesar Rp.2,66 Triliun dari kondisi tahun 2014 sejumlah Rp.41,91 Triliun menjadi Rp.44,57 Triliun pada tahun 2015.

Sektor pengeluaran yang mengalami penurunan antara lain sektor Ekspor Barang dan Jasa terjadi penurunan sebesar Rp.0,35 Triliun dari kondisi tahun 2014 senilai Rp.6,24 Triliun menjadi Rp.5,89 Triliun pada tahun 2015, sektor Perubahan inventori mengalami penurunan sebesar Rp.0,12 Triliun dari kondisi tahun 2014 sebesar Rp.0,79 Triliun menjadi Rp.0,67 Triliun pada tahun 2015. Rincian pertumbuhan pengeluaran atas dasar harga konstan (tahun 2010) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 sampai triwulan I Tahun 2016 selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 2.6. dibawah ini:

Tabel 2.6.

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-Triwulan I 2016 (Triliun Rupiah)

No.	Lapangan usaha	Harga Konstan			
		2014	2015	Triwulan I 2015	Triwulan I 2016
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	41,91	44,57	10,62	11,22
2.	Pengeluaran konsumsi LNPRT	1,96	2,05	0,44	0,46
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,55	16,79	2,07	2,19
4.	Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto	22,22	26,04	5,57	6,09
5.	Perubahan Inventori	0,79	0,67	0,04	0,02
6.	Ekspor Barang dan Jasa	6,24	5,89	1,4	1,3
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	34,58	39,2	6,77	7,22
	PDRB	54,11	56,82	13,37	14,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari Tabel 2.4 diatas juga, kita dapat melihat perbandingan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan I tahun 2015 dan triwulan I Tahun 2016, dimana secara keseluruhan terjadi peningkatan PDRB menurut pengeluaran sebesar Rp.0,68 Triliun dari kondisi PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp.13.37 Triliun menjadi Rp.14,05 Triliun pada triwulan I Tahun 2016. Sektor pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar yaitu sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami kenaikan sebesar Rp.0,6 Triliun dari kondisi Rp.10,62 Triliun pada triwulan I Tahun 2015 menjadi Rp.11,22 Triliun pada Triwulan I Tahun 2016 serta sektor Pembentukam Modal tetap Domestik Bruto mengalami peningkatan sebesar Rp.0,52 Triliun dari Kondisi triwulan I Tahun 2015 sejumlah Rp.5,57 Triliun menjadi Rp.6,09 Triliun pada Triwula I Tahun 2016.

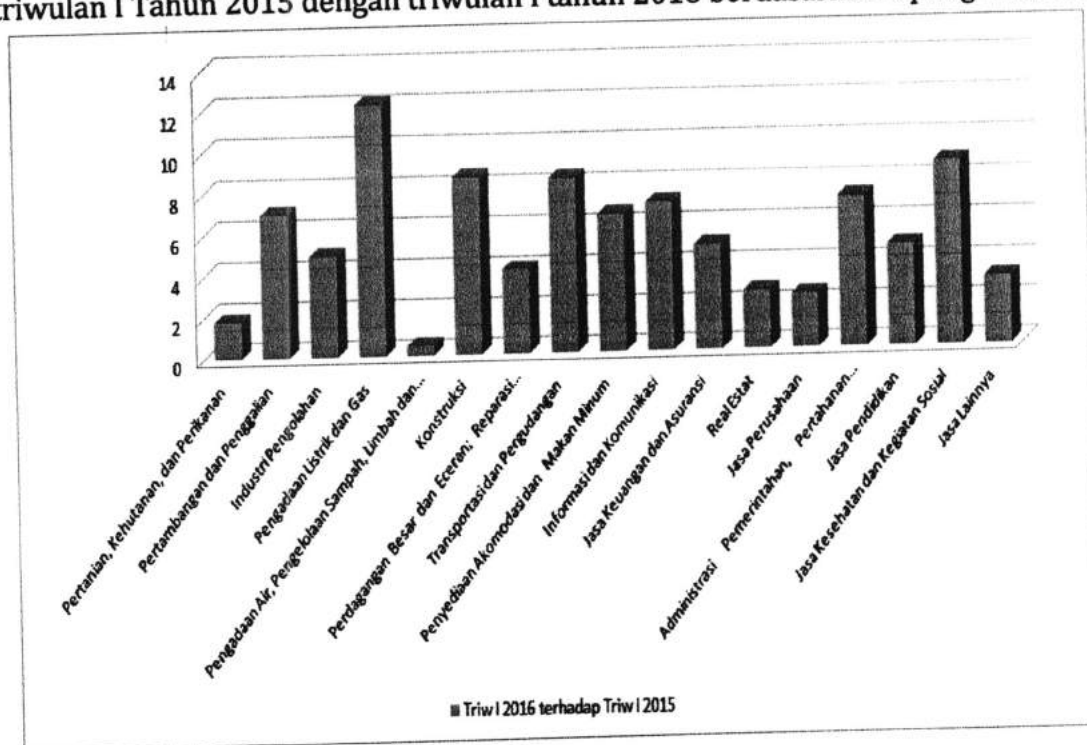
Sektor pengeluaran yang mengalami penurunan jika dibandingkan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan I Tahun 2015 dan Triwulan I Tahun 2016 yaitu sektor Ekspor Barang dan Jasa terjadi penurunan sebesar Rp.0,1 Triliun dari kondisi triwulan I tahun 2015 senilai Rp.1,4 Triliun menjadi Rp.1,3 Triliun pada triwulan I Tahun 2016 serta sektor Perubahan Inventori yang juga mengalami penurunan sebesar Rp.0,02 Triliun.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan I Tahun 2016 dibanding dengan triwulan I Tahun 2015 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 5,06%. Pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Listrik dan Gas sebesar 12,29%, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan sebesar 9,05% dan lapangan usaha Konstruksi 8,69%. Rincian perbandingan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan I Tahun 2015 dan triwulan I Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.3. dibawah ini:

Gambar 2.3.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan I Tahun 2015 dengan triwulan I tahun 2016 berdasarkan lapangan usaha



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 berkisar antara 5%-5,6%. Pada Tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% yang menjadi 5,04% pada tahun 2014 dan menjadi 5,02% pada Tahun 2015. Rincian pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 hingga tahun 2015 selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 2.7. dibawah ini.

Tabel 2.7.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen),
Tahun 2010—Triwulan I 2016

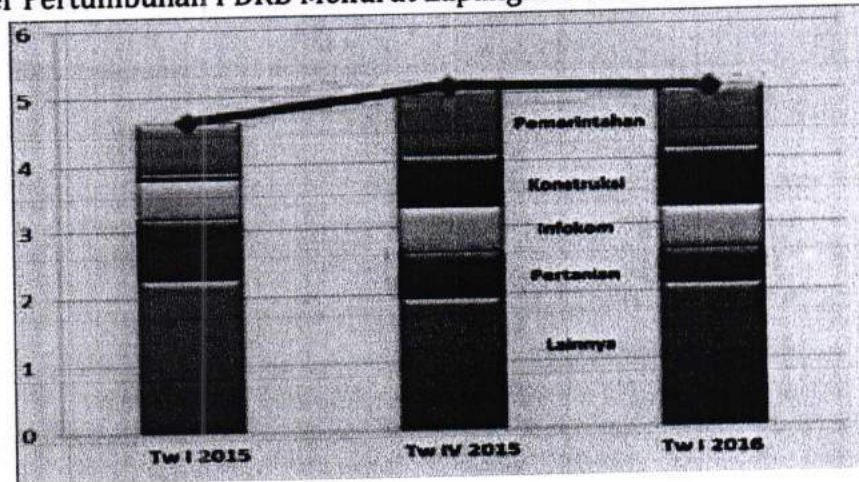
Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	Triw I 2016 terhadap Triw I 2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,02	2,98	2,72	3,59	2,93	1,81
Pertambangan dan Penggalian	5,43	6,18	5,03	5,40	6,42	7,03
Industri Pengolahan	5,76	6,00	4,86	3,37	5,23	4,98
Pengadaan Listrik dan Gas	14,72	9,48	7,59	14,29	10,19	12,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,12	4,87	6,66	4,82	2,07	0,47
Konstruksi	8,98	7,11	5,24	5,20	5,22	8,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,09	6,51	7,46	5,08	6,09	4,14
Transportasi dan Pergudangan	6,69	4,61	5,55	6,55	5,49	8,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	5,94	7,34	6,25	6,17	6,75
Informasi dan Komunikasi	7,05	7,11	6,11	7,65	7,14	7,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,31	10,84	12,11	6,44	5,76	5,17
Real Estat	6,36	6,14	5,47	1,43	3,85	2,85
Jasa Perusahaan	7,44	5,83	5,12	4,90	4,61	2,66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,48	7,13	7,33	5,93	7,09	7,42
Jasa Pendidikan	5,80	5,78	6,49	6,23	4,85	5,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,32	5,57	5,99	3,67	5,52	9,05
Jasa Lainnya	3,69	2,30	3,84	4,38	3,27	3,34
PDRB	5,67	5,46	5,42	5,04	5,02	5,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan I Tahun 2016 (*y-on-y*), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,94%, diikuti Konstruksi sebesar 0,88%, Informasi dan Komunikasi sebesar 0,69% dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,52% sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4. dibawah ini:

Gambar 2.4.

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2016

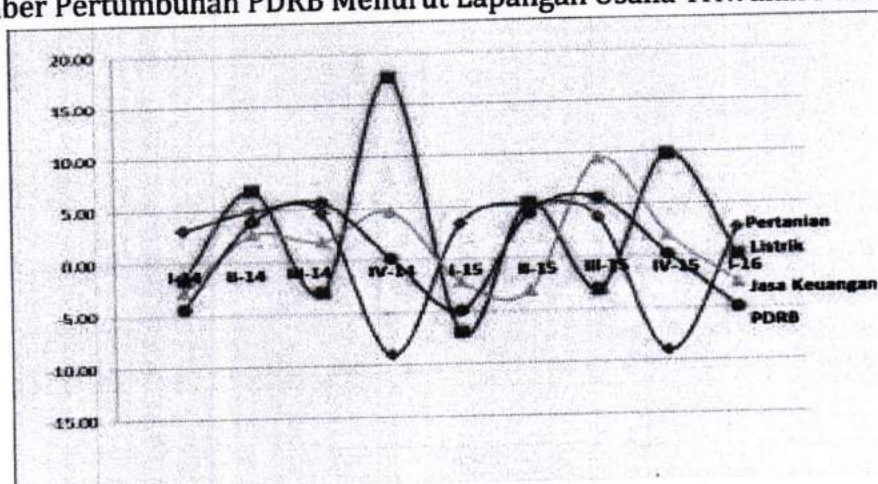


Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan I Tahun 2016 terhadap triwulan IV Tahun 2015 diwarnai oleh faktor musiman pada lapangan usaha Listrik dan Gas sebesar 0,12%. Namun pertumbuhan ini tidak cukup menahan terjadinya kontraksi ekonomi NTT di triwulan I Tahun 2016 sebesar minus 4,88%. Hal ini disebabkan oleh beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pedagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor dan Konstruksi mengalami Kontraksi Pertumbuhan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5. dibawah ini:

Gambar 2.5.

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

C. PDRB Perkapita

Rata-rata PDRB Perkapita penduduk Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 terus terjadi peningkatan hingga tahun 2015. Demikian juga dengan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan terjadi peningkatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Rincian PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur atas dasar harga

berlaku dan atas harga konstan tahun 2013 sampai tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6. dibawah ini:

Gambar 2.6.
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2015 (Juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

D. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Nusa Tenggara Timur pada April 2016 mengalami inflasi sebesar 0,04 persen setelah bulan sebelumnya, Maret, mengalami deflasi sebesar 0,76 persen. Inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yang naik sebesar 1,06 persen, yang diikuti oleh kelompok sandang yang naik 0,72 persen dan kelompok kesehatan yang naik sebesar 0,52 persen. Kelompok pengeluaran pada April 2016 ini yang mengalami penurunan indeks harga antara lain pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang turun sebesar 0,26 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan turun sebesar 1,58 persen.

Laju inflasi Tahun kalender pada posisi bulan April ini masih deflasi sebesar 0,32 persen, sedangkan laju inflasi year on year (April 2016 terhadap April 2015) Nusa Tenggara Timur sebesar 4,86 persen.

Tabel 2.8.
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi NTT April 2016, Tahun Kalender 2016
dan Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Apr 2016	Laju Inflasi Tahun Kalender	Laju Inflasi YOY
	Des 2015	Mar 2015	Apr 2016			
Umum	125,02	124,56	124,61	0,04	-0,32	4,86
Bahan Makanan	122,03	120,70	121,99	1,06	-0,04	10,60
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	132,74	137	137,56	0,41	3,63	9,32
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	122,69	122,83	122,52	0,26	0,41	2,52
Sandang	120,42	121,39	122,27	0,72	1,54	6,15
Kesehatan	112,66	113,35	113,94	0,52	1,13	4,46
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	123,50	123,31	123,38	0,05	-0,10	3,40
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	133,48	129,15	127,11	-1,58	-4,77	-2,10

*) Persentase Perubahan IHK bulan April 2016 terhadap IHK bulan sebelumnya

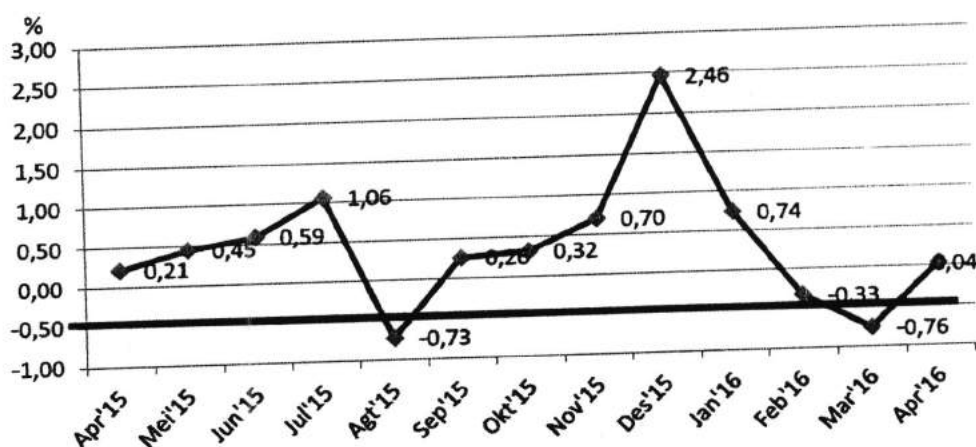
**) Persentase perubahan IHK bulan April 2016 terhadap IHK bulan Desember 2014

***) Persentase perubahan IHK bulan April 2016 terhadap IHK bulan April 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Inflasi pada April 2016 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada bulan yang sama tahun yang lalu yang sebesar 0,21 persen. Perkembangan Inflasi sejak Bulan April 2015 hingga April 2016 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7. dibawah ini.

Gambar 2.7.
Perkembangan Inflasi Nusa Tenggara Timur April 2015-April 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Menurut kelompok pengeluaran, pemberi andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Nusa Tenggara Timur bulan April 2016 adalah kelompok bahan makanan dengan andil inflasi sebesar 0,25 persen, disusul kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil inflasi 0,06 persen, kelompok sandang dan kelompok kesehatan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,03 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan memberikan hambatan laju inflasi dengan andil inflasi sebesar -0,07 persen dan -0,28 persen.

Tabel 2.9.
Indeks Harga Konsumen, Inflasi dan Andil Inflasi NTT April 2016

Kelompok Pengeluaran	IHK	Perubahan (%)	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	124,61	0,04	
Bahan Makanan	121,99	1,06	0,25
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	137,56	0,41	0,06
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	122,52	-0,26	-0,07
Sandang	122,27	0,72	0,04
Kesehatan	113,94	0,52	0,03
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	123,38	0,05	0,00
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	127,11	-1,58	-0,28

Sumber: badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

2.3.2. Lain-Lain Asumsi

2.3.2.1. Ketenagakerjaan

A. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penganggur atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2015 meningkat 0,34 poin yaitu dari 68,91 persen pada Agustus 2014 menjadi 69,25 persen pada Agustus 2015. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2015 mencapai 65,76 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki 80,58 persen lebih tinggi dibanding perempuan 58,43 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2015 mencapai 2,22 juta orang, bertambah 45,06 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2014 sebesar 2,17 juta orang.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2015 sebesar 3,83 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih tinggi 0,57 poin dibanding Agustus 2014 sebesar 3,26 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2015 mencapai 6,18 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

Tabel 2.10.
Penduduk Nusa Tenggara Timur Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan
Februari 2014-Agustus 2015

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
1	Penduduk 15+	Jiwa	3.318.824	3.261.339	3.297.575	3.332.400
2	Angkatan Kerja	Jiwa	2.383.116	2.247.438	2.405.644	2.307.737
3	Bekerja	Jiwa	2.336.212	2.174.228	2.330.534	2.219.291
4	Penganggur	Jiwa	46.904	73.210	75.110	88.446
5	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	835.708	1.013.901	891.931	1.024.663
6	Sekolah	Jiwa	338.359	412.767	397.344	406.687
7	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	370.986	467.847	366.926	479.617
8	Lainnya	Jiwa	126.363	133.287	127.661	138.359
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1.97	3.26	3.12	3.83
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74.04	68.91	72.95	69.25
11	Pekerja Tidak Penuh (Setengah Penganggur)	Jiwa	1.134.105	1.063.028	999.113	285.183
12	Setengah Penganggur (Terpaksa)	Jiwa	292.835	249.082	236.320	852.273
13	Pekerja Paruh Waktu (Sukarela)	Jiwa	841.270	813.946	762.793	1.137.456

Sumber: badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

B. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menjadi salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 relatif sama dengan Agustus 2014 dimana sebagian besar penduduk menekuni sektor pertanian sebesar 1,37 juta orang (61,65 persen), diikuti Jasa Kemasyarakatan (13,25 persen), Perdagangan (8,52 persen) dan sektor industri (6,16 persen). Sebaliknya sektor yang paling sedikit menampung pekerja adalah sector Listrik, Gas dan Air Minum sebesar 3.5 ribu orang (0,16 persen) dan sektor pertambangan sebesar 18,4 ribu orang (0,83 persen).

Sektor yang paling banyak mengalami peningkatan adalah sektor pertanian sebesar 47,02 ribu orang dari 1,32 juta orang pada Agustus 2014 menjadi 1,36 juta orang pada Agustus 2015. Sektor lainnya yang mengalami peningkatan jumlah orang bekerja yaitu Jasa Kemasyarakatan, Industri, Perdagangan, Transportasi, Lembaga Keuangan dan Jasa Kemasyarakatan. Sektor pekerjaan yang digeluti oleh pekerja sedikit banyak tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mereka, lebih didominasi oleh sektor yang berproduktivitas rendah seperti pertanian. Karena itu, arah kebijakan dapat berupa penguatan lapangan usaha pertanian, langsung termasuk pengaturan tata-niaga produk pertanian dan harga input pertanian (pupuk, pestisida, dan lain sebagainya).

Tabel 2.11.
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Februari 2014-Agustus 2015 (Jiwa)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	%
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Perburuan dan Perikanan	1.519.547	1.321.274	1.47.5142	1.368.296	61,65
2	Pertambangan dan Penggalian	29.823	19.050	9.816	18.435	0,83
3	Industri	114.685	166.194	93.189	136.766	6,16
4	Listrik, Gas dan Air Minum	6.840	5.038	3.710	3.537	0,16
5	Konstruksi	77.840	79.317	68.864	74.754	3,37
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	198.998	177.571	189.782	189.109	8,52
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	100.204	90.815	123.745	105.091	4,74
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	18.697	23.528	28.480	29.180	1,31
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	269.578	291.441	337.806	294.123	13,25
	NTT	2.336.212	2.174.228	2.330.534	2.219.291	100

Sumber: badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Bila dilihat menurut status pekerja, dapat terlihat berapa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik, dan berapa yang bekerja di sektor informal. Dari data terlihat indikasi belum adanya perubahan status pekerja dibandingkan dengan Agustus 2014 dimana status formal di NTT hanya sebesar 21,40 persen lebih rendah dibanding nasional yang telah mencapai 42,20 persen, dan pekerja informal NTT 78,60 persen jauh lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 57,80 persen.

Pekerja informal disebabkan tingginya pekerja Keluarga/Tak Dibayar yang menempati proporsi terbesar yaitu sebesar 30,90 persen, diikuti status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar sebesar 29,39 persen. Rendahnya pekerja formal disebabkan Pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang merupakan porsi terendah yaitu 1,61 persen dan Buruh/Karyawan/Pegawai yang sebesar 19,80 persen. Secara keseluruhan sektor informal masih menjadi andalan bagi mayoritas pekerja di NTT, namun ada kecenderungan semakin menurun, yakni dari 78,91 persen pada Agustus 2014 menjadi 78,60 persen pada Agustus 2015. Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa penduduk mampu menciptakan pekerjaan sendiri untuk bertahan hidup. Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang khusus, karena hampir semua orang bisa masuk ke dalam sektor ini jika ada kemauan dan sedikit modal. Hal ini berbeda dengan sektor formal yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus,

sehingga hanya mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu yang bisa masuk ke sektor formal.

Sektor formal hanya dimasuki sebagian kecil saja pekerja tetapi keadaannya cenderung meningkat yaitu dari 21,09 persen pada Agustus 2014 menjadi 21,40 persen pada Agustus 2015. Dilihat dari gender terlihat bahwa penduduk perempuan yang berstatus pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga jauh lebih besar yaitu 50,83 persen daripada penduduk laki-laki yang sebesar 16,00 persen. Data ini menggambarkan bahwa inferioritas perempuan dalam keluarga dimana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini yang menjadi alasan mengapa lebih banyak penduduk perempuan masuk ke dalam pekerja tidak dibayar.

Tabel 2.12.

Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Februari 2014-Agustus 2015 (jiwa)

No	Status Pekerjaan Utama	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	%
1	Formal	435.758	458.554	519.774	475.028	21,40
2	Berusaha dibantu Buruh Tetap	30.992	32.559	43.929	35.669	1,61
3	Buruh/Karyawan/Pegawai	404.766	425.995	475.845	439.359	19,80
4	Informal	1.900.454	1.715.674	1.810.760	1.744.263	78,60
5	Berusaha Sendiri	326.297	406.542	328.884	338.587	78,60
6	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	649.104	613.587	606.845	652.162	15,26
7	Pekerja Bebas	12.088	66.423	88.222	67.162	29,39
8	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	804.173	629.122	786.809	685.722	3,05
	Total	2.336.212	2.174.228	2.330.534	2.219.291	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan tenaga kerja yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Semakin tinggi tingkat pekerja tidak penuh maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Pekerja tidak penuh terbagi atas pekerja paruh waktu (*freelance*) dan setengah penganggur. Tingginya setengah penganggur merupakan permasalahan ketenagakerjaan tersendiri karena bekerja dibawah kapasitas optimalnya.

Dari 2,22 juta orang yang bekerja pada Agustus 2015 terdapat 51,25 persen pekerja tidak penuh, naik dibanding Agustus 2014 yang sebesar 48,89 persen. Pekerja tidak penuh secara nasional sebesar 29,90 persen, jauh lebih rendah dibanding NTT. Pekerja tidak penuh NTT terdiri dari 285,2 ribu orang (25,07 persen) setengah penganggur dan 852,3 ribu orang (74,93 persen) pekerja paruh waktu.

Tabel 2.13.

Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut
Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan Seminggu Yang Lalu
Februari 2014-Agustus 2015

No	Jumlah Jam Kerja	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	%
1	1-7	46.214	57.083	49.583	48.979	2,21
2	8-14	175.965	186.923	148.630	196.186	8,84
3	15-24	428.758	387.865	364.956	450.751	20,31
4	25-34	483.168	431.157	435.944	441.540	19,90
5	0 dan 35+	1.202.107	1.111.200	1.331.421	1081.835	48,75
	Total	2.336.212	2.174.228	2.330.534	2.219.291	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

E. Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Menurut Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan tenaga kerja dapat mencerminkan kualitas tenaga kerja. Pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran.

Dari 2,22 juta orang yang bekerja pada Agustus 2015, sebagian besar bekerja dengan pendidikan kurang dari atau sama dengan SD yaitu sebesar 60,65 persen, SMP (12,52 persen), dan SMA Umum (12,95). Khusus yang tamat dari SMA Kejuruan, masih terdapat 10,03 persen penganggur yaitu 12,2 ribu orang dari 121,7 ribu orang, sedangkan sisanya sebanyak 89,97 persen bekerja.

Tabel 2.14.

Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan Menganggur Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan Februari 2014-Agustus 2015 (jiwa)

No	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jenis Kegiatan	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
1	<=SD	Bekerja	1.568.247	1.368.171	1.373.551	1.346.068
		Pengangguran	14.078	17.924	11.333	15.146
		Angkatan Kerja	1.582.325	1.374.095	1.384.884	1.361.214
2	SMP	Bekerja	259.817	272.676	295.781	277.755
		Pengangguran	6.390	8.205	11.450	9.264
		Angkatan Kerja	266.376	280.881	307.231	287.019
3	SMA Umum	Bekerja	229.376	254.288	326.955	287.447
		Pengangguran	12.667	21.587	24.179	30.644
		Angkatan Kerja	242.043	275.875	351.134	318.091
4	SMK Kejuruan	Bekerja	117.261	109.759	125.300	109.498
		Pengangguran	5.217	8.675	8.049	12.210
		Angkatan Kerja	122.478	118.434	133.349	121.708
5	Diploma I/II/III	Bekerja	53.073	56.531	71.275	58.432
		Pengangguran	2.008	3.644	5.788	3.257
		Angkatan Kerja	55.081	60.175	77.063	61.689
6	Universitas	Bekerja	108.438	124.803	137.672	140.091

No	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jenis Kegiatan	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
		Penggurangan	6.544	13.175	14.311	17.925
		Angkatan Kerja	114.982	137.978	151.983	158.016

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

2.3.2.1. Kemiskinan

A. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2015-September 2015

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Bulan September 2015 sebesar 1.160,53 ribu orang (22,58 persen) meningkat sekitar 690 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang berjumlah 1.159,84 ribu orang (22,61 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2015 – September 2015, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 19,79 ribu orang (dari 1.043,68 ribu orang menjadi 1.063,47 ribu orang) dan untuk perkotaan mengalami penurunan sebanyak 19,1 ribu orang (dari 116,16 ribu orang turun menjadi 97,06 ribu orang).

Tabel 2.15.

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
September 2014-September 2015

No.	Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Presentase Penduduk Miskin
I	Perkotaan		
a	September 2014	105,7	10,68
b	Maret 2015	116,16	11,28
c	September 2015	97,06	9,41
II	Perdesaan		
a	September 2014	886,18	21,78
b	Maret 2015	1043,68	25,46
c	September	1063,47	25,89
III	Kota + Desa		
a	September 2014	991,88	19,60
b	Maret 2015	1159,84	22,61
c	September 2015	1160,53	22,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

Beberapa faktor terkait peningkatan jumlah penduduk miskin dan penurunan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2015 - September 2015:

- Selama periode Maret 2015 - September 2015 inflasi umum sebesar 1,84 persen. Kelompok Bahan Makanan pada periode ini mengalami inflasi yaitu sebesar 0.50 persen.

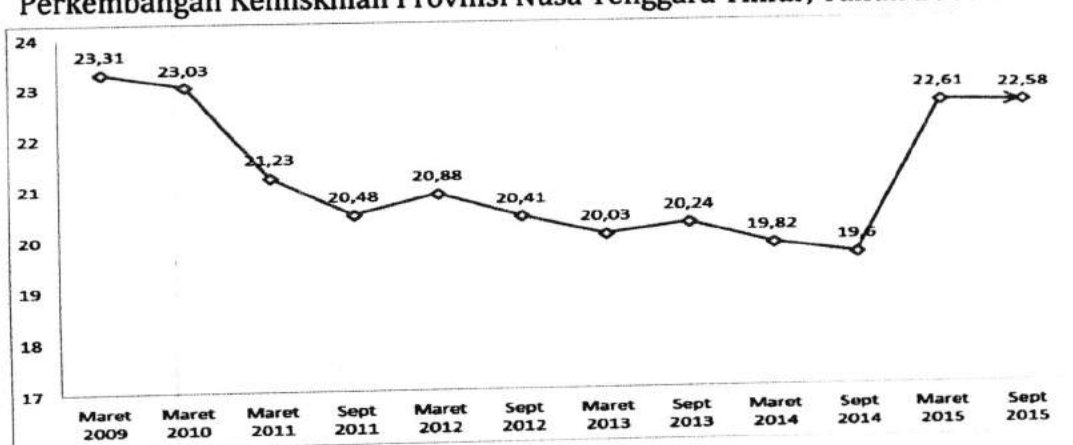
- b. Kendati persentase penduduk miskin mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin nyataanya bertambah. Hal ini disebabkan karena pertambahan penduduk NTT lebih cepat dibanding pertambahan penduduk miskinnya.
- c. Pertumbuhan ekonomi (Q to Q) NTT Triwulan III 2015 terhadap Tw II 2015 tumbuh sebesar 5,65 persen.

B. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2015-September 2015

Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2009 - September 2014 mengalami penurunan tetapi meningkat pada bulan Maret 2015 dan September 2015 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.8. dibawah ini:

Gambar 2.8.

Perkembangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2009-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

C. Perubahan Garis Kemiskinan September 2014-September 2015

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Rincian perubahan Garis Kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 dibawah ini:

Tabel 2.16

Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
September 2014-September 2015

No.	Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
I	Perkotaan			
a	September 2014	243.456	97.003	340.459
b	Maret 2015	260.406	104.514	364.920
c	September 2015	265.296	109.059	374.355
	Perubahan Maret 2015-September 2015 (%)	1,88	4,35	2,59
II	Perdesaan			
a	September 2014	205.997	45.043	251.040
b	Maret 2015	232.460	48.561	281.022
c	September	240.102	50.261	290.363

No.	Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
	Perubahan Maret 2015-September 2015 (%)	3,29	3,50	3,51
III	Kota + Desa			
a	September 2014	213.326	55.210	268.536
b	Maret 2015	238.070	59.793	297.864
c	September 2015	245.160	62.064	307.224
	Perubahan Maret 2015-September 2015 (%)	2,98	3,80	3,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

Periode Maret 2015–September 2015, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 3,15 persen, yaitu dari Rp.297.864,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp.307.224,- per kapita per bulan pada September 2015. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2015 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 79,93 persen, dan pada September 2015 sebesar 79,80 persen.

Tabel 2.17

Daftar Komoditi yang memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) September 2015

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Makanan			
Beras	31,40	Beras	39,19
Tongkol/Tuna/Cakalang	5,49	Jagung Pipilan/ Beras Jagung	5,28
Rokok Kretek Filter	5,02	Gula Pasir	3,55
Gula Pasir	2,81	Kopi Bubuk dan Kopi Instan (Sachet)	2,55
Mie Instan	2,42	Daging Babi	2,5
Kopi Bubuk dan Kopi Instan (Sachet)	1,91	Rokok Kretek Filter	2,37
Telur Ayam Ras	1,68	Daging Ayam kampung	2,33
Bukan Makanan			
Perumahan	9,34	Perumahan	7,36
Pendidikan	2,79	Kayu Bakar	1,81
Angkutan	2,52	Pendidikan	1,16
Kayu Bakar	2,45	Angkutan	0,91
Listrik	1,73	Perlengkapan Mandi	0,78
Bensin	1,54	Bensin	0,56
Perlengkapan Rumah	1,42	Sabun Cuci	0,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 2016

Pada September 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok, gula pasir dan kopi bubuk/instan. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah perumahan, pendidikan, Angkutan,

kayu bakar, listrik dan bensin. Komoditi beras memberikan kontribusi terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan dan disusul komoditi perumahan memiliki kontribusi terbesar kedua. Komoditi rokok filter kretek memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap garis kemiskinan yaitu sebesar 5,02 persen di perkotaan dan 2,37 persen di perdesaan.

D. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

"Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Pada periode Maret 2015 - September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 4,059 pada Maret 2015 menjadi 4,619 pada September 2015. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 1,070 menjadi 1,437 pada periode yang sama.

Tabel 2.17

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparah Kemiskinan (P2) di NTT Menurut Daerah, September 2014-September 2015

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2014	1,663	3,639	3,252
Maret 2015	1,661	4,661	4,059
September 2015	1,778	5,333	4,619
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2014	0,342	0,902	0,792
Maret 2015	0,411	1,236	1,070

Sumber: BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT Mei 2016

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Pada periode Maret 2015-September 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 1,661 menjadi 1,778 demikian halnya dengan nilai

Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) untuk perkotaan mengalami kenaikan dari 0,411 menjadi 0,510. Pada Maret 2015 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) di daerah perdesaan sebesar 4,661 naik menjadi 5,333. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) untuk daerah perdesaan juga mengalami kenaikan pada periode sama yaitu dari 1,236 menjadi 1,669.

2.4. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah bergantung dari kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total perubahan pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan. Secara terperinci komponen-komponen pendapatan daerah yang mempengaruhi total perubahan pendapatan daerah dengan total pendapatan masing-masing. Proyeksi Perubahan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut ini .

Tabel 2.18
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

URAIAN	APBD 2016	RP- APBD 2016	BERTAMBAH / (BERKURANG) dari APBD 2016	% dari APBD PERUBAHAN
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	966,858,995,000	1,000,969,532,000	33,860,537,000	3,50
Pajak Daerah	721,405,575,500	729,920,235,500	8,264,660,000	1,15
Retribusi Daerah	32,225,453,000	43,109,944,000	10,884,491,000	33,78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86,252,500,000	77,606,519,000	(8,645,981,000)	(10,02)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	126,975,466,500	150,332,833,500	23,357,367,000	18,40
Dana Perimbangan	2,864,659,141,000	2,848,930,742,000	(15,728,399,000)	(0,55)
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	82,519,883,000	82,519,883,000	-	0,00
Dana Alokasi Umum	1,337,091,848,000	1,337,091,848,000	-	0,00
Dana Alokasi Khusus	1,445,047,410,000	1,429,319,011,000	(15,728,399,000)	(1,09)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44,501,952,000	44,501,952,000	-	0,00
Hibah	10,663,129,000	10,663,129,000	-	0,00
Dana Darurat	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	33,838,823,000	33,838,823,000	-	-

URAIAN	APBD 2016	RP- APBD 2016	BERTAMBAH / (BERKURANG) dari APBD 2016	% dari APBD PERUBAHAN
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	-	-		
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-	-		
Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan	3,876,020,088,000	3,894,402,226,000	18,132,138,000	0,47

Sumber :Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah

Rencana perubahan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.000.969.532.000,- atau bertambah sebesar Rp.33.860.537.000,- dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu senilai Rp.966.858.995.000,-. Proyeksi dana perimbangan pada Perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.848.930.742.000,- atau berkurang sejumlah Rp.15.728.399.000,- dari jumlah dana perimbangan tahun 2016 senilai Rp.2.864.659.141.000,- sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2016 senilai Rp.44.501.952.000,- dan tidak terdapat perubahan.

Rincian belanja langsung per program/kegiatan per SKPD sesuai struktur belanja termuat dalam lampiran II. Di sisi lain, RKPD Perubahan ini juga sudah memuat rincian belanja langsung per program/kegiatan per SKPD yaitu program/kegiatan yang akan dilaksanakan jika ada kenaikan pendapatan, baik dari PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang termuat dalam lampiran II. Program/kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam lampiran II tersebut pengalokasiannya tentu saja akan memperhatikan aturan yang berlaku, kewenangan, kewajiban, dan kepatutan dan standar harga barang dan jasa untuk tahun 2016.

Tabel 2.19
Target Perubahan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

URAIAN	APBD 2016	RP- APBD 2016	BERTAMBAH / (BERKURANG) dari APBD 2016	% dari APBD PERUBAHAN
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,439,587,700,000	2,472,061,070,105	32,473,370,105	1,33
Belanja Pegawai	566,465,571,200	566,963,495,073	497,923,873	0,09
Belanja Hibah	1,458,913,750,000	1,462,459,350,000	3,545,600,000	0,24

URAIAN	APBD 2016	RP- APBD 2016	BERTAMBAH / (BERKURANG) dari APBD 2016	% dari APBD PERUBAHAN
Belanja Bantuan Sosial	21,830,000,000	19,130,000,000	-2,700,000,000	-12,37
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	357,699,133,800	394,591,170,032	36,892,036,232	10,31
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24,679,245,000	24,917,055,000	237,810,000	0,96
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	4,000,000,000	-6,000,000,000	-60
BELANJA LANGSUNG	1,459,002,857,000	1,531,637,648,684	72,634,791,684	4,98
Belanja Pegawai/Personalia	107,314,681,254	109,330,565,150	2,015,883,896	1,88
Belanja Barang dan Jasa	655,805,837,221	715,169,854,459	59,364,017,238	9,05
Belanja Modal	695,882,338,525	707,137,229,075	11,254,890,550	1,62
Jumlah Belanja	3,898,590,557,000	4,003,698,718,789	105,108,161,789	2,7
Surplus/Defisit	-22,570,469,000	-109,296,492,789	-86,726,023,789	3,84
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	75,000,000,000	158,726,023,789	83,726,023,789	1,12
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7,570,469,000	7,570,469,000	-	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	82,570,469,000	166,296,492,789	83,726,023,789	101,4
Pengeluaran Pembiayaan				
Pembentukan dana cadangan			-	
Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	50,000,000,000	50,000,000,000	-	0
Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000	7,000,000,000	-3,000,000,000	-0,3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	60,000,000,000	57,000,000,000	-3,000,000,000	-0,05
Pembiayaan Netto	22,570,469,000	109,296,492,789	86,726,023,789	384,25
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkennan (SiLPA)	-	-	-	-

Sumber :Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah

2.5. Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 2.19 dapat dilihat Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja tak terduga) pada tahun 2016 sebesar Rp.2.439.587.700.000,- bertambah sebesar Rp.32.473.370.105-, atau naik 1,33% pada Proyeksi perubahan Belanja Tahun Anggaran 2016 atau senilai Rp.2.472.061.070.105-, Perubahan Belanja Langsung tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.1.531.637.648.684-, mengalami kenaikan sebesar Rp.72.634.791.684-, atau 4,98% dari Belanja Langsung

Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.459.002.857.000-, Total Perubahan Belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.4.003.698.718.789-, mengalami kenaikan sebesar Rp.105.108.161.789-, atau 2,70% dari jumlah belanja tahun 2016 sebesar Rp.3.898.590.557.000-, Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp.109.296.492.789

2.6. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan tabel 2.19 dapat dilihat bahwa Perubahan rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SiLPA). Penerimaan pembiayaan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 166.296.4962.789,- bertambah sebesar Rp.83.726.023.789,- atau 101,40% jika dibandingkan dengan pembiayaan tahun 2016 yaitu senilai Rp.82.570.469.000,-. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan pada tahun 2016 senilai Rp. 60.000.000.000,- dan tidak terdapat rencana perubahan pengeluaran pembiayaan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Secara umum rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) Perubahan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk gambaran program prioritas yang terdiri dari Belanja Rutin dan belanja Urusan SKPD termasuk rincian kegiatan beserta sasaran dapat dilihat pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Adapun rincian Belanja Langsung pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 sebesar Rp.1,531,637,648,684 atau terjadi penambahan sebesar Rp.172,634,791,684 dari jumlah Belanja Langsung pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.1,459,002,857,600,00.- Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1.
Perbandingan Pagu APBD Prov.NTT TA.2016 dengan PPAS Perubahan TA.2016
Berdasarkan Urusan

URUSAN/SKPD	PPAS INDUK (Rp.)	APBD (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
1.01. PENDIDIKAN	39,446,566,500	38,121,803,000	39,440,651,700	1,318,848,700
1.02. KESEHATAN	189,098,129,000	223,469,288,900	247,357,644,567	23,888,355,667
1.03. PEKERJAAN UMUM	389,688,678,800	390,415,407,800	398,711,999,250	8,296,591,450
1.05. PENATAAN RUANG	472,993,000	472,992,200	472,992,200	-
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN	53,959,073,600	52,882,868,800	53,184,049,800	301,181,000
1.07. PERHUBUNGAN	19,006,207,000	19,006,207,000	17,331,450,950	(1,674,756,050)
1.08. LINGKUNGAN HIDUP	5,137,488,000	5,137,488,000	5,202,488,000	65,000,000
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,301,687,000	4,301,687,000	4,301,687,000	-
1.13. SOSIAL	29,793,061,000	29,488,038,900	30,601,038,900	1,113,000,000
1.14. KETENAGAKERJAAN	6,273,357,500	8,209,737,500	8,266,737,500	57,000,000
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6,290,927,000	9,287,927,000	9,348,927,000	61,000,000
1.16. PENANAMAN MODAL	18,855,759,000	18,845,759,000	18,864,946,000	19,187,000
1.17. KEBUDAYAAN	5,895,390,500	7,365,979,300	7,477,658,300	111,679,000
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12,058,999,000	12,038,124,000	12,400,351,000	362,227,000
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	13,606,146,900	13,606,146,900	14,497,640,900	891,494,000
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	377,311,515,000	372,831,638,900	412,398,042,567	39,566,403,667
1.21. KETAHANAN PANGAN	7,758,994,000	7,758,994,000	8,183,994,000	425,000,000

URUSAN/SKPD	PPAS INDUK (Rp.)	APBD (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9,336,410,000	9,336,410,000	10,324,939,800	988,529,800
1.24. KEARSIPAN	2,468,845,000	2,468,845,000	2,468,845,000	-
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,969,037,000	7,969,037,000	7,999,037,000	30,000,000
1.26. PERPUSTAKAAN	4,194,926,000	4,194,926,000	4,194,926,000	-
2.01. PERTANIAN	95,077,681,000	95,007,681,000	88,249,067,000	(6,758,614,000)
2.02. KEHUTANAN	19,411,916,000	19,331,916,000	18,840,916,000	(491,000,000)
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	28,827,344,700	28,827,344,700	29,493,125,100	665,780,400
2.04. PARIWISATA	17,938,247,000	17,739,147,000	22,074,371,050	
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN	45,510,767,000	45,495,739,600	44,533,399,600	(962,340,000)
2.06. PERDAGANGAN	5,403,054,300	5,340,519,300	5,340,519,300	-
2.07. INDUSTRI	8,117,548,700	8,102,083,700	8,127,083,700	25,000,000
2.08. KETRANSMIGRASIAN	1,949,119,500	1,949,119,500	1,949,119,500	-
Grand Total	1,425,159,869,000	1,459,002,857,000	1,531,637,648,684	72,634,791,684

Sumber: Olahan PDE Bappeda Provinsi NTT, 2016

Pada Tabel 3.1. diatas, Perubahan Belanja Langsung Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 terbesar yaitu pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian sebesar Rp.412.398.042.567 dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.372,831,639,500,00 atau terjadi penambahan sejumlah Rp.39.566.403.667.

Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SKPD, pagu Belanja Langsung terbesar yaitu ada pada Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.398.711.999.250,-, Biro Umum dengan jumlah Rp.177.335.715.092,- serta RSUD PROF.W.Z.Johanes Kupang sejumlah Rp.168.538.374.567,-. Sedangkan SKPD dengan jumlah pagu terendah yaitu Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan jumlah anggaran Rp.1.347.759.000,-, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan jumlah anggaran Rp.2.010.531.000,- serta Badan Arsip Daerah dengan jumlah anggaran sejumlah Rp.2.468.845.000,-.

Rincian Pagu Belanja Langsung RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 serta jumlah Penambahan/Pengurangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.
Perbandingan Pagu APBD Prov.NTT TA.2016 dengan PPAS Perubahan TA.2016
Berdasarkan SKPD

URUSAN/SKPD	PPAS INDUK (Rp.)	APBD (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
1.01.1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	45,341,957,000,00	45,487,782,300,00	46,918,310,000,00	1,430,527,700,00
1.02.1.02.01. DINAS KESEHATAN	45,017,702,100,00	78,918,222,000,00	78,819,270,000,00	(98,952,000,00)
1.02.1.02.01. RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG	144,080,426,900,00	144,551,066,900,00	168,538,374,567,00	23,987,307,667,00
1.03.1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM	389,688,678,800,00	390,415,407,800,00	398,711,999,250,00	8,296,591,450,00
1.05.1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	48,223,796,600,00	47,147,591,000,00	47,311,662,000,00	164,071,000,00
1.06.1.06.02. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2,636,146,000,00	2,636,146,000,00	2,688,256,000,00	52,110,000,00
1.06.1.06.03. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,572,124,000,00	3,572,124,000,00	3,657,124,000,00	85,000,000,00
1.07.1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN	19,006,207,000,00	19,006,207,000,00	17,331,450,950,00	(1,674,756,050,00)
1.08.1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5,137,488,000,00	5,137,488,000,00	5,202,488,000,00	65,000,000,00
1.11.1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	4,301,687,000,00	4,301,687,000,00	4,301,687,000,00	-
1.13.1.13.01. DINAS SOSIAL	29,793,061,000,00	29,488,038,900,00	30,601,038,900,00	1,113,000,000,00
1.14.1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8,222,477,000,00	10,158,857,000,00	10,215,857,000,00	57,000,000,00
1.15.1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	6,290,927,000,00	9,287,927,000,00	9,348,927,000,00	61,000,000,00
1.16.1.16.01. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH	18,855,759,000,00	18,845,759,000,00	18,864,946,000,00	19,187,000,00
1.18.1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	12,058,999,000,00	12,038,124,000,00	12,400,351,000,00	362,227,000,00
1.19.1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,699,305,900,00	3,699,305,900,00	3,699,305,900,00	-
1.19.1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,535,816,000,00	4,535,816,000,00	4,928,691,000,00	392,875,000,00
1.19.1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,371,025,000,00	5,371,025,000,00	5,869,644,000,00	498,619,000,00

URUSAN/SKPD	PPAS INDUK (Rp.)	APBD (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6,022,868,000,00	5,598,278,000,00	5,598,278,000,00	-
1.20.1.20.03. BIRO HUKUM	3,363,072,000,00	3,363,072,000,00	3,513,072,000,00	150,000,000,00
1.20.1.20.03. BIRO HUMAS	8,003,785,000,00	8,003,785,000,00	8,103,785,000,00	100,000,000,00
1.20.1.20.03. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	8,150,141,000,00	7,988,622,000,00	7,988,622,000,00	-
1.20.1.20.03. BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI NTT	17,653,599,000,00	17,642,453,000,00	17,932,453,000,00	290,000,000,00
1.20.1.20.03. BIRO ORGANISASI	2,600,297,000,00	2,600,297,000,00	2,932,487,450,00	332,190,450,00
1.20.1.20.03. BIRO PEMERINTAHAN	2,916,267,000,00	2,891,457,000,00	4,080,741,950,00	1,189,284,950,00
1.20.1.20.03. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	3,897,810,000,00	3,897,810,000,00	3,897,810,000,00	-
1.20.1.20.03. BIRO UMUM	170,212,373,000,00	169,257,247,000,00	177,835,715,092	8,578,468,092
1.20.1.20.04. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	57,802,282,000,00	55,335,176,000,00	59,097,176,000	3,762,000,000
1.20.1.20.05. INSPEKTORAT	9,679,688,000,00	9,679,688,000,00	9,691,688,000,00	12,000,000,00
1.20.1.20.06. KANTOR PENGHUBUNG	5,290,227,000,00	5,208,579,000,00	5,208,579,000,00	-
1.20.1.20.08. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20,491,857,000,00	20,491,857,000,00	37,509,866,375,00	17,018,009,375,00
1.20.1.20.08. DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH	45,475,191,000,00	45,123,759,900,00	51,723,759,900,00	6,600,000,000,00
1.20.1.20.09. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	2,013,031,000,00	2,010,531,000,00	2,010,531,000,00	-
1.20.1.20.10. SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	2,686,842,000,00	2,686,842,000,00	2,897,292,800,00	210,450,800,00
1.20.1.20.11. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11,052,185,000,00	11,052,185,000,00	12,376,185,000,00	1,324,000,000,00
1.21.1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	7,758,994,000,00	7,758,994,000,00	8,183,994,000,00	425,000,000,00
1.22.1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	9,336,410,000,00	9,336,410,000,00	10,324,939,800,00	988,529,800,00
1.24.1.24.01. BADAN ARSIP DAERAH	2,468,845,000,00	2,468,845,000,00	2,468,845,000,00	-
1.25.1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,864,145,000,00	3,864,145,000,00	3,894,145,000,00	30,000,000,00
1.25.1.25.02. KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	2,757,133,000,00	2,757,133,000,00	2,757,133,000,00	-

URUSAN/SKPD	PPAS INDUK (Rp.)	APBD (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
1.25.1.25.03. SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	1,347,759,000,00	1,347,759,000,00	1,347,759,000,00	-
1.26.1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4,194,926,000,00	4,194,926,000,00	4,194,926,000,00	-
2.01.2.01.01. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	55,987,107,000,00	55,917,107,000,00	52,084,993,000,00	(3,832,114,000,00)
2.01.2.01.02. DINAS PETERNAKAN	39,090,574,000,00	39,090,574,000,00	36,164,074,000,00	(2,926,500,000,00)
2.02.2.02.01. DINAS KEHUTANAN	14,435,195,000,00	14,355,195,000,00	14,380,195,000,00	25,000,000,00
2.02.2.02.02. KPHL MUTIS TIMAU	4,976,721,000,00	4,976,721,000,00	4,460,721,000,00	(516,000,000,00)
2.03.2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	28,827,344,700,00	28,827,344,700,00	29,493,125,100,00	665,780,400,00
2.04.2.04.01. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	17,938,247,000,00	17,739,147,000,00	22,074,371,050,00	4,335,224,050,00
2.05.2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	45,510,767,000,00	45,495,739,600,00	44,533,399,600,00	(962,340,000,00)
2.06.2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13,520,603,000,00	13,442,603,000,00	13,467,603,000,00	25,000,000,00
Grand Total	1,425,159,869,000	1,459,002,857,000	1,531,637,648,684	72,634,791,684

Sumber: Olahan PDE Bappeda Provinsi NTT, 2016

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerjanya dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan tahun 2016 selanjutnya. Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Tahun 2016 Perubahan ini.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN :

**Rincian Program Dan Kegiatan Beserta Sasaran
Dari Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2016**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.01.1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				39.446.566.500 39.446.566.500	38.121.803.000 38.121.803.000	39.440.651.700 39.440.651.700	1.318.848.700 1.318.848.700
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.01.1.01.01.01. PROGRAM BELAYANAN ADMINISTRASI PEKERANTORAN				7.218.362.900	3.850.526.400	3.850.526.400	-
1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.176.791.000	1.201.011.000	1.116.725.000	(84.286.000)
1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEJANGKARAN				44.215.000	44.215.000	44.215.000	-
Agenda: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan							
Sasaran Daerah: Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah							
1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN				23.881.882.450	26.504.756.250	27.907.890.950	1.403.134.700
Tolak Ukur : Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SDB, SMP, SMLB, SMA, SMK); Persentase kelulusan siswa pada setiap jenjang pendidikan; Proporsi guru bersertifikat							
Target Program: Peningkatan mutu APN dan 97,10% menjadi 97,46%							
1.01.1.01.01.20.01. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tertaksananya Koordinasi dan Dukungan Pengembangan PAUD yang holistik integratif; tertaksananya pelatihan manajemen pengelolaan bagi pendidik dan pengelola PAUD; tertaksananya pemberdayaan bagi tenaga pendidik PAUD / lembaga kursus; tertaksananya Pemberian dukungan operasional bagi Kober/TPA/PAUD/TK Binaan Provinsi; Tertaksananya jambore PTK-PAUDNI; Tertaksananya Lomba Kreativitas anak dan Guru PAUD	1 x rapat koordinasi PAUD TK, Provinsi dan 2 x koordinasi ke Kab/Kota dalam rangka pembentukan PAUD HI (22 PAUD Kab/Kota menjadi PAU HI); 100 pendidik dan pengelola PAUD; 100 orang tenaga pendidik PAUD; 1 Kober dan 6 pendidik dan 3 pengasuh dan 1 tenaga kebersihan pada TPA Handayani, 3 pendidik pada TK Anugerah, 2 pendidik pada TK Mutiara, 4 pendidik pada Kober Utm Nee, 2 pendidik kepada TK Pembina dan 40 tenaga paud dan 2 tenaga kesehatan (34 Pendidik PAUD); 150 guru PAUD dan 18 Lomba; 150 anak dan 50 guru PAUD	22 Kab/Kota, Kupang; 22 kab/kota; 22 kab/kota, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; TTS; 22 kab/kota	2.601.238.780	2.204.385.100	2.204.385.100	-

nk

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PJAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PJAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.01.1.01.01.20.02. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Terlaksananya Bimtek Kurikulum 2013 SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK; terlaksananya Pelatihan dan Penyusunan master Soal Tryout UN, untuk Guru SMP/MTS, SMA, SMK, masing-masing 88 guru; terlaksananya Fasilitas Ujian Sekolah SD/MI/SDLB dan Paket A meliputi tahapan pencetakan soal, distribusi soal dan penanganan pelaksanaan US; SMK 30 sekolah; 1) 72 siswa dari 22 kab/kota baru dengan Bakat Istimewa pada Sekolah Kebanyakan Olahraga (SKO); 2) Terlaksananya perkuliahan dan pembayaran honor guru dan tenaga administrasi SKO; 3) Terlaksananya pembiayaan operasional SKO; terlaksananya inventarisasi P3D (Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen) SMA/SMK; terlaksananya Serah Terima P2D (Personil, Prasarana dan Dokumen) SMA/SMK dari Kabupaten/kota ke Provinsi; Terlaksananya Pengembangan Sekolah Model Berbasis TIK di Daerah 3T(terpendiri, terluar, tertinggal)	88 SD, 88 SMP, 88 SMA, 88 SMK; 88 SMP, 88 SMA, 88 SMK; 136.000 siswa; 88 guru (SD 66 org, SDLB 3 mata pelajaran untuk 6 ketunaan (12 org), untuk paket A 5 mata pelajaran (10 org); SD 30 sekolah, SMP 30 sekolah, SMA 30 sekolah, SMK 30 sekolah; 1) 72 siswa dari 22 kab/kota baru dengan Bakat Istimewa pada Sekolah Kebanyakan Olahraga (SKO); 2) 436 SMA dan 235 SMK; 259 SMA dan 103 SMK; 2 sekolah 3T(terpendiri, terluar, tertinggal)	Kupang, Kota Kupang; 22 Kab/Kota; 22 Kab/Kota; 22 Kab/Kota; Kota Kupang; Lembata dan TTS	8.243.722.250	10.424.785.050	11.827.919.750	1.403.134.700
1.01.1.01.01.20.03. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan KKg SD dan MGMP SMP/SMA/SMK; 1) Terlaksananya Center MIPIA SMP/SMA/SMK; 2) Terselurnya paket peralatan MIPIA; 1) Terlaksananya Center BAHASA SMP/SMA/SMK; 2) Terselurnya paket peralatan bahasa;1) Terlaksananya Center IPS SD/SMP/SMA/SMK; 2) Terselurnya paket peralatan IPS; 1) terlaksananya penguatan Bengkel Praktik bagi SMK di perbatasan; negara; 2) Terlaksananya penguatan Bengkel Praktik SMK Perbatasan; terlaksananya Pelatihan persiapan guru-guru MIPIA untuk Magang ke luar negeri; 2) Terlaksananya Diklat MBG bagi kepala sekolah SD/SDLB SMP/SMPLB/MTS, SMA/SMK; Terlaksananya Pelatihan sebagai media pembelajaran bagi Guru SMP/MTS; Terlaksananya Pelatihan Penyusunan bahan ajar berbasis Multimedia bagi guru SD/SMP/MTS; terlaksananya Pelatihan Manajemen bagi kepala Sekolah berbasis TIK; terlaksananya Desiminasi dan Fasilitasi Pemfaatan TIK dalam kelas; terlaksananya Pelatihan Pemfaatan TIK berbasis Multimedia dan Web; terlaksananya evaluasi pemanfaatan bantuan penyadaran Pemuda; Takshow Live TVRI dan Radio (P2)	44 anggota KKg wilayah Timor, 44 anggota MGMP SMP wilayah Sumba, 44 anggota MGMP SMA wilayah Rote,Sabu, Alor, Kota Kupang dan lembata, 44 anggota MGMP SMK wilayah Flores; 5 guru SMP/5 paket peralatan MIPIA SMP, 20 guru SMA/5 paket peralatan MIPIA SMA, 20 guru SMK/5 paket peralatan MIPIA SMK; 1) 5 guru SMP, 20 guru SMA, 20 guru SMK; 2) 5 paket peralatan Bahasa SMA, 5 paket peralatan Bahasa SMP, 5 paket peralatan Bahasa SMA, 5 paket peralatan Bahasa SMP; 1) 5 guru SMP, 16 guru SMA, 16 guru SMK; 2) 5 paket peralatan IPS SMP, 5 paket peralatan IPS SMA, 5 paket peralatan IPS SMK; 1) 18 guru SMK keluaran Utama; 2) 6 paket peralatan Bengkel Praktik Jurusan Utama; 22 guru SMP, 22 guru SMA, 44 Kepek SMP, 44 Kepek SO, 44 Kepek SMP, 44 Kepek SMP/MTS; 120 kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK di kab Kupang, Flotim dan Manggarai Timur; 180 guru SD/SMP/SMA/SMK di kab. Malaka, Alor, Ende, Nagekeo, Manggral dan SBD; 120 Guru SMP/MTS di kab Manggarai, Sikka dan Sumba Barat; 3 sekolah 3 T penerima bantuan tahun 2014 dan 2015; 1380 guru SMA dan 375 org guru SMK; 1) 226 orang Tenaga pendidik dan kependidikan dan 2) 68 tenaga pendidik dan kependidik luar Sekolah dan tenaga fungsional lainnya	Kota Kupang, Ende, Waingapu, Belu, TTU, TTS, Rote Ndao,Alor, Kab. Kupang, Sabu, Ngada, Sumba Barat Daya, Malaka, Flotim, Manggarai Timur, Center Bahasa SMP : Manggarai, Kota Kupang, Sumba Barat, Sikka, Ende Center Bahasa SMA : Manggarai, Kota Kupang, Sumba Barat, Sikka, Ende Flotim, Belu, Rote Ndao, Alor, Center IPS SMP : Manggarai, Kota Kupang, Sumba Barat, Sikka, Ende Center IPS SMA : Manggarai, Kota Kupang, Sumba Barat, Sikka, Ende Center IPS SMK : Kota Kupang, TTS, Belu, Rote Ndao, Alor, Kab. Kupang, TTS, Kupang, Kota Kupang; kab Nagekeo, TTU, Belu, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang; kota Kupang; kab Nagekeo, Manggral dan SBD; kab Nagekeo, Manggral dan SBD; kab Manggarai, Sikka dan Sumba Barat; Belu, Matim dan Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada,Flores Timur, Kota Kupang; Kupang dan 22 Kab/Kota	5.673.324.820	6.088.229.700	6.088.229.700	-

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLOK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	ABD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BURUKBANG (Rp.)
1.01.1.01.01.20.04. Peningkatan Kompetensi Siswa	Tertaksananya Sosialisasi dan Apresiasi pelaksanaan UKS, PMR, Pramuka dan Klub Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK; tertaksananya lomba O2SN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/ SMK; tertaksananya lomba olimpiade sains SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA; tertaksananya lomba kompetensi siswa SMK; Tertaksananya Debat bahasa Inggris tingkat SMA/SMK; tertaksananya Lomba cerdas cermat Empat pilar kebangsaan bagi SMA/SMK; tertaksananya lomba kuis Ki hajar Award untuk SMA/SMK; tertaksananya Debat bahasa Indonesia SMA/SMK; tertaksananya FL2SN SD/SMP/SMA/SMK	22 SD/MI, 22 SMP/MTs, 22 SMA/MA dan 22 SMK; 1) 700 siswa SD/MI, 700 siswa SMP/MTs, dan 352 siswa SMA/SMK; 2) mata lomba O2SN SD/MI, mata lomba O2SN SMP/MTs, mata lomba O2SN SMA/SMK; 178 siswa SD/MI, 122 siswa SMP/MTs dan 198 siswa SMA/MA; 220 org SMA/SMK 66 org (22 tim), 30 Tim SMA/SMK (3 peserta + 1 pendamping/tim); 500 siswa; SMA 66 org (22 tim) dan SMK 66 org (22 tim); 1) 264 siswa SD, 264 siswa SMP, 528 siswa SMA/SMK.	Kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT; kota Kupang dan Luar NTT	7.187.338.100	7.611.097.900	7.611.097.900	
1.01.1.01.01.20.05. Penyenggaraan Kekar paket A, Paket B dan Paket C	Tertaksananya Penyelenggaraan paket A; tertaksananya Penyelenggaraan paket B; tertaksananya Penyelenggaraan paket C	25 org; 25 org; 25 org	22 kab/kota, Kupang	176.258.500	176.258.500	176.258.500	
1.01.1.01.01.21. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN				645.587.800	947.242.000	947.242.000	
Total Ukur : Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SOLB, SMP, SMILB, SMA, SMK)							
Target Program: Jumlah guru Kontrak sebanyak 1542 orang							
1.01.1.01.01.21.01. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tertaksananya Monov Terpadu Program pendidikan dan kebudayaan dan tertaksananya Monitoring BOS SD/MI/SMP/SMA/SMK; tertaksananya Penyusunan / Up-date Profil Pendidikan	22 Kantor Dinas dan Sekolah SD/SMP/SMA/SMK (2 sekolah sampel); 1 dokumen	22 kab/kota; kota Kupang	164.898.600	342.090.800	342.090.800	
1.01.1.01.01.21.02. Peningkatan Mutu Pencapaian Pendidikan	Tertaksananya Rakor perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2016; tertaksananya Rakor Evaluasi Akhir Tahun (Evaluasi pelaksanaan UN/US); tertaksananya Musyawarah Pendidikan dan Kebudayaan	44 orang dari Dinas PPO/PK/PKPO dan 40 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 44 orang dari Dinas PPO/PK/PKPO dan 40 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 1) 1 x /3 tahun. 2) 300 guru, 66 pengawas, 66 kepek, 25 orang DPRD, 25 org Dewan Pendidikan, 10 LPMP, 50 org SKPD terkait Tk.Provinsi, 25 org LSM/lembaga mitra	Ngadi; Ende; kota Kupang	480.689.200	605.151.200	605.151.200	
1.01.1.01.01.21.03. Supervisi, Pelaksanaan US/UN dan Standar Pelayanan Pendidikan	Tertaksananya Sosialisasi hasil Ravalisasi Gong Belajar; pendistribusian dan Pemusnahan ijazah; tertaksananya Supervisi Pelayanan Pendidikan	1) 4x/bulan melalui radio dan 1 x sosialisasi di 22 kab/kota; 2) Buku saku Gong belajar, Leaflet, Pin, spanduk, Balloho; 120.000 Ijasa SD/MI/ SOLB/Paket A, 500.000 Ijasa SMP/SMA/SMK/Paket B/Paket C; 3 jenis Supervisi yaitu: 1) akademik, 2) Manajemen, 3) kinerja kepek dan PTK	22 kab/kota; 22 kab/kota; 22 kab/kota				
Sasaran Daerah: Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat							
1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL				1.781.988.250	1.778.826.950	1.778.826.950	
Total Ukur : Kompetensi tenaga pendidik non formal							
Target Program: Peningkatan kompetensi penyelenggara pendidikan non formal di kab/kota di 22 kab/kota							
1.01.1.01.01.18.01. Pengembangan Model Pembelajaran	Tertaksananya Asesment Awal Pengembangan Model Pembelajaran dan kurikulum PNF; tertaksananya Evaluasi Model Pembelajaran yang diterapkan tahun 2014 dan 2015; tertaksananya Sosialisasi dan Publikasi peserta dari SKB, 30 PKBM, 30 Pamong Belajar, 30 Tutor dan belu dan Malaka; kota Kupang; kota Kupang	4 model pembelajaran; 7 model pembelajaran; 6 x sarana radio, 6 balloho, 6 spanduk dan 2 x terbit buletin kurir; 22 org PNF; tertaksananya Rapat koordinasi SKB, PKBM, Pamong Belajar, Tutor dan Instruktur PNF	Sumba Barat, matim, Fotom dan Alor; Kab. Nagekeo, TTS, TTU, kab. Kupang, Kupang	629.707.000	627.872.200	627.872.200	

na

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	RPAJ MURNI (Rp.)	APBJ MURNI (Rp.)	RPAJ PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.01.1.01.01.18.02. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Non Formal dan Peserta Didik PTK-PNF	Terlaksananya Diklat Keaksaraan Usaha Mandiri; terlaksananya Apresiasi PTK-PNF; terlaksananya Apresiasi PTK-PNF; terlaksananya Kursus menjahit, kecatikan, dan Bahasa Inggris; terlaksananya Hari Akasara Internasional (HAI)	50 pengdola PKBM, 100 orang peserta, 75 org putus sekolah; 500 peserta dari pamong belajar, PTKPNF	Kota Kupang; Kota Kupang dan Jakarta; Kupang, TTS	1.152.281.250	1.150.954.750	1.150.954.750	-
1.01.1.01.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR BIASA				4.697.739.100	3.795.225.400	3.795.225.400	-
Tolak Ukur : Rasio Guru-Siswa SLB setiap jenjang; Rasio Kelas-Siswa SLB							
Target Program: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan luar biasa							
1.01.1.01.01.19.01. Peningkatan Kompetensi Siswa PLB	Terlaksananya Lomba FLSZN, OZSN, OSN; terlaksananya Gebyar PK-PLB; terlaksananya TC Lomba FLSZN, OZSN, OSN dan gebyar; terlaksananya pemberian dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa binaan Provinsi	100 guru pendamping, 200 siswa untuk 18 kab/kota; 26 guru pendamping, 52 siswa; 42 Siswa, 84 guru dan pembimbing TC; 26 SDLB/SMP/SLB/SMALB	Kupang; Kupang; Kupang	1.500.114.800	1.430.725.400	1.430.725.400	-
1.01.1.01.01.19.02. Peningkatan Kompetensi Guru PLB	Terlaksananya Diklat Penyusunan Bahan Ajar Kurikulum 2013; terlaksananya: diklat Guru PLB Jurusan C/Tunagrahita, jurusan Autis, guru inklusif, dan guru PKL; terlaksananya pemilihan guru berprestasi Guru PLB; terlaksananya Magang guru ketrampilan PLB	50 orang guru untuk 18 kab/kota; 50 org guru, 50 org guru, 50 org guru, 50 org guru SLB, minimal 51 dan Golongan II/b; 14 orang	Kota Kupang; Kota Kupang, TTS, Lembata, Ende; Kota Kupang; Jogyakarta	2.550.084.200	1.907.001.800	1.907.001.800	-
1.01.1.01.01.19.03. Peningkatan Manajemen Pendidikan Khusus	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan PAUD dan APE Inklusif; terlaksananya Dukungan Operasional PAUD Inklusi binaan Provinsi; terlaksananya Pemberdayaan Pusat Layanan Autis, 1 PLA di Kota Kupang; terlaksananya MKKS Pendidikan Luar Biasa	200 orang; 1 PAUD, 25 anak; 1 PLA; 50 orang untuk 26 sekolah	Kab. Sumba tengah, Flores Timur, Alor dan TTU; Kota Kupang; Kota Kupang	647.540.100	457.498.200	457.498.200	-
1.02. KESEHATAN				189.098.129.000	223.469.288.900	247.357.644.567	23.888.355.667 (98.952.000)
1.02.1.02.01. DINAS KESEHATAN				45.017.702.100	78.918.222.000	78.918.270.000	-
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.866.643.616	2.909.527.816	2.909.527.816	-
1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3.094.610.000	3.036.571.475	3.036.571.475	-
1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				20.000.000	16.000.000	16.000.000	-
Agenda: Pembangunan kesehatan							
Sasaran Daerah: Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular							
1.02.1.02.01.20. PROGRAM PENINGKATAN GIZI				1.680.127.000	1.678.317.000	1.678.317.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya status gizi balita							
Target Program: Menurunkan persentase bayi kurang gizi dan 19,1%							
1.02.1.02.01.20.01. Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita	Terlaksananya money kegiatan PMT pemulihan ibu hamil dan KLB Gizi Buruk; Terlaksananya kunjungan keluarga oleh kader dalam rangka pendampingan penerapan pola makan seimbang keluarga; Terlaksananya pertemuan diseminasi informasi hasil penerapan pola makan keluarga pada saat musrenbang kecamatan	22 kab/kota; 306 kader di 306 Desa/Jelurahan; SKPD Kabupaten, Aparat Desa dan Camat, Kader, lokasi musrenbang kecamatan	22 kab/kota; 22 kab/kota; 22 kab/kota	1.680.127.000	1.678.317.000	1.678.317.000	-

3

URUSAN/SPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK URUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN 1.02.1.02.01.34. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	KELUARAN/KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUJUNI (Rp.)	ABD MUJUNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETRAMUDA/BERKURANG (Rp.)
Tolak Ukur : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas maupun pemerataan penyebaran							
Targe Program: Menurunkan persentase penyebaran penyakit malaria dari 19,12%							
1.02.1.02.01.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peletihan tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di daratan timor Provinsi Nusa Tenggara Timur; Terlaksananya Pendampingan Akreditasi Puskesmas bagi petugas kab/kota; Terlaksananya TOT Manajemen Kinerja Klinik (PMKK); Terlaksananya Wisuda/angkat sumpah/pelantikan 1669 org wisuda; Terlaksananya moner persiapan dan pelaksanaan seleksi mhs br program D3 untuk 10 institusi DIKNAKES; Terlaksananya pendampingan persiapan dan pelaksanaan ujian akhir program untuk 8 institusi DIKNAKES/435 org; Monev mahasiswa kedokteran, dokter muda, Mahasiswa ProgramPPDS-PPDS-BK/rag sedang mengikuti pendidikan 23 institusi pendidikan; Terlaksananya Pertemuan Penilaian Akreditasi pelatihan dan sosialisasi PPDS-PPDS-BK/Tubel online	6 org anggota tim penilai angka kredit dari Provinsi dan kab/kota sedaratan timor/diliat TTU dan kab.kupang/ 30 org; 54 tenaga Dinkes Kab dan Puskesmas (diliat TTU, Ngada, SBD,Flotim)/ 3x 18 kab; Perawat dan Bidan dari 22 Kab/Kota (44 org); 7 institusi; 735 mhs baru; 8 institusi; 23 institusi; 1 kali	Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang; Akper maranatha kpg, Prodi Kebidanan STIKES Maranatha kpg, D3 Kebidanan STIKES CHMK Kpg, AKPER Pemda Belu, AKPER pemda Sumba Barat, AKPER St.Elisabeth Lela, Prodi D3 Keperawatan Unipa Maumere); Akper Maranatha Kpg,Prodi Kebidanan STIKES Maranatha Kpg,D3 Kebidanan STIKES CHMK Kpg,Akper Pemda Belu,Akper Pemda Sumba Barat,Akper Ruteng,STIKES St. Paulus Ruteng,STIKES Ina Mandiri Flotim, STIKES Kencana Sakti Husada Rote Ndao; Akper Maranatha Kupang, Prodi Kebidanan STIKES Maranatha Kupang, D3 Kebidanan STIKES CHMK Kupang, Akper Pemda Belu, Akper Pemda Sumba Barat, Akper St.Elisabeth Lela, UNIPA, STIKES St. Paulus Ruteng; Trisakti, Ukrida, Uki, Untar, Atmajaya, Veteran, Yarsi, Muhammadiyah, Maranatha, Unair, Wijayakusuma, Hang Tuah, Unibrau, IIK,UI Kediri, Univ.Jember, Unit Denasar, Saraswati,UGM, Univ.Islam, Samratulangi, UNHAS, UNDIP,UNDANA; Kota Kupang	1.373.509.500	1.373.509.500	1.373.509.500	-
1.02.1.02.01.34.02. Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan Strategis	Terlaksananya Pengumpulan Data dalam rangka kajian perencanaan kebutuhan pendayagunaan, pendistribusian Nakes strategis tingkat provinsi dan kab/kota termasuk data spesialis residence pasca; Terlaksananya pendistribusian Mhs PKN prodi kebidanan, keperawatan, kesling, gizi Poltekkes Kpg ke 4 lokasi desa mandiri anggur merah; Terlaksananya penempatan dr.drg.bidan PTT di kab/kota; Terlaksananya penarikan dr.drg.bidan PTT; Terlaksananya pertemuan pengelola PTT; Terlaksananya pendampingan dan penempatan dr.drg.bidan PTT; Terlaksananya penyelesaian kenaikan pangkat pemindahan dan pemberhentian tenaga PNSD dan PNS Pusat, kenaikan pangkat, jabatan fungsional; 2 kali	22 kab/kota; prodi kebidanan, keperawatan, kesling, gizi Poltekkes Kpg; dr/drg 228 org, bidan 279 org; Dr/drg 180 org; 1 kali; 3 periode; 2 kali	22 kab/kota, Jakarta; Kabupaten Kupang; 22 kab/kota; 22 kab/kota; Kota Kung; 22 kab/kota; Denpasar	3.607.406.000	3.590.774.000	4.958.150.000	1.367.376.000

awes)

URUSAN/SEPP/ AGENDA/SAKSIAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	ABD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMPALU/BERKUPANG (Rp.)
1.02.1.02.01.34.03. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan	Terlaksananya pemilihan 8 org tenaga kesehatan teladan untuk 4org TK. Nasional dan 4 TK Provinsi; Terlaksananya Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional kesehatan; Terlaksananya Bimtek Jabatan fungsional; Terlaksananya pembekalan Dokter Internship di provinsi NTT; Terlaksananya Fasilitas uji kompetensi tenaga kesehatan; Terlaksananya Persiapan pelaksanaan akreditasi institusi UPT Dinas kesehatan provinsi; Terlaksananya Pemberian Rekomendasi jln pembukaan program kesehatan di institusi pendidikan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta di NTT; Terlaksananya fasilitas pengurusan sertifikasi dan akreditasi tenaga kesehatan	4 orang Tk. Nasional dan 4 Tk. Provinsi; 1300 tenaga fungsional; 1 kali untuk 22 kab/kota; 200 orang; 400 orang; 4 lokasi; 2 UPTD (Latrakes dan Povabekes); 4 institusi; jln untuk 1000 tenaga kesehatan	Kota Kupang; Kota Kupang; Provinsi dan kab/kota; Kota Kupang; Kota Kupang; 4 Kabupaten(maumere, atambua, leia, waingapu, endel); Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang	598.574.600	598.274.600	598.274.600	50.000.000
1.02.1.02.01.35. PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN				1.206.211.600	1.256.150.019	1.306.150.019	
Tolak Ukur : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik; Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi dibidang kesehatan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kesehatan							
Target Program: Peningkatan akses informasi dan rancangan peraturan tentang kesehatanJumlah penelitian yang dapat diaditan rumusan kebijakan 1 paket				522.464.000	531.356.000	581.356.000	50.000.000
1.02.1.02.01.35.01. Monev Terpadu Pelaksanaan Prog. Kes. Di Kab/Kota	Terlaksananya pendampingan bagi pengelola SPM BIMDAL UW-SPM bidang kesehatan; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terpadu pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	22 kab/kota , untuk penugas SPM di kabupaten/kota; 22 kab/kota	22 kab/kota; 22 kab/kota				
1.02.1.02.01.35.02. Penelitian/Kajian di bidang kesehatan	Terlaksananya pendampingan penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas; Dinas Kesehatan dan Provinsi; Terlaksananya pelatihan SIKDA Elektronik; Terlaksananya Pengkajian Program kesehatan, 1 dok.	Petugas perencanaan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk 8 kabupaten; 35 orang tim silda provinsi dan 18 org dari kab/kota; 35 orang tim silda provinsi dan 18 org dari kab/kota	8 kab (Malaka, Rote, Sabu Raijua, Alor, Nagekeo,Matin,SRD, dan Sumba Tengah; Kota kupang; 18 kab/kota; Kota Kupang; 18 kab/kota; Kota Kupang	683.747.600	724.794.019	724.794.019	
1.02.1.02.01.37. PROGRAM PROGRAM UPANA KESEHATAN PERORANGAN				3.468.715.200	3.468.715.200	3.468.715.200	
Tolak Ukur : Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan rujukan							
Target Program: Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Terlaksananya sosialisasi JKN-BPJS melalui even khusus; Terlaksananya pertemuan LS/UP, koordinasi dan konsultasi, sinkronisasi, harmonisasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui BPJS; Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan yg optimal bagi penduduk miskin di kis 3 RS, penyelenggaraan JKN; Tersedianya bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin melalui BPJS kesehatan	4 kali; 4 kali; 43 RS; 22 kab/kota	Kupang, 22 kab/kota; Kota Kupang, Jakarta; 22 kab/kota; 22 kab/kota	3.468.715.200	3.468.715.200	3.468.715.200	
1.02.1.02.01.37.01. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin							
Sasaran Daerah: Penurunan Kematian Ibu baru melahirkan dan anak baru lahir				17.704.003.364	52.635.033.364	51.315.033.364	(1.320.000.000)
1.02.1.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT							
Tolak Ukur : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat akses dan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan RSUD							
Target Program: Tersedianya obat perbelkies di 22 kabupaten/Kota Meningkatkan jumlah puskesmas dari 353 unit	Terlaksananya pengadaan vaksin, obat, dan perbekalan kesehatan untuk buffer stock provinsi dan KLB; Terlaksananya pendistribusian , obat, vaksin , dan perbekalan kesehatan	1 paket vaksin, obat dan perbekalan kesehatan provinsi untuk provinsi dan 22 kab/kota; 22/kabupaten kota	Kota Kupang; 22 kab/kota	790.000.000	790.000.000	790.000.000	
1.02.1.02.01.15.01. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan							
1.02.1.02.01.15.02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumda, Alor, Sabu Raijua Timor, dan Flores	Terlaksananya kunjungan 4 spesialis	4 dokter spesialis, 4 kali kunjungan di 7 RS	Wilayah Flores (RS TC,Hillres Maumere, RS Ende, RS Ruteng), Sumba (RS Waingapu) dan RS Rujukan RS Sab , Timor dan Alor	1.674.591.000	1.674.591.000	1.674.591.000	

202

[illegible]

URUSAN/KEPD/ AGENDA/ISSUAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEMBARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKURANG/BERKURANG (Rp.)
1.02.1.02.01.16.01. Pelaksanaan Revolusi KIA, RAD MDGs serta RAD Pangan dan Gizi	Terlaksananya adokasi dalam upaya penurunan AKN,AKB dan AKRAL ke Kabupaten; Terlaksananya pelatihan perawat bayi baru lahir metode kangguru untuk 9 kab. Yang kementerian neonatal dan bayi paling tinggi; Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M)	15 orang Iltas sektor di 5 kab yang angka kematian Neonatal, bayi dan Balita tinggi; Leoheba, Baa', Labuan Bajo, Manggarai Timur, 9 kab Yang kementerian neonatal dan bayi paling tinggi; Malaka, Kalabahi; 4 kabupaten yg belum pernah dilatih MTBS dan angka kesakitan tinggi, (60 Peserta, 15 org/Kab)	Sumba Barat, Rote Ndao, Nagekeo dan Manggarai Timur, 9 kab Yang kementerian neonatal dan bayi paling tinggi; Malaka, Sikka, Alor dan Ende	7.668.895,150	6.658.896,750	6.560.912,750	(97.984.000)
1.02.1.02.01.16.02. Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat Bidang Kesehatan	Terlaksananya pertemuan koordinasi pengelolaan pengembangan desa siaga oleh pokjani desa siaga; Terlaksananya pertemuan dan RTL pelaksanaan pembangunan STBM/AMPL-BM di Provinsi NTT; Terlaksananya Pertemuan Tim, Pembina KKS, verifikasi/ penilaian KKS di Provinsi untuk penyiapan dan penguatan kelembagaan forum penyelenggaraan KKS di daerah binaan	22 pengelola pokjani 22 kab/kota dan tim pokjani desa siaga provinsi 13 org; 1 kali; 2 kali pertemuan dan verifikasi di 22 kab/kota	Kota Kupang, 22kab/kota; 22 kab/kota, Jakarta	571.170,870	514.346,870	514.346,870	-
1.02.1.02.01.16.03. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Terlaksananya Evaluasi Sistem Pemantauan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Bayi baru Lahir (sistem 2H2); Terlaksananya Orientasi Perencanaan Terpadu KIA	18 puskesmas/ kabupaten; pengelola program kesehatan ibu, btkor kab di 12 kab/kota	18 kab/kota; Kota Kpg, Kab Kpg, Belu, Malaka, Sikka, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Alor, Sabu Raijua, Rote Ndao	389.823.900	414.094,106	414.094,106	-
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan				768.011.300	768.011.300	669.667.300	(98.344.000)
1.02.1.02.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYELAIAN LINGKUNGAN (P2PL)							
Tolak Ukur : Menurunnya angka kejadian penyakit pada penduduk dan meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan							
Targe Program: Menurunnya jumlah angka kejadian penyakit Menular							
1.02.1.02.01.19.01. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya jumlah pengaduan Bahan Pendukung Logistik Penunjang Penderita dan Alat pelindung diri (APD) Program HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) ; Terbentuknya Rencana Tindak Lanjut dalam Rangka meningkatkan kualitas Program ATM (HIV-AIDS, TB); Terlaksananya kegiatan evaluasi pengobatan layanan komprehensif HIV AIDS berkesinambungan bagi pengelola program HIV; Terlaksana kegiatan survey darah jari program Filara	22 kab/kota; 22 kab/kota; 6 kabupaten; 8 kabupaten	Kota Kupang, 22 Kab/Kota; Belu, Sikka, Ende, Flotim, Manggarai, Manggarai Barat, Malaka, Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Sabu, Lembata, dan kab Kupang	451.169.000	451.169.000	352.825.000	(98.344.000)
1.02.1.02.01.19.02. Peningkatan Penguatan KLB/bencana	Terlaksananya pendampingan dan money implementasi EWARS (early warning Alert Respon System); Terlaksananya kegiatan PEP(penyelidik Epidemiologi), Investigasi dan Penguatan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Verifikasi Rumor KLB; Terlaksananya pertemuan evaluasi Penguatan KLB Penyakit menular, potensi Wabah dan krisis kesehatan akibat bencana	22 kab/kota; 1 Paket; 4 kali rapat(1 ki rapat/20 org)	22 kab/kota; 8 lokasi KLB	316.842.300	316.842.300	316.842.300	-
1.02.1.02.01. RSUD PROF. W.Z. JOHANNES KUPANG				144.080.426.900	144.551.066.900	168.538.374.567	23.987.307.667
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.294.584.050	2.396.834.050	2.396.834.050	-
1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				108.300.000	108.300.000	108.300.000	-
1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				17.100.950	17.100.950	17.100.950	-

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN/KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKEMBANG/BERKURANG (Rp.)
Agenda: Pembangunan Kesehatan Sasaran Daerah: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu 1.02.1.02.01.37. PROGRAM UPAVA/ KESEHATAN PERORANGAN							
Tolak Ukur : Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan rujukan							
Target Program: Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin							
1.02.1.02.01.37.04. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Tertaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa perawatan/pengantaran jenazah tidak mampu/tidak dikenal, biaya pengumunan jenazah, penguburan jenazah tidak dikenal	932 jenazah, 9 kali, 9 jenazah	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	51.660.441.900	52.028.831.900	52.217.762.254	188.930.354
1.02.1.02.01.37.07. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masalah pasien safety/pelayanan rujukan yang diselesaikan; jumlah tenaga honorer; insentif dokter spesialis; insentif dokter sub spesialis; intensif rohaniawan; obat-obat diadatkan; bahan logistik rumah sakit; bahan pakai habis ruangan; bahan pakai habis reagen; bahan pakai habis hemodialisa; pakai habis radiologi; alat kesehatan pakai habis; obat-obatan yang diadatkan; kantong darah; tersedianya makan minum pasien; jumlah mobil operasional; peneltian; dana kegiatan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan; dana pengadaan SIM untuk mengurangi kebocoran pembayaran klaim pasien	100%; 117 orang; 49 orang; 2 orang; 7 orang; 1 paket; 1 paket; 32.512 paket; 706 set/pcs/trak/galon/liter; 14.995 lembar/tube/box/roll/dos/tacon/erigen; 1 paket; 1 paket; 12.250 bag; 22.794 hari rawat; 3 unit; 3 penelitian; 1 paket; 1 paket	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	13.608.000.000	13.603.000.000	13.579.479.354	(23.520.646)
1.02.1.02.01.37.08. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	Perpanjangan perjanjian radiologi; Perpanjangan perjanjian peralatan pendukung; Test rutin hidran kebakaran; Perpanjangan SIUP, STU, & HO (BPPT Kota Kupang); Pengurusan perjanjian pendirian/operasional RS pada lokasi baru	Masing-masing 1 paket	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	150.000.000	47.750.000	47.750.000	-
1.02.1.02.01.37.09. Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	Pengadaan alat kedokteran/kesehatan/sarana dan prasarana RS alat kedokteran kulit kelamin, alat Neurologi, Radiologi(USG 4 dimensi), Fisioterapi, alat tensi meter), ruang onkologi	150 buah/unit/set, 0 paket	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	37.502.441.900	37.983.081.900	38.195.532.900	212.451.000
1.02.1.02.01.38. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				90.000.000.000	90.000.000.000	113.798.377.313	23.798.377.313
Tolak Ukur : Peningkatan mutu BLUD							
Target Program: Pelayanan yang berkualitas							
1.02.1.02.01.38.01. Kegiatan peningkatan Mutu BLUD	Tertaksananya pelayanan yang berkualitas	12 bulan	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	90.000.000.000	90.000.000.000	113.798.377.313	23.798.377.313
1.03. PEKERJAAN UMUM							
1.03.1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM				389.688.678.800	390.415.407.800	398.711.999.250	8.296.591.450
				389.688.678.800	390.415.407.800	398.711.999.250	8.296.591.450
Sasaran Daerah: Terwujudnya petaan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah 1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN							
1.03.1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				311.400.000	326.800.000	3.791.350.000	3.464.550.000

22

URUSAN/SEPO/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	ABPD MURNI (Rp.)	PPAS PENUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.03.1.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				70.000.000	81.500.000	81.500.000	
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan							
1.03.1.03.01.23. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				13.112.500.000	13.029.100.000	19.256.725.000	6.227.625.000
Tolak Ukur : Meningkatnya Kualitas Perumahan & Permukiman di NTT							
Target Program: Meningkatnya perumahan layak huni 2,05% dari 41,27% menjadi 93,32%; Meningkatnya utilitas perumahan yang layak 10% dari 41,27% menjadi 93,32%.			Kota Kupang, Kab. Kupang	13.112.500.000	13.029.100.000	19.256.725.000	6.227.625.000
1.03.1.03.01.23.01. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Terlaksananya peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan 12 kawasan perkantoran (1 paket)						
Sasaran Daerah: Meningkatnya kapasitas, partisipasi masyarakat dan produktivitas layanan jaringan irigasi teknis							
1.03.1.03.01.25. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				17.499.203.800	18.061.532.400	17.198.201.450	(863.330.950)
Tolak Ukur : Meningkatnya proporsi masyarakat yang mendapat pelayanan air bersih							
Target Program: peningkatan pelayanan air bersih 5,61% dari 55,95% menjadi 61,56%							
1.03.1.03.01.25.01. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, bantaran Sungai dan pengendalian banjir	Terlaksananya Bantaran, Tanggul Sungai dan stasiun Hidrologi; Terpeliharanya Bantaran, Tanggul Sungai dan stasiun Hidrologi	5 DAS dan 38 Stasiun Hidrologi; 5 DAS dan 10 St. Hidrologi; 5 DAS dan 31 St. Hidrologi	Sumba;Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah); Kab. Nagekeo, Sikka, Manggarai, Wilayah Flores, Lembata, Alor; Timor (Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka)	17.499.203.800	18.061.532.400	16.784.517.400	(1.276.615.000)
1.03.1.03.01.25.02. Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum	Terlaksananya Konstruksi Jaringan Air Bersih Minum Kawasan; Terdistribusinya air minum memenuhi syarat dari IPAM Tlong dan Tulun ke PDAM dan Lembaga	1 paket; 150 liter/detik	Kota Kupang; Kota dan Kab. Kupang				
1.03.1.03.01.34. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI				95.195.870.350	95.598.720.000	83.880.537.000	(12.118.183.000)
Tolak Ukur : Meningkatnya luas wilayah pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi dan embung; Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan embung							
Target Program: peningkatan pelayanan irigasi dan air baku; operasi dan pemeliharaan embung - embung 150; Daerah irigasi 37 Di (meningkat 10% dari 70% menjadi 80% dalam kondisi baik)							
1.03.1.03.02.34.01. Peningkatan Jaringan Irigasi	Terlaksananya peningkatan pelayanan jaringan irigasi; Terlaksananya 13 Di; 36 Anggola Dewan SDA dan 11 staf sekretariat; operasional dewan SDA NTT; Terlaksananya pengelolaan SDA Wilayah dewan SDA; 2 DAS di 4 Kabupaten daratan Sumba; --- Sumba; Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan SDA (Hibah/ Loan Bank kelompok masyarakat pemakai air Dunia & Pendamping APBD I)		13 D.I. : Kab Kupang, TTU,Belu, Malaka, Rote Ndao, Lembata, Flotim, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya; Kota Kupang (Wisimp 2 Komponen 1(Bidang SDA)); Daratan Sumba (Wisimp 2 Komponen 1(UPT Sumba)); Kab. Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai barat, Sumba Timur (Wisimp 2 Komponen 2)	58.136.074.600	57.901.143.200	53.004.952.200	(4.896.191.000)
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan							
1.03.1.03.02.34.03. Rehabilitasi & Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang telah di bangun; Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang telah di bangun	Pemeliharaan Rutin 8 D.I, Berkala 7 D.I; Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi yang telah di bangun; Terpeliharanya Jaringan Irigasi yang 6 D.I, Berkala 4 D.I; Pamel Rutin 7 D.I, Pamel Berkala 5 D.I	lokasi : Kab Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Rote Ndao; Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya; Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, Ende, Alor	6.247.402.000	7.460.472.000	2.531.377.000	(4.929.095.000)

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK DAERAH/PROGRAM/TARGET URUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp.)
1.03.1.03.02.34.04. Pembangunan, Pemeliharaan & Rehab Embung	Terpeliharanya Embung Kecil yang Telah dibangun; Terpeliharanya Embung Kecil yang Telah dibangun; Terpeliharanya embung kecil; Terlaksananya studi 1 D.I di Kab Manggarai	6 Buah Embung; 5 Buah Embung; 5 buah embung kecil; 17 Buah Embung Kecil; 31 Data perencanaan embung kecil dan	Lokasi : Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu dan Rote Ndao; Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah; Ende, Ngada, Alor; 8 Kab (Kab Kupang, Belu, Malaka, Flolim, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah; 1 Bh (D.I Golowoi 1500 Ha di Kab. Manggarai, 10 Bh. Di Pulau Flores, Lembata dan Kepulauan; 10 Bh di Pulau Timor, Rote dan Alor	30.812.393.750	30.637.104.800	28.344.207.800	(2.292.897.000)
Sasaran Daerah: Meningkatnya profesionalisme masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan Infrastruktur							
1.03.1.03.01.38. PROGRAM MANAJEMEN & LAYANAN TATA LAKSANA INFRASTRUKTUR PU				5.002.288.750	6.516.532.050	10.161.532.050	3.645.000.000
Tolak Ukur : Meningkatnya ketersediaan data PU yang termutakhir; Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium pengujian; pembinaan jasa konstruksi							
Target Program: Meningkatnya ketersediaan data PU yang termutakhir 1 paket; meningkatnya pelayanan jasa laboratorium pengujian 50 paket; pembinaan jasa konstruksi 15%.							
1.03.1.03.02.38.01. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pogram & Kegiatan 12 kali lap bulanan, 4 kali laporan triwulan, 1 kali laporan tahunan; 1 kali penyusunan Renja, RKA & DPA; 3 kali Bidang PU & Penataan Ruang; Terlaksananya Monitoring & Evaluasi monitoring, evaluasi & pengendalian kegiatan di Kab/Kota; Pelaksanaan Program & Kegiatan Bidang PU & Penataan Ruang; 1 kali; 4 kali; 2 kali; 2 kali; 12 bulan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang PU & Penataan Ruang; Terlaksananya Rapat Koordinasi, Evaluasi & Pengendalian Program & Kegiatan Bidang PU & Penataan Ruang; Terlaksananya keikutsertaan dalam Konsultasi Regional (Pra Korreg & Korreg) Program/ Kegiatan Bidang PU & Penataan Ruang; Terlaksananya Koordinasi/ Konsultasi Program & Kegiatan Bidang PU & Penataan Ruang; Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	22 Kab/ Kota se Provinsi NTT; Kota Kupang; 22 Kab/ Kota se Provinsi NTT; Kota Kupang; Kota Kupang; provinsi terpilih; Jakarta; Kota Kupang	1.894.268.750	2.132.868.750	2.132.868.750	-	
1.03.1.03.02.38.02. Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian	Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian; Terlaksananya Pelayanan Perbengkelan dan Alat Berat; Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi; Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	12 bulan; 12 bulan; 4 kali pembinaan; 5 angkatan (@30 orang)	Kota Kupang; 22 Kab/Kota se-Provinsi NTT; 3 wilayah pelayanan jakon di NTT; Kota Kupang	3.108.020.000	4.383.663.300	8.028.663.300	3.645.000.000
Sasaran Daerah: Terciptanya konektivitas antar pusat produksi dan pusat koleksi/distribusi barang dan jasa							
1.03.1.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				200.604.000.800	191.277.973.250	211.808.904.800	20.530.981.550
Tolak Ukur : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan provinsi							
Target Program: Peningkatan jalan provinsi 15%; Jembatan dengan kondisi baik; Rehabilitasi jalan dan jembatan							
1.03.1.03.01.15.01. Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya dan peningkatan ruas jalan Provinsi; 39 ruas sepanjang 46 Km; 34 Km; 12 Km; 4 buah sepanjang Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (Pemeliharaan OAK); Terbangunnya Jembatan Provinsi; Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan & Jembatan; Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	50 M; 22 paket; 22 paket	Tersebar di Kab/ Kota se NTT; 22 Kab/ Kota se NTT (Jembatan Termanu); 22 Kab/ Kota se NTT	173.913.350.800	164.875.273.250	185.665.823.250	20.790.550.000
1.03.1.03.01.15.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan Provinsi & Jembatan yang Berada pada Ruas Provinsi; Terpeliharanya Jalan Provinsi & Jembatan; Terpeliharanya perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan; Terlaksananya pengawasan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan; Terlaksananya survey kondisi jalan dan jembatan	Rehap/ Pamel jalan 10 Pkt; Rehap/ Pamel Jembatan 5 Pkt; Pengawasan Rehap/Pamel 7 Pkt; 15 paket; 7 paket; Ruas Jalan Provinsi sesuai SK	Tersebar di Kab/ Kota se NTT	26.690.650.000	26.402.650.000	26.143.081.550	(259.568.450)
1.03.1.03.01.35. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG EKONOMI				55.369.000.000	62.504.200.000	49.914.148.850	(12.590.051.150)

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SSASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	ABD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
Tolak Ukur : Meningkatkan jumlah desa yang telah dikembangkan infrastrukturnya							
Target Program: Meningkatkan pelayanan jalan di lingkungan desa/keurahan 10% dari 30% menjadi 40%							
1.03.1.03.01.35.01.	Terbangunnya jalan lingkungan dan drainase permukaan sebagai penunjang ekonomi	22 Kabupaten/ Kota	22 Kab/ Kota se Provinsi NTT	55.369.000.000	62.504.200.000	49.914.148.850	(12.590.051.150)
Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi							
1.05. PENATAAN RUANG							
1.05.1.06.01. BADAN PERENCANAAN				472.993.000	472.992.200	472.992.200	-
PERENCANAAN							
PERENCANAAN DAERAH							
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Tersusunnya Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan							
1.05.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN TATA RUANG				472.993.000	472.992.200	472.992.200	-
Tolak Ukur : Meningkatkan ketersediaan data perencanaan pembangunan dan meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah provinsi							
Target Program: 22 Kab/kota dan RTRW 5%, RDIR 20%							
1.05.1.06.01.15.01.	Tersedianya data profil perencanaan pembangunan infrastruktur sesuai arahan tata ruang; Terlaksananya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD	1 dokumen; 12 kali/tahun	Kota Kupang	103.304.400	103.304.400	103.304.400	-
1.05.1.06.01.15.02.	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penataan ruang; Pembinaan dan Revisi Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi NTT; Terlaksananya rapat koordinasi dan Pembinaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	1 dokumen; 1 dokumen; 4 kali	Kota Kupang Provinsi	202.327.100	202.326.300	202.326.300	-
1.05.1.06.01.15.03.	Terlaksananya koordinasi dan implementasi Peraturan Gubernur No 4/2014 tentang integrasi perencanaan Desa Mandiri Anggur Merah dalam Musrenbangdes	1 kali	Kota Kupang Provinsi	167.361.500	167.361.500	167.361.500	-
Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa/Keurahan							
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN				53.959.073.600	52.882.868.800	53.184.049.800	301.181.000
1.06.1.06.01. BADAN PERENCANAAN				47.750.803.600	46.674.598.800	46.838.669.800	164.071.000
PERENCANAAN							
PERENCANAAN DAERAH							
Agenda: Penbenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.210.693.300	1.205.693.000	1.205.693.000	-
1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				511.802.500	410.391.500	410.391.500	-
1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				88.190.000	88.190.000	88.190.000	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya Perencanaan yang berkualitas dengan pendekatan Partisipatif, Teknokratif, Bottom Up dan Top Down							
1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				6.523.624.000	5.688.965.500	5.853.036.500	164.071.000

me

URUSAN/SKPD/ AGENDA/ISASABAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAR/BERKUPANG (Rp.)
Tolak Ukur : Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pusat							
Target Program: 22 Kab/Kota							
1.06.1.06.01.21.01. Monev Terpadu Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tertaksananya proses monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan. Tertaksananya evaluasi RKPd : 1) Provinsi, 2) Kabupaten/kota; Tertaksananya ekspose hasil monev dan penyampaian laporan; Tertaksananya pertemuan Sinkronisasi Program/Kegiatan APBD dan APBN; Tertaksananya Sosialisasi RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	4 kali; 1) 2 kali rapat, 2) 44 kali rapat, 3) 8 dokumen laporan evaluasi akhir RKPd, 4) laporan kegiatan; 4 kali; 4 kali; 4 region, 100 orang	22 Kab/Kota; Kota Kupang, Jakarta; Kota Kupang	1.695.412.700	1.298.714.200	1.462.785.200	164.071.000
1.06.1.06.01.21.02. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk kementerian/lembaga; Tersusunnya Dokumen RKPd dan Perubahan RKPd Tahun 2016; Tersusunnya KUA-PPAS Perubahan 2015 dan KUA-PPAS 2016; Tertaksananya Forum SKPD, Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi NTT; Keikutsertaan pada Musrenbang Kabupaten/Kota se NTT, Rakor KL, Rakor Pusat, dan Musrenbangnas; Tersedianya dokumen NTT Dalam Angka, Indikator Kesra, Indikator Perekonomian, potensi desa, dan profil perencanaan pembangunan daerah, indikator ekonomi dan kinerja Perekonomian; Keikutsertaan pada kongreg PDPR se Region Jawa, Bali, Nusa Tenggara; Tertaksananya Penyusunan Rancangan Perda RPJMD Harmonisasi; Tertaksananya Penyusunan Renstra sesuai RPJMD Harmonisasi; Tertaksananya Pelatihan Aplikasi Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Pengadaan Server Aplikasi; Tertaksananya Forum Data dan Informasi Pembangunan; Tertaksananya Sosialisasi dan Advokasi SE Gub NTT; Penyusunan buku pusat data, integrasi data dan informasi pembangunan daerah prov. NTT	6 dokumen; 3 kali; 1 paket; 7 dokumen; 1 kali; 1 dokumen; 50 renstra; 1 kali, 100 orang; 1 server; 4 kali; 1 kali; 1 buku	Kota Kupang	3.682.638.800	3.304.638.800	3.304.638.800	-
1.06.1.06.01.21.03. Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertaksananya Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah: 1) 6 Tekad, 2) Pengkajian NTT Fair 3) Profil ekonomi daerah 4) Kemiskinan 5) MDGs 6), Perbatasan 7). Kajian implementasi Pergub 39/2013 8). Kajian kawasan strategis cepat tumbuh 9). Evaluasi keterkaitan antara RPJMD, RKPd-KUA- PPAS-APBD/DPA 2015;10) Kajian potensi PAD untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah	10 dokumen	Kota Kupang	202.000.000	182.000.000	182.000.000	-
1.06.1.06.01.21.04. Pengendalian Pelaksanaan Penganggaran Kemiskinan	Tersedianya dokumen penanggulangan kemiskinan NTT (TKPK); Tertaksananya Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan; Tertaksananya rapat koordinasi Program Keluaga Harapan (PKH)	1 dokumen; 2 kali, 140 orang; 2 kali	Kota Kupang	642.314.400	602.354.400	602.354.400	-
1.06.1.06.01.21.05. Pengendalian Pelaksanaan Percepatan Pencapaian Target MDGs.	Tertaksananya evaluasi akhir pencapaian target MDGs	1 dokumen	Kota Kupang	142.555.700	142.555.700	142.555.700	-
1.06.1.06.01.21.06. Pengendalian dan Penganggaran Pelaksanaan Enam Tekad Pembangunan	Tertaksananya Rapat koordinasi perencanaan 6 tekad pembangunan; Tertaksananya rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian 6 tekad pembangunan	1 Tim; 4 kali rapat	Kota Kupang	158.702.400	158.702.400	158.702.400	-

uu

URUSAN/SPRO/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.06.1.06.01.22. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KERUSAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL				862.743.800	862.743.800	862.743.800	-
Total Ukur : Meningkatnya kesadaran perencanaan pembangunan antara daerah dan lembaga donor							
Target Program: 22 Kab/Kota							
1.06.1.06.01.22.05. Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISM)	Terlaksananya Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan (PSETK) pada Daerah Irigasi (DI) Provinsi; Tersediannya di Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM DI kewenangan Provinsi	4 DI	Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat	446.812.700	446.812.700	446.812.700	-
1.06.1.06.01.22.06. Pengendalian Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional	Terlaksananya Rakor Lembaga Kemitraan dan pemutakhiran data base kerjasama bilateral, multilateral dan NGO; Terlaksananya koordinasi dan pengendalian lembaga Internasional	1 kali rakor, 100 orang; 1 kali rakor, 100 orang	Kota Kupang	261.281.100	261.281.100	261.281.100	-
1.06.1.06.01.22.07. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAS Terpadu dan AMPL	Terlaksananya Sinkronisasi, harmonisasi pengelolaan DAS dan AMPL secara terpadu lintas kabupaten yang merupakan kewenangan provinsi.	2 dokumen	Kota Kupang	154.650.000	154.650.000	154.650.000	-
Agenda: Agenda Khusus							
Sasaran Daerah: Menurunnya Angka Kemiskinan Penduduk dari 20% menjadi 15%							
1.06.1.06.01.30. PROGRAM DESA MANDIRI ANGKUR MERAH				36.553.750.000	36.418.615.000	36.418.615.000	-
Total Ukur : Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi produktif							
Target Program: 2069 desa kelurahan Angkur Merah							
1.06.1.06.01.30.04. Pendampingan Pembangunan Desa Mandiri Angkur Merah	Tersediannya alokasi dana bagi tenaga pendamping DEMAM; Terlaksananya rapat koordinasi Kepala Desa/Kelurahan & PKM; Tersediannya laporan penyelenggaraan Program DEMAM	1000 orang fasilitator/PKM	Kota Kupang dan 21 Kabupaten	33.241.124.000	33.241.124.000	33.241.124.000	-
1.06.1.06.01.30.05. Pengembangan Desa Mandiri Angkur Merah	Terlaksananya Operasional Penguatan Ekonomi masyarakat; Operasional Desa dan Kecamatan; fasilitasi proses Integrasi Desa Mandiri Angkur Merah dalam Musrenbang Desa	589 desa/kelurahan & 306 kecamatan	22 kab/kota	5.312.626.000	5.177.491.000	5.177.491.000	-
1.06.1.06.02. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH				2.636.146.000	2.636.146.000	2.688.756.000	52.110.000
Agenda: Pembrehan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintahan Provinsi NTT							
1.06.1.06.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				401.720.200	401.720.200	401.720.200	-
1.06.1.06.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				160.663.800	160.663.800	160.663.800	-
1.06.1.06.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
Agenda: Agenda Khusus							

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APSD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
Sasaran Daerah: Meningkatkan situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar negara dan antar daerah				2.070.762.000	2.070.762.000	2.122.872.000	52.110.000
1.06.1.06.02.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PEMBATANASAN							
Tolak Ukur : Meningkatkan ketahanan, kapabilitas, potensi dan infrastruktur di wilayah perbatasan; Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan melalui fasilitasi dan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah							
Target Program: Kesenjangan pembangunan sosial ekonomi dan infrastruktur di wilayah perbatasan 6 kab dan 5 pulau terluar; Fasilitasi dan penyelesaian masalah perbatasan antar fasilitasi pada 10 segmen dan penyelesaian pada 2 segmen daerah							
1.06.1.06.02.17.01. Peningkatan Manajemen Garda batas Wilayah Perbatasan	Terlathnya Masyarakat di Kawasan perbatasan	40 orang	Kupang	165.000.000	165.000.000	165.000.000	-
1.06.1.06.02.17.07. Penataan Perbatasan Daerah dan Negara	Terlaksananya kegiatan fasilitasi rapat tokoh adat dan BUC dalam upaya penyelesaian penyelesaian batas wilayah negara; Terlaksananya Fasilitasi dan Penegasan Batas Daerah; Terlaksananya pelacakan pilar batas daerah; Terinfentarisnya Dasar Hukum Batas Daerah kabupaten/kota yang sedang berselisih dan berpotensi untuk berselisih; Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Prov. NTT; Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan penegasan batas daerah; Terlaksananya peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan; Terlaksananya Rapat Fasilitasi tokoh adat di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; Adanya pemahaman akan pentingnya penegasan Batas, kerja sama sosial,ekonomi dan budaya negara tetangga serta rencana pembangunan di wilayah perbatasan; Terlaksananya Rakor Pengembangan potensi pertanian lahan kering di Kab. Belu; Kelompok Tenun yang dibina; Terlaksananya fasilitasi penerapan teknologi tepat guna di kawasan perbatasan; Kecamatan perbatasan antar negara yang di data	1 kali; 1 paket; 1 paket; 1 paket; 1; 1 kali; 1 paket; 1 dokumen; 1 dokumen; 100%; 5 kelompok; 100%; 100%	Timor Tengah Utara dan Kupang; Kabupaten Sumba Timur - Sumba Tengah, Sumba Timur - Sumba Barat, Sumba Barat - Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang - Kota Kupang, Timor Tengah Selatan - Timor Tengah Utara, manggarai Timur - Ngada, Ende-nagekeo, Ende - Sikka, Sikka - Kabupaten Flore Timur; Kabupaten Sumba Timur - Sumba Tengah,Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka dan Kabupaten Flore Timur; Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Kota Kupang, Ende, Kabupaten Manggarai Timur; Kupang; Kab. Belu, Malaka, Timor Tengah Utara dan Kupang;	948.711.600	948.711.600	1.000.821.600	52.110.000
1.06.1.06.02.17.08. Peningkatan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara	Terlaksananya dokumen database infrastruktur perekonomian, kesra dan pemerintahan di wilayah perbatasan; Terlaksananya RAKOR Infrastruktur Kawasan Perbatasan Antar Negara; Terlaksananya seminar percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan; Terfasilitasinya pelaksanaan Rakor Pengelolaan Infrastruktur fisik pemerintahan dan kesra di kawasan perbatasan antar negara; Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat evaluasi pembangunan infrastruktur pemerintahan, ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan darat; Terlaksananya Rapat Koordinasi lintas sektor di bidang ekonomi dan kemakmuran	1 dokumen; 1 kali; 100 orang; 75 orang; 120 orang; 100%	Kab. Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Kupang, Alor dan Rote Ndao	834.050.400	834.050.400	834.050.400	-
1.06.1.06.02.17.09. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terpadu	Terlaksananya pengumpulan, Uptading dan analisis data informasi capaian kinerja program dan kegiatan; Terlaksananya monitoring,penumpulan, Uptading dan anlisis data informasi bagi perencanaan pembangunan; Kecamatan Perbatasan antar Negara yang di data	1 paket; 1 paket; 100%	Kecamatan perbatasan di 6 kabupaten	123.000.000	123.000.000	123.000.000	-

~

URUSAN/SCPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APROD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.07.1.07.01.15.03. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan	Tertaksananya pelatihan teknis perhubungan untuk Aparatur; Tertaksananya penyusunan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	42 orang, 5 buku	Jakarta, Semarang, Ujung Pandang dan Kota Kupang	140.034.000	140.034.000	140.034.000	-
1.07.1.07.01.15.04. Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se- Provinsi NTT	Tertaksananya rapat koordinasi teknis perhubungan se NTT dan tertaksananya workshop/FGD evaluasi penyelenggaraan transportasi di NTT	3 Dokumen	Jakarta, Kota Kupang, Kabupaten Belu	277.168.500	277.168.500	277.168.500	-
1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN				1.829.528.050	1.829.528.050	1.829.528.050	-
Total Ukur : Menurunnya tingkat kecelakaan sarana transportasi							
Target Program: 10%							
1.07.1.07.01.17.01. Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Model Angkutan	Tertaksananya pembinaan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan laporan hasil kegiatan; Terselenggaranya pengoperasian pelabuhan penyebangan Alimere, Nangkeo dan Teluk Gurta; Tertaksananya evaluasi kinerja pelayanan sarana prasarana angkutan penyeberangan di Provinsi NTT;	1 kali kegiatan, 1 dokumen; 3 pelabuhan, 3 dokumen; 24 lintasan, 1 dokumen	22 kab/kota se Provinsi NTT; Pelabuhan Penyebangan Alimere (Kab. Ngada), Nangkeo (Kab. Ende) dan Teluk Gurta (Kab. Belu); Sarana & prasarana pada lintasan angkutan penyeberangan	368.942.450	368.942.450	368.942.450	-
1.07.1.07.01.17.02. Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa	Tertaksananya penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi di NTT; Tertaksananya penyusunan profil perhubungan dalam angka Tahun 2016 dan Updating Geodatabase Perhubungan se NTT; Tertaksananya pembinaan teknis pengelolaan terminal bagi aparaturnya di kabupaten/kota; Tertaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Lalu Lintas Angkutan Perairan (LLAP), Laut dan Udara; Tertaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan angkutan perintis jalan, penyeberangan, laut dan udara	1 dokumen; 1 kali kegiatan, 1 dokumen; 1 kali, 7 kabupaten 1 kota; 1 kali kegiatan, 4 dokumen; 1 kegiatan, 1 dokumen	22 kab/kota se Provinsi NTT; 22 kab/kota se Provinsi NTT; Terminal Angkutan Darat di Kota Kupang, Kab. TTS, Belu, Flores Timur, Sikka, Ende, Manggarai; Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Lalu Lintas Angkutan Perairan (LLAP), laut dan Udara pada 21 kabupaten/kota; Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Lalu Lintas Angkutan Perairan (LLAP), laut dan Udara pada 21 kabupaten/kota	510.541.200	510.541.200	510.541.200	-
1.07.1.07.01.17.03. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Bertalu Lintas	Tertaksananya pemilihan awak kendaraan umum teladan, Kab/Kota Tertib lalu lintas atau Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Prov. NTT dan seleksi pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi dan Nasional; Tertaksananya pemeriksaan kelaikan alat-alat keselamatan Kapal Motor Penyeberangan; Tertaksananya pengendalian keamanan dan keselamatan penyeberangan (KKOP)	Awak Kendaraan Umum Teladan 1 orang, Kota tertib lalu lintas 1 orang dan pelajar pelopor keselamatan 1 orang; 8 pelabuhan, 1 dokumen; 7 lokasi, 1 dokumen	Kota Kupang, Jakarta; 8 Pelabuhan Penyebangan Bolok, Kalabahi, Waibalin, Waikelo, Labuan Bajo, Alimere, Marapokot, Waingapu; 7 Bandara: Tambolaka, D.C. Saudale, Terdamu-Sabu, Frans Seda-Maumere, H.H. Aroboesman, Mali dan Wunopito	495.223.000	495.223.000	495.223.000	-

URUSAN/SKPD/ DAERAH/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APRO MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.07.1.07.01.17.04. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tertaksananya Monev pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan di 21 Kabupaten dan 1 kota; Tertaksananya kegiatan pemantauan barang dan distribusi sembilan bahan pokok di NTT pada pelabuhan yang diusahkan dan strategis di NTT; Tersedianya data tarif yang berlaku dengan yang ditetapkan untuk sinkronisasi dalam penyelenggaraan tarif; Tertaksananya pemantauan prosedur penyelamatan jiwa di laut/SAR	2 kali kegiatan 1 dokumen; 15 pelabuhan; 1 dokumen; 1 kali kegiatan, 1 dokumen; 2 kegiatan, 2 dokumen	21 Kabupaten dan 1 kota (pelabuhan, Bandara, dan Terminal); 15 pelabuhan laut : Tenuu (kec alak kel alak), Waingapu (kec hambala kec kota), Atapupu (ds jenuu kec kakuluk mesaki), Labuan Bajo (ds wartoka kec komodo), Lembata, Marapokot, Reo, Ba'a, Larantuka (kec Larantuka kel Larantuka, Lorens Say (ds kota uneng kec alaki), Wini, Ende/ppi, Waikelo Kalabahi; 21 Kabupaten dan 1 kota (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal serta sarana angkutan); 8 Unit Kapal Perintis pangkalan Kupang (trayek : R-18, R-19, R-20, R-21) dan Pangkalan Maumere (R-22 dan R-23, R-24, R-25) dan 10 lintasan penyebrangan	454.821.400	454.821.400	454.821.400	-
1.08. LINGKUNGAN HIDUP				5.137.488.000	5.137.488.000	5.202.488.000	65.000.000
1.08.1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				5.137.488.000	5.137.488.000	5.202.488.000	65.000.000
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.08.1.08.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN				949.632.200	952.932.200	952.932.200	-
1.08.1.08.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				411.148.000	411.148.000	411.148.000	-
1.08.1.08.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				18.800.000	18.800.000	18.800.000	-
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 3.500 Ha							
1.08.1.08.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				2.818.967.500	2.820.915.500	2.885.915.500	65.000.000
Total Ukur :							

na

JURUSAN/SKOP / AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOYAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEJURAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	ADPD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERT/AMEND/BERKURANG (Rp.)
1.08.1.08.01.16.02. Pengendalian, Pengawasan dan Pemantauan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)	Tertaksananya Penyelenggaraan dan sinkronisasi pencapaian Sasaran Daerah Rencstra BLUD Provinsi NTT Tahun 2014-2018 terhadap Rencstra BLUD di 17 Kota Kupang (Hotel 2, PT. Semen Kupang); Kab. Sikka (Tambahan 1, Hotel 1, PLTD 1); Kab. Manggarai Barat (Hotel 3); Kab. Sumba Timur (Hotel 1, PLTD 1, Pertambahan 1)	1 kali; 25 orang; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 12 perusahaan : 6 Kab : Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Maika, Manggarai Barat dan Nagekeo; Kota Kupang: 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kabupaten Kupang); 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang); 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang); 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Rote Ndao); Kota Kupang, Kabupaten TTU, (Kota Kupang, Kabupaten TTU, Belu, dan Rote Ndao); Kota Kupang, Sikka, Manggarai Barat dan Sumba Timur	6 Kab : Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Maika, Manggarai Barat dan Nagekeo; Kota Kupang: 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kabupaten Kupang); 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang); 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang); 1 Kota dan 4 Kab (Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Rote Ndao); Kota Kupang, Kabupaten TTU, (Kota Kupang, Kabupaten TTU, Belu, dan Rote Ndao); Kota Kupang, Sikka, Manggarai Barat dan Sumba Timur	557.756.300	563.004.300	563.004.300	-
1.08.1.08.01.16.03. Penyusunan Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tertaksananya Pembinaan Lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Pemeriksa UKL-UPL di 22 Kabupaten / Kota se Provinsi NTT; Tertaksananya rapat koordinasi Pembinaan Lisensi KPA dan Pemeriksa UKL-UPL tingkat provinsi; Tertaksananya pengendalian pengawasan dan pemantauan SDA pada usaha kegiatan berdokumen lingkungan yang terpantau aktifasinya di 12 kabupaten/kota; Tertaksananya: sosialisasi lewat radio, sosialisasi lewat media cetak, sosialisasi lewat televisi, sosialisasi lewat balinho, cetak brosur, booklet, dan leaflet serta buku SLHD 20 buah	1 kali; 80 orang; 24 jenis usaha/kegiatan (1 Kab/Kota 2 jenis usaha); 24 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, brosur 220 buah, booklet 220 buah, leaflet 220 buah, buku data 10 buah, buku analisis 10 buah	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Ende, Manggarai, Flores Timur, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, Alor, Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur	389.075.100	389.075.100	389.075.100	-
1.08.1.08.01.16.04. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Tertaksananya Pameran pada Pekan LH Indonesia; Tertaksananya penilaian penguanganran Kalpataru/pengelola Lingkungan Hidup; Tertaksananya pembinaan Bimtek penerapan hukum lingkungan kepada Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan di 21 Kab/Kota se NTT; Tertaksananya pendataan tentang pengaduan kasus-kasus lingkungan dan sengketa lingkungan di 21 Kab/Kota se-NTT; Tertaksananya kegiatan hari lingkungan hidup dan penguanganran kalpataru pada 12 orang pengelola lingkungan hidup; Tertaksananya edukasi di bidang lingkungn hidup melalui operasional Mobil Hijau (MOHI)	1 kali; 22 Kabupaten/Kota; 1 kali, 35 orang; 1 kali; 2 kali; 1 kali, 500 orang; 6 lokasi binaan	Jakarta; 22 Kab/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta; 21 Kab/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta; 21 Kab/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jakarta; Kota Kupang, Kab. TTU, TTU, Belu, Rote Ndao, Alor, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat; Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU	805.080.900	805.080.900	805.080.900	-
1.08.1.08.01.16.05. Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Tertedainya tenaga analis Laboratorium; Tertaksananya pengisian tabung gas peradam kebakaran dan tabung gas analisa logam; Tersedianya bahan dan obat PJK; Tertaksananya kalibrasi alat laboratorium dan honor asesor; Tertaksananya pengadaan bahan bimtek lab untuk 20 kab, inhouse training 10 kali dan extra foofing buat analis laboratorium; Tertaksananya bimtek laboratorium lingkungan kab/kota; Tertaksanya pengambilan sampel untuk peningkatan PAD dan data kualitas lingkungan; Tertaksananya konsultasi dan sinkronisasi materi bimtek manajemen laboratorium lingkungan; Tertaksananya konsultasi akreditasi ISO 17025 di BSN dan KAN; Tertaksananya rapat koordinasi dan evaluasi laboratorium nasional di Jakarta; Tertaksananya perjalanan asesor dari KAN dalam rangka akreditasi lab; Tertaksananya bimtek manajemen ISO 17025 di BSN dan bimtek petugas analis laboratorium di laboratorium Jakarta; Tertaksananya belanja alat laboratorium	7 orang; 6 paket; 1 paket; 2 paket; 3 paket; 20 kab/Kota; 22 kab/Kota; 3 orang; 2 orang; 3 orang; 2 orang; 6 orang; 1 paket	Kota Kupang	907.420.000	904.120.000	904.120.000	-

me

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK URUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BURUKBANG (Rp.)
1.08.1.08.01.22. PROGRAM PERLINDUNGAN PEMULIHAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN				938.940.300	933.692.300	933.692.300	
Tolak Ukur : 1.08.1.08.01.22.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Konservasi SDA dan LH	Terlaksananya penyediaan anakan tanaman ketutanan; Terlaksananya kegiatan Puncak GPBM tingkat Provins NTT; Terlaksananya penyediaan aneka bibit/anakan tanaman utk mendukung pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan; Terlaksananya penanaman tanaman pelindung di sekitar sumber mata air (susual substansi Rencana Aksi); Terlaksananya sosialisasi dan Motivasi kepada masyarakat dalam pengembangan mangrove di Kabupaten Kupang; Terlaksananya penanaman tanaman pelindung di daerah pesisir pantai di Kabupaten Kupang; Terlaksananya Identifikasi kesesuaian pemanfaatan Ruang RTRW, RDR Kabupaten/Kota Kupang dan RDR Kawasan Strategis di 8 (delapan) kab/kota : Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Rote Ndao Malaka; Terlaksananya sosialisasi Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di 6 Kabupaten di Provinsi NTT; Terlaksananya Identifikasi Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan RTRW, RDR Kabupaten/Kota dan RDR Kawasan Strategis Sabu Raijua, Kota Kupang, Kab.Kupang dan TTS); 1 kali (2 orang)	35.000 anakan di Kab. Malaka, Belu, Lembata, Sumba Barat Daya, dan Alor (jumlah anakan/Kab = 7000); 1 kali; Anakan 60.000 : 12 jenis (Mahoni, Cendana, trambesi, angana, glodok, jati putih, mahkota Dewa, Saligon, Nangka, Mangga, sawo, Sukun); 6 sumber mata air; 2 kali; 1 lokasi (Kabupaten Kupang/Tanah Merah 4000 mangrove); 1 kali; 1 ruang dan dampak kerusakan dan bencana lingkungan pemanfaatan (Kabupaten Kupang) Flores Timur, Sikka, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao dan Malaka); 7 (tujuh) Kabupaten (Flores Timur, Sikka, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao dan Malaka); 1 konsep kebijakan RTH yang digunakan sebagai referensi dalam pembangunan dan pengelolaan RTH di 9 kab/kota (Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Tengah, Malaka, Ende, NTT; 11 Kabupaten (Kab.TTU, Belu, TTS, Alor, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Hotim, Ende, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya)	5 Kabupaten se NTT (Kabupaten Malaka, Belu, Alor, Sumba Barat Daya, Lembata), Kab. Balu, Kota Kupang, Kab.Kupang, Kab.Sumba Tengah, Kab.Sumba Timur, Kab.Lembata, Kab.Nagekeo, Kab.Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka; Kabupaten Kupang, Kota Kupang; 8 kab/kota se NTT (Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Malaka); 11 Kabupaten (Kab.TTU, Belu, TTS, Alor, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Hotim, Ende, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya)	761.114.800	755.866.800	755.866.800	
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.301.687.000	4.301.687.000	4.301.687.000	
1.11.11.01.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT				4.301.687.000	4.301.687.000	4.301.687.000	
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah Sasaran Daerah: Terwujudnya pentaan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT				900.464.050	900.464.050	900.464.050	
1.11.11.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				125.089.750	125.089.750	125.089.750	
1.11.11.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APABATUR				12.350.000	12.350.000	12.350.000	
1.11.11.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
Agenda: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran Daerah: Meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan							

~

URUSAN/SKPD/ DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.1.1.11.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN				1.351.266.000	1.351.266.000	1.351.266.000	-
Tolak Ukur : Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan							
Target Program : Pembinaan pemberdayaan kuantitas dan kualitas hak hidup perempuan dan anak termasuk perlingkungannya dalam pembangunan							
1.1.1.11.01.15.01. Peningkatan Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tertaksananya Temu Koordinasi antar Pemerintah dengan Apjati: 1 kali temu koordinasi, 85 orang; 1 kali bimtek (30 org terdiri dari LSM Pemerintah Perempuan dan Anak, Rumah Aman/Shelter) 8 Kabupaten Flores dan 1 kali pelatihan (40 org sadaran Flores untuk pengelola TP); 1 kali sosialisasi 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No 21 Tahun 2007 tentang Teraksananya Monev di Kab/Kota se-NTT dan Terfasilitasinya pemilihan Kabupaten/Kota penerima APE. Tertaksananya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang PUG, Tersedianya data terpilih	1 kali temu koordinasi, 85 orang; 1 kali bimtek (30 org terdiri dari LSM Pemerintah Perempuan dan Anak, Rumah Aman/Shelter) 8 Kabupaten Flores dan 1 kali pelatihan (40 org sadaran Flores untuk pengelola TP); 1 kali sosialisasi dan 1 dokumen laporan hasil kegiatan untuk sedaratan 100%	22 Kab/Kota se-NTT; APE di Kab/Kota terpilih	593.381.000	593.381.000	593.381.000	-
1.1.1.11.01.15.03. Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)				332.215.000	332.215.000	332.215.000	-
Sasaran Daerah: Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif; terbentuknya Desa Layak Anak							
1.1.1.11.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				1.912.517.200	1.912.517.200	1.912.517.200	-
Tolak Ukur : Meningkatkan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pengarus utamaan gender							
Target Program: Koordinasi, money, pendataan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak serta PUG							
1.1.1.11.01.16.01. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Tertaksananya fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG; Tertaksananya Sosialisasi dan Advokasi bahan ajar responsif gender; Tersosialisasinya dan fasilitasi pembentukan P2TP2A; Tertaksananya Rakor jejaring dengan mitra dan SKPD terkait	Tertfasilitasinya pembentukan kelembagaan PUG, 30 org; 15 kali Sosialisasi dan Advokasi untuk 30 org di malaka (10 org), TTU (10 org) dan TTS (10 org); 2 kabupaten (perkabupaten 40 org); 1 kali rakor (50 orang)	Sumba tengah; TTS; Sumba Barat, Malaka; Kota Kupang	481.800.000	481.800.000	481.800.000	-
1.1.1.11.01.16.02. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	1) Tertaksananya Konferensi Anak Daerah dan Forum Anak Nasional; 2) Tertaksananya pemilihan duta anak tingkat provinsi untuk mengikuti Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Nasional; Tertaksananya fasilitasi pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA); Tertaksananya fasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah	1). anak-anak SLTP dan SLTA se-NTT, 2). 66 duta nak; 35 Org (pemerintah daerah, toma dan toga)untuk 1 kali fasilitasi untuk 2 kabupaten; 50 org (SD,SLTP dan SLTA)	Kabupaten Kupang dan Sikka; Sumba Barat	423.059.200	423.059.200	423.059.200	-
1.1.1.11.01.16.03. Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak	Tertaksananya sosialisasi pengembangan Kabupaten/Kota layak anak/desa layak anak; terfasilitasinya pembentukan lokasi percontohan desa/keurahan layak anak di keurahan Nunhla dan desa ladogahar (kab Sikka)	35 org/kab (toma, toga, tokoh pemuda ,pemerhati Malaka, Sumba Tengah, Sumba Barat, perempuan, pendidik dan anak sekolah); pilot project Kota Kupang dan sikka		286.474.000	286.474.000	286.474.000	-
1.1.1.11.01.16.04. Penguatan Kapasitas dan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan	Tertaksananya Bimtek Manajemen usaha dan peningkatan hasil produksi; Tertaksananya Pemilihan Puteri NTT; Tersosialisasi hak-hak politik perempuan potensial	3 kabupaten (30org/10 kelompok/kabupaten) 90 org; 1 Puteri NTT terpilih perwakilan NTT di ajang nasional; 6 kabupaten (40 org/kab) untuk perempuan potensial	TTT, Flotim dan Rote Ndao; Kota Kupang, Kupang, Manggarai, Alor dan Ngada	721.184.000	721.184.000	721.184.000	-
1.1.3. SOSIAL				29.793.061.000	29.488.038.900	30.601.038.900	1.113.000.000
1.1.3.1.13.01. DINAS SOSIAL				29.793.061.000	29.488.038.900	30.601.038.900	
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.1.3.1.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.012.936.700	2.055.089.100	2.055.089.100	-

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUJERI (Rp.)	APBD MUJERI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
1.13.113.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3.459.416.550	3.614.916.550	3.614.916.550	-
1.13.113.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				17.100.000	17.100.000	17.100.000	-
Agenda: Agenda Khusus							
Sasaran Daerah: Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin							
1.13.113.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG MASALAH KESIAHTERAPAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA				5.124.055.150	5.124.055.150	5.204.055.150	80.000.000
Tolak Ukur : Meningkatkan Pelayaran Sosial untuk masyarakat miskin, terpendil dan penyandang masalah keera							
Target Program: 140 KUBE							
1.13.113.01.15. 01. Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Diklat Peningkatan Kapasitas pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pendamping KUBE 150 orang dari 22 kab/kota	Kota Kupang			-	-
1.13.113.01.15. 02. Peningkatan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Tertindakannya pelatihan keterampilan berusaha dan pembeberian bantuan modal usaha bg keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi; Terselenggaranya bantuan sembako bagi keluarga Rentan Miskin, pada hari keluarga nasional (HARGANAS)	1100 orang tk/ 220 kube dari 22 kab/kota; 50 Keluarga Rentan/Miskin dan UK3	22 kab/kota; Sumba Timur	2.903.026.400	2.903.026.400	2.903.026.400	-
1.13.113.01.15. 03. Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	Tertindakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat ProvinsiProgram Keluarga Harapan, Tersediannya insentif untuk operator sekretariat UPPKH; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	4 rayon, 608 pendamping dan 61 operator; 6 orang operator UPPKH dan 24 pendamping	Sumba Barat Daya, Manggarai Barat , Sikka, TTU; Provinsi; 13 kab/kota	1.044.731.250	1.044.731.250	1.099.731.250	55.000.000
1.13.113.01.15. 04. Pembiayaan Anak Jalanan dan Anak Terlantar	Tertfasilitasinya pelatihan pembuatan pot bunga dari kertas koran,, baju kaos untuk sablon padat bagi anak terlantar dan anak jalanan yang putus sekolah atau tidak sekolah	2 jenis pelatihan (40 orang Anak Terlantar dan Anak Jalanan) selama 3 bin	Kota Kupang			-	-
1.13.113.01.15. 05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tertaksananya Kegiatan Money terpadu Dinas Sosial; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	22 kab/kota, 8 org/kab (tim akedemisi dan Dinso)	22 kab/kota	750.000.000	750.000.000	775.000.000	25.000.000
1.13.113.01.15. 06. Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terdeteksi Lokasi Pemberdayaan KAT berdasarkan Instrumen yang telah diisi oleh Tim sesuai Kriteria yg telah ditentukan; Tertaksananya pengembangan KAT model di Prov. NTT	Warga KAT/80 KK; 3 lokasi pengembangan KAT Model	Desa Watujiwa Kec Lembor Selatan Kab. Manggarai Barat; Desa Tanah Werang/Hidim, Tanambanas/Sumba Tengah dan Desa Tamkesi/TTU	426.297.500	426.297.500	426.297.500	
1.13.113.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				15.477.891.000	15.235.665.000	15.235.665.000	

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.13.1.13.01.16.09. Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Pant Asuh/Pant Jompo dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terselenggaranya pelayanan bagi Klien Pant Lingkup Dinas Sosial; Terselenggaranya pelayanan 569 orang klien di 7 Pant Lingkup Dinas Sosial; Terlaksananya bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan bagi ODA/OHIDA; Terlaksananya pelayanan untuk Anak Terlantar; Terfasilitasinya penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi	569 orang Klien di 7 Pant; 569 orang Klien di 7 Pant; 75 ODA / OHIDA; 60 anak terlantar; Pemberian Sembako bagi 50 Orang lanjut Usia; Hadiah Pemenang Lomba	Lokasi : 7 pant lingkup Dinas Sosial; Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sikka, Sumba Barat, Kab. Ngada; Flotim; Malaka; Kab. Ngada; Sumba Barat Daya; Rote Ndao; Kota Kupang	14.071.359.000	13.769.567.000	13.769.567.000	-
1.13.1.13.01.16.10. Peningkatan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi eks kusta; Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Disabilitas.	60 orang Eks Kusta (15 org/ Kab) 5 hr; 100 orang Disabilitas(50 orgkabupaten) 5 hari	1). Kab. Flotim; lembata; Ende; Sikka. 2). Rabu Raijua dan Rote Ndao	716.837.000	776.403.000	776.403.000	-
1.13.1.13.01.16.11. Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan	Terfasilitasinya operasional RPTC , Bimtek eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM), dan penulangan pekerja migran yg bermasalah	RPTC 20 org; Bimtek 60 org KTK/PM , pekerja migran bermasalah/KTK 1 paket	Kota Kupang; Kab. Kupang; TTS; TTU; Belu, Malaka, Daratan Sumba	689.695.000	689.695.000	689.695.000	-
1.13.1.13.01.18: PROGRAM PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL LAINNYA				1.005.850.500	745.402.000	745.402.000	-
Tolak Ukur : Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial dan penanganan deportan dan orang terlantar							
Target Program: 220 orang							
1.13.1.13.01.18.01. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pelatihan bagi eks NAPI	100 orang Eks NAPI (25/Kab) Shari pelatihan	Kab. Flotim, Alor, Malaka, Ngada	490.851.500	490.851.500	490.851.500	-
1.13.1.13.01.18.02. Penanganan Deportan dan orang Terlantar	Terlaksananya pemulangan Deportan dan Orang Terlantar ke Daerah Asal	100%	Kota Kupang	514.999.000	254.550.500	254.550.500	-
1.13.1.13.01.20: PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				2.695.811.100	2.695.811.100	3.728.811.100	1.033.000.000
Tolak Ukur : Peningkatan kualitas SDM kemasyarakatan bidang Kesos							
Target Program: 90%							
1.13.1.13.01.20.01. Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gugus Pulau; Terlaksananya Diklat Penyuluh Sosial Masyarakat; Terselenggaranya Diklat Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial; Terlaksananya Pelatihan Konseling; Terselurkannya bantuan bagi PSKS, UEP dan Orsos; Tersedianya cadangan beras	600 orang Masyarakat desa terpencil di 4 (empat) Kabupaten; 44 orang Penyuluh Sosial; 105 orang petugas panti 22kab/kota; 40 orang Pekerja Sosial Pant; Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PSKS (Karang Taruna; Pekerja Sosial Masyarakat; Orsos; Kelompok Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	Kab. Kupang, Nagekeo, Sumba Timur, Flores Timur, Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang; 22 kab/kota	1.422.481.600	1.422.481.600	2.422.481.600	1.000.000.000
1.13.1.13.01.20.02. Pelastarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiaawanan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan dengan instansi terkait; Terselenggaranya peringatan hari kesetiakawanan Sosial Nasional tanggal 20 Desember 2016	legiun veteran, Kelurga pahlawan,, Mahasiswa/Pelajar, Masyarakat, instansi terkait; 1000 org peserta undangan HKSN	Kota Kupang; Kota Kupang	217.878.500	217.878.500	217.878.500	-
1.13.1.13.01.20.03. Peningkatan Kapasitas dan Peran serta Taruna Slaga Bencana (TAGANA)	Terlaksananya pemberian insentif bagi 70 orang Tagana; Terlaksananya pembentukan kampung slaga bencana di 2 desa; Terlaksananya kegiatan Jambore Tagana di Kab. Alor	70 orang TAGANA; 4 Desa Kampung Slaga Bencana (150 org peserta); 425 orang peserta jambore TAGANA	Provinsi; Kab. Kupang; TTU; Alor	1.055.451.000	1.055.451.000	1.088.451.000	33.000.000
1.14. KETIDAKAKERIAAN				6.273.357.500	8.209.737.500	8.266.737.500	57.000.000

~

URUSAN/SDP/ AGENDA/ISARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/(BERURANG) (Rp.)
1.14.1.14.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				6.273.357.500	8.209.737.500	8.266.737.500	57.000.000
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintahan Provinsi NTT							
1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.184.510.000	1.172.510.000	1.229.510.000	57.000.000
1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APABATUR				274.150.000	473.358.000	473.358.000	-
1.14.1.14.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				110.500.000	122.500.000	122.500.000	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja							
1.14.1.14.01.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KETENAGAKERJAAN				3.331.510.500	5.267.890.500	5.267.890.500	-
Tolak Ukur : Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan kerja; Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan							
Target Program: Persentase jumlah tenaga pencari kerja yang dilatih 2,53%; Jumlah penempatan pencari kerja 22,97%							
1.14.1.14.01.16.03. Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Produktivitas				501.164.500	501.164.500	501.164.500	-
1.14.1.14.01.16.04. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja				1.449.412.000	3.394.192.000	3.394.192.000	-
Tertaskannya Bimtek bagi Pengelola Latihan Kerja; Tertaskannya Pelatihan Keterampilan Kerja Kerjasama Pihak ketiga; Tertaskannya Bimtek Instruktur Latihan Kerja; Tertaskannya proses Identifikasi kebutuhan Latihan; Tertaskannya Pelatihan Bagi Pencari Kerja oleh UPTD, PTK				20 orang di 10 lembaga pelatihan kerja swasta; 5 paket 100 orang dan bantuan peralatan pelatihan Yayasan Cannyosian kab. Malaka 4 komputer; 1 kali, 20 orang; 15 KAB/KOTA; 1. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencakerdi BLK Kupang TTU, Belu, Rote Ndao, Alor, Lembata, sebanyak 13 Pkt (208 orang); 2. Bantuan Paska pelatihan Berupa Peralatan menjahit (Mesin Jahit) 64 buah, Peralatan Meubelair 48 paket, Peralatan Las 16 Buah, Peralatan Otomotif 48 Paket			
Rehab Gedung penataksana Rumah Tangga 1 unit , Peralatan bengkel menjahit 1 paket, peralatan bengkel otomotif 1 paket, peralatan bengkel bangunan 1 paket, peralatan bengkel las 1 paket dan pengadaan kursi belajar 53 buah; Pemeliharaan Instalasi Listrik, Instalasi Air dan Perlengkapan Asrama di UPT PPT, 1 paket				Kota Kupang; Kupang, Ende, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Malaka; Kota Kupang; Kota Kupang, Kabupaten TTS, Fiotim, Sikka, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya; Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Sumba Barat, TTU, Manggarai, Alor, Sikka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Nagekeo dan sabu Raijua;			
1.14.1.14.01.16.05. Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK				500.325.000	491.925.000	491.925.000	-
Tertaskannya Rehab Gedung penataksana Rumah Tangga dan Peralatan bengkel di UPT PTK; Tertaskannya Pemeliharaan Instalasi Listrik, Instalasi Air dan Perlengkapan Asrama di UPT PPT				UPT PTK di Kupang; UPT PPT di Kupang			

was

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK URUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.14.1.14.01.16.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertaksananya Monitoring , Evaluasi dan pengendalian program/kegiatan Pelatihan kerja; Tertaksananya monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Penempatan transmigran asal NTT	22 Kab/Kota; 3 Provinsi di Luar NTT	Dalam NTT: Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flohm, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Malaka; Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat	388.116.000	388.116.000	388.116.000	-
1.14.1.14.01.16.07. Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Tertaksananya Penyusunan Informasi Pasar kerja bulanan; Tertaksananya Penyusunan Booklet Informasi ketenagakerjaan bulanan; Tertaksananya Pengumpulan dan pengolahan data Profil Ketenagakerjaan; Tertaksananya Penyusunan Up Dating Perencanaan Tenaga Kerja; Tertaksananya Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Dinas Nakertrans se NTT	360 buku Informasi Pasar kerja selama 12 bulan; 540 Booklet Informasi ketenagakerjaan selama 12 bulan; 50 buku data Profil Ketenagakerjaan; 50 buku Perencanaan Tenaga Kerja; 1 kali Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Dinas Nakertrans se NTT (44 org)	22 Kabupaten/Kota se NTT; 22 Kabupaten/Kota se NTT; 22 Kabupaten/Kota se NTT; 22 Kabupaten/Kota se NTT	492.493.000	492.493.000	492.493.000	-
Sasaran Daerah: Meningkatkan perlindungan tenaga kerja							
1.14.1.14.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				1.372.687.000	1.173.479.000	1.173.479.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya perlindungan tenaga kerja							
TARGET PROGRAM: Perlindungan Tenaga Kerja							
1.14.1.14.01.17.01. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalar Tenaga Kerja	Tertaksananya Pemeriksaan di kantor cabang PPTKIS; Penyidikan tindak pidana trafficking; Pengawasan di embarkasi kota Kupang (Bandara Eteri dan pelabuhan Tenau); Tertaksananya Penanganan CTKI / TKI / AKAD / AKAN Non Prosedur dan Bermasalah; Tertaksananya Sosialisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TK bermasalah; Tertaksananya Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI	1. 50 kantor cabang PPTKIS yang diperiksa 2. 2 kasus trafficking yang dididik 3. 500 kali Pengawasan di bandara dan pelabuhan tenau; Penanganan CTKI / TKI / AKAD / AKAN Non Prosedur dan Bermasalah; 1 paket; Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TK bermasalah di 7 Kabupaten dapat melaksanakan tugas secara maksimal; Menurunnya jumlah TKI ilegal dan human trafficking	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sikka, Ende, Sumba Barat Daya; Didalam dan Diluar Provinsi NTT (Menyesuaikan Kasus CTKI / CTAKAD bermasalah); Kabupaten TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat; Kabupaten Belu, Malaka, TTU dan TTS	853.681.000	654.473.000	654.473.000	-
1.14.1.14.01.17.02. Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tertaksananya Sosialisasi Norma ketenagakerjaan; Tertaksananya Penyidikan Tindak Pidana Bidang UMP, Jamsostek, dan K3; Tertaksananya Pemeriksaan Norma Kerja dan Keperawatan Jamsostek; Tertaksananya Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan kerja; Pengujian Peralatan Obyek K3	50 orang pekerja sektor formal; 2 kasus Penyidikan Tindak Pidana Bidang UMP, Jamsostek, K3; 122 perusahaan; 60 Perusahaan; 35 Perusahaan	Kota Kupang; Kota Kupang; Kabupaten Sikka, TTU, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat, Malaka, Rote Ndao, Ende, Nagekeo, Flohm, Sikka, Lembata, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba barat, Sumba Barat Daya, Kupang dan Kota Kupang; Kabupaten TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Ende, Nagekeo, Flohm, Sikka, Lembata, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Kupang dan Kota Kupang; Kota Kupang	266.866.000	266.866.000	266.866.000	-

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.14.1.14.01.17.04. Peningkatan Kinerja Tripartit dalam Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja	Tertaskannya Penyelesaian Kasus PHU/PHK; Terselenggaranya Sidang Dewan Pengupahan Dalam Rangka penetapan UMP 2017 dan Survei Kebutuhan Hidup Layak; Tertaskannya Sidang LKS Tripartit	Penyelesaian 8 Kasus PHU/PHK; 5 kali Sidang Dewan Pengupahan Dalam Rangka penetapan UMP 2017 dan Survei Kebutuhan Hidup Layak; 1 kegiatan; 5 kali Sidang LKS Tripartit	Kabupaten TTU, Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya; Kabupaten Kupang, TTU, Rote Ndao, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, Manggarai Barat, Alor, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Malaka; Kota Kupang	252.140.000	252.140.000	252.140.000	-
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				6.290.927.000	9.287.927.000	9.348.927.000	61.000.000
1.15.1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH				6.290.927.000	9.287.927.000	9.348.927.000	61.000.000
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				469.477.500	487.319.100	523.319.100	36.000.000
1.15.1.15.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				253.868.000	253.868.000	253.868.000	-
1.15.1.15.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				53.000.000	53.000.000	53.000.000	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi dan UMKM							
1.15.1.15.01.18. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI				4.147.250.300	4.121.632.700	4.146.632.700	25.000.000
Tolak Ukur : Proporsi jumlah koperasi yang aktif							
Target Program: Pembinaan 400 Koperasi DKM, 150 RAT Koperasi, Diklat 800 orang pengurus Koperasi							
1.15.1.15.01.18.01. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Tertaskannya pembinaan RAT Koperasi Primer Provinsi; Tertaskannya bantuan Badan Hukum Koperasi; Tertaskannya tenaga pendampingan teknis Koperasi; Tertaskannya sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM/usaha kecil antar pusat dan daerah; Tertaskannya HARKOP Tingkat Provinsi; Tertaskannya pembinaan UMKM untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan; Tertaskannya pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/KUSK dan lembaga keuangan Mikro	150 koperasi; 400 koperasi; 22 Pendamping koperasi; 1 dokumen; 1000 orang; 50 UMKM; 1 Dokumen	Provinsi 22 Kab./kota dan Jakarta	1.347.380.000	1.324.072.400	1.324.072.400	-
1.15.1.15.01.18.02. Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Tertaskannya sosialisasi program retail koperasi; Survey pengembangan usaha Retail koperasi; Tertaskannya kerjasama kemitraan usaha koperasi dengan investor; Tertaskannya temu kemitraan antar Koperasi Produsen	14 koperasi; 14 koperasi; 6 koperasi; 22 koperasi	Provinsi, Kab. Lembata, Flotim, Ende, dan Kab. Nagekeo				-

nan

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.15.1.15.01.18.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Provinsi/Kabupaten/Kota penggerak koperasi untuk movev: (1). Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM/usaha kecil; (2). Pembinaan KSP dan Lembaga Keuangan Mikro; (3). Pasca Diklat dan identifikasi kebutuhan Diklat Koperasi dan UMKM/usaha kecil; (4). Pemanfaatan Bansos Kementerian dan APBD; (5). Rekonsiliasi Dana Bergulir APBD dan Dana Hibah APBD; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	6 Dokumen laporan	22 Kab./Kota dan Provinsi	504.388.000	504.388.000	529.388.000	25.000.000
1.15.1.15.01.18.04. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksana Diklat sertifikasi bagi Manajer KSP; Terlaksana Diklat manajemen koperasi bagi kelompok Program Desa Mandiri Anggur Merah Rayon Flores, Sumba, dan Rayon Kupang; Terlaksana Diklat simulasi pembinaan dan pelaksanaan RAT bagi aparaturnya pembinaan teknis kabupaten/kota; Terlaksana Diklat pengelolaan akuntansi bagi pengurus koperasi Program Desa Mandiri Anggur Merah Rayon Flores, Sumba, dan Rayon Kupang; Terlaksana Bimtek Pengawasan KSP bagi aparaturnya pembinaan teknis kabupaten/kota; Terlaksana penyusunan kurikulum/silabus pelatihan koperasi dan UMKM	22 orang; 400 orang; 44 orang; 400 orang; 22 orang; 1 dokumen	Provinsi, 22 Kab./Kota dan Jakarta	2.295.482.300	2.293.172.300	2.293.172.300	-
1.15.1.15.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL/MENENGAH				1.367.331.200	4.372.107.200	4.372.107.200	-
Tolak Ukur : Meningkatnya jumlah, kompetensi dan daya saing UMKM							
Target Program: Temu mitra UMKM, bantuan sarana pemasaran, promosi produksi UMKM							
1.15.1.15.01.19.01. Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksana temu kemitraan UMKM/usaha kecil dengan swasta dan BUMN; Terlaksana sosialisasi gerakan kewirausahaan melalui cetak dan elektronik	50 UMKM/usaha kecil; 1 media cetak dan 1 media elektronik	Provinsi dan Kota Kupang	-	-	-	-
1.15.1.15.01.19.02. Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi	Terlaksana sarana pemasaran bagi PKL; Terlaksananya penataan PKL bekerjasama dengan Koperasi Primer; Terlaksana pameran produk UMKM/usaha kecil pada HARKOP Tingkat Provinsi; Terlaksana pameran Surabaya Expo; Terlaksana promosi produk UMKM/usaha kecil pada Cooperatife Fair Bandung	20 PKL; 50 PKL/1 Koperasi; 65 UMK/usaha kecil; 3 UMK/usaha kecil; 5 UMK/usaha kecil	Provinsi, Kab. TTS, Bandung, Surabaya dan Jakarta	1.188.961.200	1.188.961.200	1.188.961.200	-
1.15.1.15.01.19.03. Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksana TOT Kewirausahaan berbasis SYB ILO; Terlaksana Diklat Kewirausahaan bagi calon Wirausaha baru (Tamatan SMK)	40 orang; 40 orang	22 kab/kota, Provinsi dan Jakarta	178.370.000	3.183.146.000	3.183.146.000	-
1.15.1.15.01.19.06. Pembinaan Penggunaan Dana Pemerintah Rasi Usaha 1.16. PENANAMAN MODAL	Terlaksana pembinaan dan sosialisasi bagi calon penerima bansos perkakuan modal dan KPRI se Prov. NTT; Terlaksana verifikasi kelayakan calon penerima Bansos perkakuan modal.basel.KUMKM	50 KUMKM dan KPRI se Prov. NTT; 50 KUMKM	Provinsi	-	-	-	-
1.16.1.16.01. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH				18.855.759.000	18.845.759.000	18.864.946.000	19.187.000
				18.855.759.000	18.845.759.000	18.864.946.000	19.187.000
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
1.16.1.16.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT			433.749.100	498.369.900	498.369.900	-
1.16.1.16.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				146.827.000	146.827.000	166.827.000	20.000.000

ngn

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUJUN (Rp.)	ABD MUJUN (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKEMBANG/BERKURANG (Rp.)
1.16.1.16.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINEBUA DAN KEUANGAN				35.500.000	35.500.000	35.500.000	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan jumlah dan volume kegiatan investasi							
1.16.1.16.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERASAMA INVESTASI				17.039.731.400	17.063.018.600	17.062.205.600	(813.000)
Tolak Ukur : Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah							
Target Program: Pemantuan aktivitas penanaman modal dan penyelenggaraan investasi di 22 kab/kota							
1.16.1.16.01.15.01. Peningkatan Kemitraan Investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Tertindakannya Temu Kemitraan antar Pengusaha Daerah; Tertindakannya coffe morning pengusaha daerah; Tertindakannya kerjasama antar instansi penanaman modal Provinsi, Kabupaten dan Kota;	1 kali, 50 orang; 4 kali, 40 orang; 1 kali, 50 orang	Kupang; Kupang; Kab. Sikka	129.406.200	128.806.200	128.806.200	-
1.16.1.16.01.15.02. Promodi Potensi Investasi Daerah	Tertindakannya pembangunan auditorium NTT Fajir; Keikutsertaan pada pameran infrastruktur yang mendukung potensi investasi; Keikutsertaan pada kegiatan Gelar Potensi Investasi Daerah/ GPID dan Seminar Nasional Indonesia/SNI; Keikutsertaan pada pameran Surabaya Expo; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	1 gedung; 1 kali, 6 orang; 1 kali, Jakarta, 5 orang; Surabaya 1 kali, 6 orang	Kupang; Jakarta; Jakarta; Surabaya	16.689.468.500	16.710.185.700	16.735.185.700	25.000.000
1.16.1.16.01.15.03. Pengawasan Investasi daerah	Tertindakannya pemantuan dan pengawasan PMA/PMODN; Tertindakannya Rapat Koordinasi Penanaman Modal; Tertindakannya monev dan pelaporan terpadu IPMK; Tersusunnya Buku Directory PMA dan PMDN	22 Kab./Kota, 150 PMA/PMON; 1 kali, 60 orang; 2 kali, 22 Kab./Kota; Kab. Sumba Timur; Jakarta kab/kota; 50 buku	Kab. Sumba Timur; Jakarta	220.856.700	224.026.700	198.213.700	(25.813.000)
Sasaran Daerah: Terwujudnya keajaiban ekonomi NTT yang kompetitif							
1.16.1.16.01.17. PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAERAH				1.199.951.500	1.102.043.500	1.102.043.500	-
Tolak Ukur : Ketersediaan data potensi investasi daerah							
Target Program: Koordinasi Investasi 22 Kab/Kota							
1.16.1.16.01.17.01. Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah	Tersedianya data potensi dan informasi investasi daerah; Tersedianya data dan informasi pemetaan potensi dan peluang investasi; Tersedianya kajian komoditas unggulan rumpu laut; Tertindakannya penerbitan tabloid media investasi	1 kali, 22 Kab./Kota; 1 kali, 6 kab; 1 kali, 2 kab; 500 expl	22 Kab/Kota: Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao dan Sabu Raijua; Kab. Sabu dan Kab. Kupang	529.124.500	470.238.500	470.238.500	-
1.16.1.16.01.17.02. Peningkatan Kapasitas Pelaku Investasi dan UMKM	Tertindakannya sosialisasi rencana umum penanaman modal provinsi; Tertindakannya konsolidasi data pengembangan penanaman modal; Tertindakannya pelatihan SIPD; Tersusunnya kajian teknis potensi unggulan daerah	3 region (Sumba Timur, Ende dan Kupang); 1 kali, 10 instansi terkait; 1 kali, 22 Kab./Kota, 60 orang; 50 buku	Kupang; Ende dan Sumba Timur; Kupang; Kupang; Kupang	326.252.100	326.852.100	326.852.100	-
1.16.1.16.01.17.03. Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi antar Daerah dan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pertanian	Tertindakannya Rapat Koordinasi/Konsinyering Kegiatan Pengendalian PM antara Pusat, Prov dan Kab/Kota; Keikutsertaan pada pelatihan SPIPSE dan PTSP; Tertindakannya Workshop UKPM; Tertindakannya kerjasama antara Pemprov, NTT, Pemprov. Jatim, Pemprov. Jateng dan Sunda Kecil; Tersusunnya cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	1 kali, 150 orang; 1 kali, 4 orang; 1 kali, 150 orang aparatur dan investor, 3 region; Pemprov. NTT, Pemprov. Jatim, Pemprov. Jateng dan Sunda Kecil; 1 dokumen	Kupang; Jakarta; Kab. Ende, Sumba Tengah dan Kab. TTS	344.574.900	304.952.900	304.952.900	-
1.17. KERJASAMA 1.17.1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				5.895.390.500	7.365.979.300	7.477.658.300	111.679.000
Agenda: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan							
Sasaran Daerah: Meningkatnya Pendidikan, Pengkajian, Pelastarian, Pembiayaan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pendokumentasian dan Penyebarluasan Kebudayaan							

awr

URUSAN/SPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APSD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BIAYA/BIAYA/BERBURANG (Rp.)
1.17.1.01.01.01. PROGRAM PENGLOLOAN KEKAYAAN BUDAYA				1.000.793.200	1.887.715.200	1.887.715.200	-
Tolak Ukur : Meningkatnya pengelolaan obyek budaya lokal							
Target Program: Objek dan aset budaya di kab/kota							
1.17.1.01.01.01.02. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Terpubikasi cerita rakyat melalui Radio; Terlaksananya Penyusunan bahan ajar dan materi muatan lokal sejarah dari hasil kajian Arkeologi; Terlaksananya Dialog kebudayaan silaturahmi raja - raja Albar, di Kupang; Terdokumentasi Visual/Tarian Asli Daerah : 5 Tarian dari kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Ngada; Terdokumentasi Visual Upacara Adat Asli Daerah, 2 upacara dari TTU dan Flores Timur; Terlaksananya partisipasi daerah dalam even Temu karya Taman Budaya Tk. Nasional di Ambon; Terlaksananya Penutaran film dukumeter untuk anak sekolah, 2 film di Kupang; Terlaksananya Pameran seni rupa dan fotografi, di Kupang; Terlaksananya Pameran seni rupa Tk. Nasional; Terlaksananya Lomba Mengarang; Terlaksananya Lomba Baca Puisi; Terlaksananya Pekan Sejarah dan Budaya	Siswa/Mahasiswa di 22 kab/kota, Sitaran 2x sebulan; 4 penit hasil kajian; 200 orang Raja-Raja, Toga, budayawan, sastrawan dan seniman, Toma, pemerintah dari 22 kab/kota; 5 Tarian dari 5 Kabupaten; 2 Upacara Adat dari 2 sekolah; 30 seniman lukis dan fotografi; 15 org Perupa NTT; 100 siswa SD/SMP; 100 siswa PAUD/TV/SD; 500 orang siswa,mahasiswa, guru, dosen, budayawan di Kupang	Kupang	1.000.793.200	1.887.715.200	1.887.715.200	-
1.17.1.01.01.01. PROGRAM PENGLOLOAN KEKAYAAN BUDAYA				4.894.597.300	5.478.264.100	5.589.943.100	111.679.000
Tolak Ukur : Meningkatnya pengelolaan obyek budaya lokal							
Target Program: Objek dan aset budaya di kab/kota							
1.17.1.01.01.15.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	1) Terlaksananya pemberian insentif bagi juru pelihara cagar Budaya dan Benda Bersejarah se provinsi NTT, 2) Terlaksananya bintek Pengelolaan dan pemeliharaan Cagar Budaya dan benda bersejarah, 1) Terlaksananya pembinaan/supervisi bagi juru pelihara cagar budaya dan benda bersejarah; Terlaksananya Pelatihan Teknis Seniman Daerah; 1) 5 org (2 org sastrawan dan 3 org pengelola sastra pada Terlaksananya publikasi/pameran karya sastra dan Bahasa NTT pada forum MPU Sastra Nasional; Terlaksananya dukungan paket alat musik tradisional bagi sekolah-sekolah; Terlaksananya sosialisasi Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Terlaksananya partisipasi daerah dalam even Pawai Budaya Nusantara di Jakarta; 1) Terlaksananya pengkajian Arsitektur Tradisional Rumah Adat; 2) Jumlah tim yang melakukan kajian; Terlaksananya Pemugaran/Rentilisasi Rumah Adat dan Terlaksananya pemugaran kampung Adat; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	1) 73 juru pelihara cagar budaya, 2) 35 orang peserta bintek wilayah Flores dan Lembata, 3) Pembinaan Pemeliharaan cagar budaya di 22 kab/kota; 75 org (25 orang seniman lukis, 25 orang seniman teater dan 25 orang seniman tari); 1) 5 org (2 org sastrawan dan 3 org pengelola sastra pada UPT. Bahasa), 2) 2 karya; 10 paket alat musik tradisional; 100 org pemerintahan/masyarakat umum di TTS dan 200 siswa SMA/SMK dikota Kupang; 20 pelajar, 20 mhs dan 10 seniman; - 3 kajian arsitektur rumah adat, - 3 tim (1 tim 6 orang); - 1 Rumah Adat Kab. Ngada, Kab. TTS dan Sumba Timur	22 kab/kota, Ende; Kupang; Bali; 10 kab/kota; TTS; Kupang, Jakarta; Lembata, Nagekeo; Ngada, TTS, Floim	2.173.175.100	2.015.104.900	2.126.783.900	111.679.000

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SAKSIAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KETUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURUPANG (Rp.)
1.17.1.01.01.15.02. Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	1) Terlaksananya Pengkajian Tradisi Megalitik yang berkaitan dengan penemuan tempat-tempat bersejarah, 2) Jumlah tim yang melakukan kajian; 1) Terlaksananya Ekskavasi Gua Sejarah Kehidupan Purbakala kerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional, 2) Jumlah tim yang melakukan kajian; 1) Terlaksananya Pengkajian Sistem Pemerintahan Tradisional, 2) Jumlah Tim yang melakukan kajian; Terlaksananya Pengkajian Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat di Flotim, Mabar, Sabu Raiju, TTS upacara siklus kehidupan tradisional, 2) 3 tim (1 tim 5 org); Selekst peecerta di 22 Kab/Kota; 22 jenis permalian rakyat tradisional; 4 jenis cerita rakyat tradisional; 4 sejarah pejuang Lokal; 15 sekolah (5 sekolah rayon Timor, 5 sekolah rayon Flores dan 5 sekolah Rayon Sumbaji); 420 org siswa dan seniman; 22 org siswa dan seniman; 22 org siswa dan bahasa Rendu); 2 bahasa daerah; 1 sastra daerah TTS; 44 guru SMP dan 44 guru SMA/SMK;	1) 4 lokasi penemuan megalitik, 2) 4 tim (1 tim 6 orang); 1) 2 lokasi gua, 2) 2 Tim (1 Tim 6 orang); 1) 4 lokasi yang memiliki sejarah dan catatan sistem pemerintahan tradisional, 2) 4 tim (1 tim 5 org); 1) 5 lokasi yang memiliki sejarah dan catatan sistem kepercayaan tradisional, 2) 5 tim (1 tim 5 org); 1) 3 lokasi yang memiliki sejarah dan catatan tradisional, 2) 3 tim (1 tim 5 org); Selekst peecerta di 22 Kab/Kota; 22 jenis permalian rakyat tradisional; 4 jenis cerita rakyat tradisional; 4 sejarah pejuang Lokal; 15 sekolah (5 sekolah rayon Timor, 5 sekolah rayon Flores dan 5 sekolah Rayon Sumbaji); 420 org siswa dan seniman; 22 org siswa dan seniman; 22 org siswa dan bahasa Rendu); 2 bahasa daerah; 1 sastra daerah TTS; 44 guru SMP dan 44 guru SMA/SMK;	Kab. Lembata, Kab. Alor, Flotim; Flotim dan Sabu Raiju, Ende dan Sikka; Flotim dan Sabu Raiju, Ende dan Sikka; Daratan Sumba: Sumba Tengah, Sumba Barat dan SBD, Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur; Sabu Raiju dan Manggarai Timur	1.717.311.600	2.493.941.600	2.493.941.600	-
1.17.1.01.01.15.04. Peningkatan Kapasitas Museum NTT	Terlaksananya Pameran Museum Temporer di Kupang, 200 orang di Kupang; Terlaksananya Pameran Museum Keliling, 200 orang di Sumba Timur; Terlaksananya partisipasi daerah dalam even Pameran Museum Regional (kain Tenun Tradisional); Terlaksananya partisipasi Pameran Museum Nasional (Aat Musik Tradisional); Terlaksananya partisipasi Pameran Museum Bersama Permusuman dan Kepurbakalaan (MPU); Terlaksananya partisipasi Pameran Bersama HUT Museum Nasional dan Internasional	200 orang pelajar, mahasiswa, masyarakat umum; 200 orang pelajar, mahasiswa, masyarakat umum; 1 tim pameran Museum NTT (5 org) dan 200 pengunjung pelajar, mahasiswa dan masyarakat lokal; 1 tim pameran Museum NTT (6 org) dan 200 pengunjung pelajar, mahasiswa dan masyarakat lokal; 1 tim pameran Museum NTT (6 org) dan 200 pengunjung pelajar, mahasiswa dan masyarakat lokal;	Kupang; Sumba Timur; Nasional; Nasional; Jakarta, Jakarta	1.004.110.600	969.217.600	969.217.600	-
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				12.058.999.000	12.038.124.000	12.400.351.000	362.227.000
1.18.1.18.01.01. DIVAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				12.058.999.000	12.038.124.000	12.400.351.000	362.227.000
Agenda: Pemberian Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya peneraan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.18.1.18.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.277.456.750	1.298.079.125	1.298.079.125	-
1.18.1.18.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.072.801.050	1.115.215.050	1.407.442.050	292.227.000

Ww

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SSAS/DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET- PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
1.18.1.18.01.06: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAJARAN CAPAIAN KINEKRA DAN KEUANGAN				16.634.000	19.529.000	19.529.000	-
Agenda: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan							
Sasaran Daerah: Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olah raga							
1.18.1.18.01.21: PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN				4.131.450.000	4.118.720.000	4.118.720.000	-
Tolak Ukur : Peningkatan prestasi atlet pada semua cabang olahraga; Jumlah bantuan untuk Klub yang berprestasi; Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam kebudayaan olahraga							
Target Program: 110 atlet berprestasi; 12 Klub berprestasi; 80 Peserta							
1.18.1.18.01.21.02: Pembibitan Olahraga Berkasat	Terselenggaranya Upacara HAORNAS; Terselenggaranya atlet PPLD, PPLM (Try Out PON); terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu Dinas Pemuda dan Olahraga; Adit Berprestasi lewat POPDA di Kabupaten/kota (cabang kempo, Tinju, Pencak Silat dan Taekwondo; Terselenggaranya Kompetisi Sepak Bola Gubernur CUP; Terselenggaranya lomba sepeda gunung dan sepatu roda tingkat provinsi	1,000 Peserta Upacara Haornas; 40 orang Adit; 11 orang Pelatih dan 5 orang official; 1 Laporan Monitoring, dan Provil Dinas Pemuda dan Olahraga; 75 Adit PPLP, PPLM, PPLD; 22 Klub Sepak Bola dari 22 Kabupaten/kota; 50 orang Sepeda Gunung, 50 sepatu Roda	Kota Kupang; Nasional; 22 Kab/Kota; Kota Kupang	4.131.450.000	4.118.720.000	4.118.720.000	-
Sasaran Daerah: Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi							
1.18.1.18.01.21: PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN				3.147.886.500	2.860.681.500	2.930.681.500	70.000.000
Tolak Ukur : Peningkatan prestasi atlet pada semua cabang olahraga; Jumlah bantuan untuk Klub yang berprestasi; Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam kebudayaan olahraga							
Target Program: 110 atlet berprestasi; 12 Klub berprestasi; 80 Peserta							
1.18.1.18.01.21.01: Peningkatan Pembinaan Olahraga	Terselenggaranya pemberian bonus bagi atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional; terlaksananya pemberian bantuan bagi Club olahraga; terlaksananya pelatihan penyelenggaraan bagi Pelatih dan Wasit; Terselenggaranya Raport Koordinasi Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT; Terselenggaranya Sirkuit Atletik; terlaksananya pembinaan Adit PPLD; Terselenggaranya kejuaraan Tinju Nasional PPLP (Tuan Rumah); Terjalarnya atlet berprestasi untuk mengikuti TC POPWIL; terlaksananya peminatan latihan dan pengiriman atlet sepak bola Timor Sea Cup; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	11.75 atlet berprestasi dan 6 pelatih PPLP, 6 pelatih PPLD, 6 pelatih PPLM, 21.25 atlet disabilitas dan 10 pelatih Ador; Kupang; Kota Kupang; Nasional; 12 Club olahraga (sepakbola, kempo, taekwondo, atletik, pencak silat, tinju, tarungdradjakarate, tenis meja); Kupang; Kota Kupang; Timor Leste	Kota Kupang; 22 kab/kota; Kota Kupang; Kupang; Kota Kupang; Nasional; 22 Kab/Kota; Kota Kupang	3.147.886.500	2.860.681.500	2.930.681.500	70.000.000
Sasaran Daerah: Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda							
1.18.1.18.01.20: PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBUJUKAN PEMUDA				2.412.770.700	2.625.899.325	2.625.899.325	-
Tolak Ukur : Meningkatkan jumlah organisasi lingkungan, ekonomi dan sosial yang dibentuk, aktif dan terbinas; Menurunnya prosentase pemuda usia 1-30 tahun yang tidak bekerja							
Target Program: 70 Organisasi; 3,75 %							

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUBNI (Rp.)	APBD MUBNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
1.18.1.18.01.20.01. Pembinaan Kepemudaan	1) Terlaksananya pelatihan/bimbingan usaha ekonomi dalam bidang menjahit dan Tata Rias (gantung Rambut) bagi 100 orang dari 6 organisasi kepemudaan (PMKRI, HMI, GMMI, GMMI, OMK, Pemuda GMTI) 2) Terselenggaranya bantuan peralatan; Terlaksananya Pelatihan / Bimbingan Teknis Dalam Bidang lingkungan Hidup Peneliharaan Cendana dan Mangrove bagi pemuda (P2); Terlaksananya kegiatan Pelatihan/Bimbingan teknis bagi pemuda melalui 4 Organisasi kepemudaan (65 orang), dalam bidang penanganan masalah sosial tertama Napzah (narkoba) (P2); Terlaksananya - Jambore Pemuda Indonesia (JPI); 1) Terlaksananya Pelatihan kerampilan usaha ekonomi produktif (pembuatan mie instan dari jagung dan daun kelor bagi pemuda (KUPP) 2) terseluruhnya 10 paket bantuan peralatan ekonomi produktif; Terlaksananya Pelatihan manajemen organisasi bagi 10 Organisasi kepemudaan; Terlaksananya penguatan wawasan kebangsaan bagi pemuda pelopor; Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paskibraka Tingkat Provinsi; Terlaksananya Dialog Interaktifng bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTTat	1) 6 Organisasi kepemudaan di 5 kab (Mangarai, Mabur, Matim, Nagekeo, Ngada); 2) 1 paket tata rias (10 kel); 2 paket pangkas rambut; 50 orang dari 2 organisasi pemuda; 65 orang; 150 Pemuda dari 22 Kab/Kota dan terpilihnya Wakil NTT dalam jpi dan BPAP; 50 Pemuda dari 10 KUPP (50 orang mie dari jagung dan daun kelor untuk lokasi pelatihan kota kupang dan kab. Alor); 50 orang pengurus dari 10 Pengurus OKP; 40 Orang Pemuda di Daerah Perbatasan Kabupaten Alor, Sabu , Rote; 50 Peserta Paskibraka dan 4 orang paskibraka tingkat nasional; 1 Pkt (seluruh komponen pemuda di Provinsi)	Mangarai Barat; Kabupaten Sumba Barat Daya; Kabupaten Belu; Kota Kupang, dan Nasional; Kota Kupang dan Nasional; Provinsi Kupang dan Nasional; Provinsi	2.412.770.700	2.625.899.325	2.625.899.325	
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				13.606.146.900	13.606.146.900	14.497.640.900	891.494.000
1.19.1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.699.305.900	3.699.305.900	3.699.305.900	
Agenda: Pembrehan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Meningkatkan penghayatan, pengalaman, pelestarian dan pengamanan ideologi Pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam berdemokrasi							
1.19.1.19.01.16. PROGRAM FASILITASI POLITIK, PEMILU, BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN				2.397.299.800	2.397.299.800	2.397.299.800	
Tolak Ukur : Terselenggaranya Orientasi pementapan budaya politik bagi Tomas, Toga, Kaum Perempunan, Mahasiswa, Pelajar, Partai Politik, Ormas, LSM, Aparatur Pemerintahan Provinsi dan Pejabat Keshangpol Kabupaten/Kota							
Target Program: 22 Kab/Kota							
1.19.1.19.01.16.01. Orientasi Pementapan budaya Politik dan Stabilitas Politik	Terlaksananya orientasi pementapan budaya politik bagi Tomas, Toga, Kaum Perempunan, Mahasiswa, Pelajar, Partai Politik, Ormas, LSM, Aparatur Pemerintahan Provinsi dan Pejabat Keshangpol Kabupaten/Kota dan terpanturnya perkembangan politik di daerah	1 kali 80 rapat peserta dan 1 Pkt Laporan Dinamika Politik	Kupang, 22 kab./Kota	134.682.800	134.682.800	134.682.800	
1.19.1.19.01.16.02. Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	Terfasilitasinya tugas Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2016 bagi Partai Politik, Perguruan Tinggi, Ormas Kepemudaan, Mahasiswa, Toga, Tomas dan Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT	1 Kt Seminar IDI Akhir Tahun (80 org) , 1 Kali Expose Hasil Penilaian IDI (50 org), Desiminasi Hasil IDI (50 org), FGD Hasil IDI (100 org), 4 Kt Rapat Pokja IDI Tk. Prov., 1 Paket Validasi Data IDI Kab./Kota	Kota Kupang dan 22 Kab./Kota	188.627.200	188.627.200	188.627.200	
1.19.1.19.01.16.04. Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kebangsaan pengembangan wawasan kebangsaan melalui Lomba Pidato, Sosialisasi 4 Pilar Bangsa Kebangsaan, Rakor Keshangpol , Dialog Interaktif Wasbang, Sosialisasi 4 (empat) Pilar kebangsaan, Dialog pencegahan pengaruh ideologi lain terhadap Pancasila, Forum Desiminasi Pementapan Wawasan , Kerjasama dengan Ormas/LSM, 2 kali rapat forum komunikasi Revitalisasi Pancasila di Provinsi NTT	1 Kt Rakor Keshangpol (80 org), 10 Kt Dialog Melalui TVRI & Radio Lokal: 1 Kt Lomba Pidato bg SIRA; 4 Kt Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (400 org); 1 Kt Dialog pencegahan pengaruh ideologi lain terhadap Pancasila Umtas generasi (100 org); 2 Kt Forum Desiminasi Pementapan Wawasan kebangsaan (200 org); Kerjasama dengan Ormas/LSM dlm rangka peningkatan Kapasitas Masyarakat (100 org); 2 kali rapat Forum komunikasi Revitalisasi Pancasila (150 org).	Kupang, Sabu Raijua, Belu, Mangarai Timur, Alor, Rote Ndao, lembata dan Kabupaten/Kota se NTT	740.745.150	740.745.150	740.745.150	

me

URISAN/SKPD/ AGENDA/SAKSIAN DAERAH/PROGRAM/TOOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APSD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURUPANG (Rp.)
1.19.1.19.01.16.05. Fasilitas Pembentukan dan Penguatan FKUB, FPK, dan FKDM	Tertaksananya Penguatan FPK, FKUB dan FKDM di Provinsi NTT	3 Kt. Keg (Rakor FKDM/FKUB/FPK Provinsi & Kab/Kota); 4 Kali Rapat Bulanan FPK; 4 kali Rapat Bulanan FKUB; 4 Rapat Bulanan FKDM; Penguatan FPK, FKUB, FKDM 21 Kab/Kota	Kupang dan Kabupaten Kota se NTT	660.806.200	660.806.200	660.806.200	
1.19.1.19.01.16.06. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	Tertaksananya penyuluhan Undang-Undang bidang politik bagi unsur Partai Politik, masyarakat dan aparat pemerintah	5 kali penyuluhan 560 orang, 2 laporan Forum Diskusi	Kabupaten Sikka, Ngada, Nagekeo, Alor, Lembata, TTS dan Ende	373.044.000	373.044.000	373.044.000	
1.19.1.19.01.16.07. Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Tertaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi NTT dan laporan bantuan keuangan Kab/Kota	6 kali Rapat Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik (6 laporan) Bantuan Keuangan Tkt Provinsi dan 1 Lap Bantuan Keuangan Kab./Kota	Kota Kupang dan 22 Kab./Kota	43.713.300	43.713.300	43.713.300	
1.19.1.19.01.16.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebangpol Provinsi NTT thn 2016	1 dokumen laporan hasil money di 22 Kabupaten/Kota	Kota dan Kabupaten/Kota	255.681.150	255.681.150	255.681.150	
Sasaran Daerah: Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi melalui peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional							
1.19.1.19.01.18. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBAINAAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, EKONOMI DAN FASILITASI KEMASPADAAN NASIONAL				735.590.900	735.590.900	735.590.900	
Total Ukur : Meningkatnya pembinaan seni budaya, Agama Masyarakat, Ekonomi melalui Sosialisasi, Dialog, verifikasi/ pemantauan keberadaan Ormas & LSM dalam 1 tahun							
Target Program: 22 Kab/Kota							
1.19.1.19.01.18.01. Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama Masyarakat, Ekonomi	Tertaksananya pembinaan ketahanan seni budaya, Agama Masyarakat, Ekonomi melalui Sosialisasi, Dialog, verifikasi/ pemantauan keberadaan Ormas & LSM dalam 1 tahun	3 Kt. Sosialisasi (240 orang); 4 Kt. Dialog (320 orang); 1 Dokumen Verifikasi/ Data Ormas & LSM Kab/Kota	Kupang, Belu, Alor, Maunere, Ende, Ngada, Labuan Bajo, Waingapu, Tambora.	207.038.700	207.038.700	207.038.700	
1.19.1.19.01.18.02. Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Tertaksananya Rapat Kontingensi Konflik Sosial tingkat Provinsi, rapat rapat terpadu penanganan gangguan konflik sosial, dialog bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Pemprov, TNI, Poli, Kejat, Kemenhuk HAM, Pemda, Kab/Kota, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa/wi, Organisasi massa/ LSM, FKDM, Forkopimda Prov. Aparatur Kesbangpol	4 Kali Rapat Kontingensi (20 orang); 4 Kali Rapat Terpadu (40 orang) tingkat Provinsi; 1 Kali Rapat Terpadu (70 orang) tingkat Kab/Kota se-NTT; 1 Kali Dialog tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme (50 orang)	Kota Kupang dan 22 Kabupaten /Kota	305.900.700	305.900.700	305.900.700	
1.19.1.19.01.18.03. Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tertaksananya Rakor keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Kepala Badan/Kantor Kesbangpol 22 Kabupaten/Kota se NTT, Anggota FKDM, TNI/POLRI, FPK, FKUB, Kominda dan Para Camat Kab. Alor Tahun 2016	60 orang	Kalibohi- Kabupaten Alor	70.496.500	70.496.500	70.496.500	
1.19.1.19.01.18.05. Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	Tertaksananya koordinasi Penanganan aktivitas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing pada Tingkat Provinsi	4 Kali Rapat	Kupang dan Jakarta	60.562.000	60.562.000	60.562.000	
1.19.1.19.01.18.06. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tertaksananya kegiatan pengendalian keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan bagi 85 orang dari unsur Aparat Keamanan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Adat, Pemuda, Tokoh Perempuan se daerah Sumba serta Kaban Kesbangpol Kab/Kota se NTT Tahun 2016	85 orang	Waingapu Kabupaten Sumba Timur	91.593.000	91.593.000	91.593.000	

2022

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
Sasaran Daerah : Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.19.1.19.01.01: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				469.510.200	469.510.200	469.510.200	-
1.19.1.19.01.02: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				66.305.000	66.305.000	66.305.000	-
1.19.1.19.01.06: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				30.600.000	30.600.000	30.600.000	-
1.19.1.19.02: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4.535.816.000	4.535.816.000	4.928.691.000	392.875.000
Agenda: Pembedahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum							
1.19.1.19.02.19: PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				1.793.895.200	1.852.897.800	1.892.897.800	40.000.000
Total Ukur : Meningkatkan kegiatan penerbitan masyarakat dan terwujudnya penciptaan kenyamanan lingkungan masyarakat							
Target Program: 100%							
1.19.1.19.02.19: Pembinaan Sistemling bagi Anggota Lintas Kab/Kota se NTT	Terlaksananya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan bagi Anggota Lintas Kab./Kota se NTT	1 kali	Kab. Sabu Raijua, Kab. Sumba Barat dan Kab. Manggarai				-
1.19.1.19.02.19: Sosialisasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	1)Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat terhadap Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	1 kali	Kota Kupang				-
1.19.1.19.02.19.01: Pembinaan Desa/Keurahan Sader Trantibum	Terlaksananya Penyuluhan Desa Sader Trantibum	5 kali Penyuluhan bagi 250 orang di 5 Desa (Kab. Sumba Timur, Desa Mbatakapidu, Kota Kpg. Kel. Namosain, Kab. Ende, Desa Rukun Lima, Kab. Flotim, Desa Lewohala, Kab. Ngada, Desa Boba)	Kab. Sumba Timur, Desa Mbatakapidu, Kota Kpg. Kel. Namosain, Kab. Ende, Desa Rukun Lima, Kab. Flotim, Desa Lewohala, Kab. Ngada, Desa Boba				-
1.19.1.19.02.19.02: Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satlimas	Meningkatnya pemahaman anggota Satlimas tentang tugas pokoknya, Terkait sistem sistemling/kepentingan umum & ketertiban masyarakat, Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Lintas secara baik dan benar	3 kali/kelas	Kota Kupang	381.114.000	381.114.000	381.114.000	-
1.19.1.19.02.19.05: Pembinaan dan Pencerahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)bagi Satlimas	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Penyakit Masyarakat; Terbentuknya sistem antispasi pekat yang dimotori Satlimas; Menurunnya penyakit sosial kemasyarakatan/pekat;	12 kali	Kab. Belu dan Sikka	179.658.000	179.658.000	179.658.000	-

~

URUSAN/STPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERTURUNKAN (Rp.)
1.19.1.19.02.19.07. Peningkatan Fungsi Pemeliharaan Trantbun	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kesemampuan dan Peraturan Baris- Baris Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Terlaksananya Polisi Pamong Praja National Corps Building. Terlaksananya Bimtek penggunaan perlengkapan sarana dan prasarana pendukung bagi anggota satpol pp Prov, Kab/Kota; Terlaksananya Bimtek Pengendalian Massa dan Pengawasan Pejabat Bagi Anggota Satpol PP Propinsi dan Kabupaten/Kota; terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Poka 300 jam, 150 Jam bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Terlaksananya Bimtek Pengendalian Massa dan Pengawasan Pejabat Bagi Anggota Satpol PP Propinsi dan Kabupaten/Kota; Terlaksananya operasi penertiban penyakit masyarakat; Terlaksananya operasi PNS; Terlaksananya operasi penertiban aset penting milik pemerintah Prov. NTT; Terlaksananya Pengamanan Tingkat Provinsi	1 kali Bimtek 50 orang; 1 kali 7 orang; 1 kali Bimtek 50 orang; 1 kali Bimtek 50 orang; 1 kali Pelatihan pola 300 jam (30 orang), 1 kali pelatihan pol 150 Jam (20 orang); 50 orang; 4 kali; 4 kali; 4 kali; 100%; 7 orang	Kota Kupang, Kab. Kupang dan Bandung	405.135.600	395.674.200	395.674.200	-
1.19.1.19.02.19.08. Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Terlaksananya Pembekalan dan Konsolidasi Anggota Linmas di Kabupaten	3 kali pembekalan dengan peserta 50 per kabupaten kali; 4 kali; 12 bulan; 1 paket; 1 paket; 1000 buah; 1000 buah	Timor Tengah Utara, Sumba Tengah dan Nagekeo	110.559.800	139.661.800	139.661.800	-
1.19.1.19.02.19.09. Peningkatan Keamanan, Keterlibatan Masyarakat dan Kemudahan lingkungan	Terlaksananya patroli bersama antar satpol pp Provinsi dan satpol pp 3 kab dan pemantauan Trantbun di 6 Kab dan Kota; Terlaksananya operasi penertiban penyakit masyarakat; Terlaksananya operasi PNS; Terlaksananya Pengamanan Tingkat Provinsi; Terlaksananya kegiatan pelatihan baris-berbaris, devile dan pembawa Pataka pendukung persiapan HUT Pol PP ke-67 dan HUT Linmas ke-55; Terlaksananya kegiatan studi banding pendukung persiapan HUT Pol PP ke-67 dan HUT Linmas ke- 55; Terlaksananya belanja kain tenun dalam rangka HUT Pol PP ke-67 dan HUT Sat Linmas ke-55; cinderamata berlogo dalam rangka HUT Pol PP ke- 67 dan HUT Sat Linmas ke-55	3 kali patroli bersama dan 6 kali pemantauan Trantbun; 4 kali; 4 kali; 12 bulan; 1 paket; 1 paket; 1000 buah; 1000 buah Surabaya	Kota Kupang, TTU, Belu, Floim, Sikka, Ende, Ngada, Alor, Malaka, Rote Ndao, Surabaya	636.437.800	676.153.800	716.153.800	40.000.000
1.19.1.19.02.19.10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terpadu di Kabupaten/Kota	4 Dokumen Laporan Hasil Monev	22 Kabupaten/Kota	80.990.000	80.636.000	80.636.000	-
1.19.1.19.02.20. PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH				1.318.742.000	1.264.745.000	1.264.745.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya kegiatan operasi penegakan Produk Hukum Daerah							
Target Program: Meningkatnya penegakan produk hukum daerah serta meningkatnya penciptaan keamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat 100 %							
1.19.1.19.02.20.01. Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat & Bimtek PPNS	Terlaksananya Bimtek PPNS di daerah; Terlaksananya Pelatihan Calon PPNS Tingkat Pusat (Bogor); Terlaksananya Bimtek PPNS Tingkat Pusat (Jakarta); Terlaksananya Operasi Perda dan Keputusan Kepala Daerah; di Terlaksananya Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Keputusan Gubernur; Terlaksananya Rakorrek (Rapat Koordinasi Teknis) Penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah di Tingkat Pusat dan Daerah; Terlaksananya Operasi Tipiring (Tindak Pidana Ringan)	1 kali Bimtek 30 orang PPNS; 2 orang PPNS; 1 orang PPNS; 6 Perda dan Perkada; 6 Perda dan Keputusan Gubernur; 4 kali di Pusat (Jakarta); 10 kali Operasi Tipiring dalam rangka Peningkatan PAD sebesar Rp. 100.000.000	Bogor, Jakarta, TTS dan Alor, Lembata, Bogor, Jakarta, TTS dan Alor, Manggarai, Mabur, Ende, Malaka, Belu, TTU, TTS, Kota Kupang	882.078.900	828.081.900	828.081.900	-

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERUBAH/BERUBANG (Rp.)
1.19.1.19.02.20.02. Pembinaan dan Pengawasan Terdapat Pelanggaran Perda dan Produk Hukum	Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Produk Hukum; Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksana (lembaga) Perda dan Produk Hukum	Perda Ases Daerah Nomor 3 Tahun 2008; UPT Dispenda	16 Kabupaten/Kota, 16 Kabupaten/Kota	179.138.100	179.138.100	179.138.100	-
1.19.1.19.02.20.03. Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Tertaksananya Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; Meningkatnya Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%; 100%	Kota Kupang	89.552.500	89.552.500	89.552.500	-
1.19.1.19.02.20.04. Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS	Tertaksananya Pembinaan/Penyuluhan Pelaksanaan Peraturan Daerah; Tertaksinatnya Pembentukan Sekretariat PPNS di Kab./Kota; Tertaksinatnya Evaluasi Pembentukan Sekretariat PPNS	1 kali penyuluhan di 7 Kab. Dengan peserta per Kab. 15 orang; 5 kabupaten; 5 dokumen hasil evaluasi	Jakarta, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai, Rote Ndao	167.972.500	167.972.500	167.972.500	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.19.1.19.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.235.774.800	1.252.769.200	1.575.169.200	322.400.000
1.19.1.19.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				173.154.000	151.154.000	181.629.000	30.475.000
1.19.1.19.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				14.250.000	14.250.000	14.250.000	-
1.19.1.19.03. BAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.371.025.000	5.371.025.000	5.863.644.000	498.619.000
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.19.1.19.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.054.541.150	1.054.541.150	1.054.541.150	-
1.19.1.19.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				155.750.000	155.750.000	155.750.000	-
1.19.1.19.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				7.775.000	7.775.000	7.775.000	-
Agenda: Agenda Khusus							
Sasaran Daerah: Terwujudnya ketahanan terhadap Bencana							
1.19.1.19.03.22. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM				4.152.958.850	4.152.958.850	4.651.577.850	498.619.000
Total Ukur : Meningkatnya kerjasama dalam Tanggap darurat							
Target Program: Kerjasama Penanganan Bencana di Desa/Kelurahan(Lokasi kasus Bencana)							

me

URISAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUJUN (Rp.)	APBD MUJUN (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp.)
1.19.1.19.03.22.01. Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU); Terlaksananya Bimtek Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Gender; Terlaksananya Set up/Instalasi dan pelatihan operator perangkat komunikasi radio; Terlaksananya pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya dan daerah rawan bencana; Terlaksananya penyebaran informasi kebencanaan melalui media cetak; Terlaksananya kelancaran Operasional Kendaraan/ Peralatan Penanggulangan Bencana; Terlaksananya Pelatihan Teknis Operasional dalam pengelolaan peralatan, logistik dan penggerakan SDM serta penanggulangan bencana saat darurat bencana di Provinsi NTT; Terlaksananya SDM Aparatur BPBD Prov. NTT melalui gladi simulasi bersama BASARNAS, TNI/POLRI secara bertala	1 kali, 70 orang; 1 kali, 70 orang; 1 kali, 80 orang; 4 lokasi; Kalender mini, spanduk, umbul-umbul, baliho dan poster; 12 Bulan; 1 paket pendampingan; 3 kali gladi simulasi, 150 peserta	Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat; Kab. TTU; Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan TTU; Daratan Timor dan Alor, Daratan Flores dan Lembata, Daratan Sumba, Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Raijua; Kota Kupang; Kota Kupang	1.538.397.000	1.561.513.000	1.561.513.000	-
1.19.1.19.03.22.02. Penanganan Korban Bencana	Terlaksananya Koordinasi kajian cepat awal penyusunan status kondisi bencana, pencarian, penyelamatan, pengungsian, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perbaikan sarana prasarana vital saat tanggap darurat di Provinsi NTT; Tersedianya dukungan logistik penanggulangan bencana; Terdistribusinya bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana; Terlaksananya POSKO Jaga 7x1x24 jam; Terkumpulnya data kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana guna penyusunan proposal pendanaan ke BNPB	22 Kab./Kota, 73 orang; 1 paket logistik; 1 tahun; 1 tahun; lokasi bencana di 22 kab/kota	22 Kab./Kota, Jakarta, Kota Kupang; Provinsi, 22 kab/kota; Kupang; 22 kab/kota	1.670.668.700	1.672.168.700	1.672.168.700	-
1.19.1.19.03.22.03. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana	Terlaksananya rapat penguatan kelembagaan BPBD se-NTT; Terlaksananya SDM Aparatur BPBD Provinsi yang tanggap bencana; Terlaksananya lomba karya tulis ilmiah, fotografi dan desain leaflet serta apel siaga menyambut hari PRB	2 kali, 90 orang; 3 kali, 150 orang; 3 Lomba, 1 kali apel siaga; 200 orang	Kab. Kupang, Jakarta, Kab. Kupang; Kupang	943.893.150	919.277.150	919.277.150	-
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWALAN DAN PESANDIAN				377.311.515.000	372.831.638.900	412.398.042.567	39.566.403.667
1.20.1.20.03. BIRO ADMINISTRASI				6.022.868.000	5.598.278.000	5.598.278.000	-
PEMBANGUNAN							
Agenda: Pembentukan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				921.295.150	1.004.839.150	1.004.839.150	-
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				304.265.000	303.065.000	303.065.000	-

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.05..PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya Perencanaan yang berkualitas dengan pendekatan Partisipatif, Teknokratik, Bottom Up dan Top Down							
1.20.1.20.03.31..PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH				4.779.307.850	4.272.373.850	4.272.373.850	-
Tolak Ukur : Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah							
Target Program: 12 Bulan							
1.20.1.20.03.31.. Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Terlaksananya Rapat Koordinasi LPSE se Provinsi NTT ; Terlaksananya Bimtek SPSE bagi Pengelola LPSE Provinsi NTT ; Terfasilitasinya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ; Terlaksananya Bimtek SPSE bagi pengguna LPSE di Provinsi NTT	1 Kali 150 peserta ; 1 Kali, 8 orang; 100%; 500 orang	Provinsi, Jakarta dan 6 Kabupaten/ Kota se - NTT	-	-	-	-
1.20.1.20.03.31.. Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTT	Terlaksananya fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTT ; Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pokja ULP Prov NTT ; Terlaksananya Bimtek Pengelola dan Anggota Pokja ULP Prov NTT ; Terlaksananya Rakor Daerah ULP se- Prov. NTT	100% ; 100% ; 3 kali bimtek 15 orang ; 1 kali rakor 150 orang	Jakarta, Bandung, NTB dan Provinsi	-	-	-	-
1.20.1.20.03.31.. Koordinasi Pembinaan, Pengendalian Pengadministrasian Sumber- Sumber Pembinaan Pembangunan di NTT	Terfasilitasinya program kerjasama dengan pihak ketiga	1 kali	Provinsi, Jakarta	-	-	-	-
1.20.1.20.03.31.. Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, dan Tugas Pembantuan pada Kabupaten/Kota	Tersusunnya Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD Kab/Kota Se NTT ; Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, dan TP Kabupaten/Kota di 22 Kabupaten/Kota ; Terlaksananya Rapat Evaluasi Tengah Tahun dan Akhir Tahun Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kabupaten/Kota ; Tersusunnya Dokumen pelaporan dan potret pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ; Tersusunnya Sebaran Kegiatan pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT.	75 buku ; 3 kali, 22 Kab/Kota ; 2 kali ; 12 Laporan bulanan, 4 Lap Triw, dan 1 lap tahunan, 75 buku potret ; 75 buk	Provinsi, Jakarta dan 22 Kabupaten/Kota	-	-	-	-
1.20.1.20.03.31.. Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama	Terlaksananya Rapat Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat, dan Urusan Bersama ; monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat, dan Urusan Bersama ; Terlaksananya sosialisasi petunjuk teknis tentang pelaksanaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat, dan Urusan Bersama ; Terlaksananya fasilitasi penyerahan DIPa APBN	4 kali/triwulan, 600 Satker dari 28 SKPD Provinsi ; 4 kali/triwulan money di 22 Kab/Kota ; 1 kali di Provinsi ; 22 se NTT Kab/Kota dan Satker Provinsi	Jakarta, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	-	-	-	-
1.20.1.20.03.31.01. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembinaan, fasilitasi Penyediaan Masalah Pengadaan Barang/Jasa se-Provinsi NTT ; Terlaksananya Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIrUP)	1 kali 22 kab/Kota	Provinsi, Jakarta dan 22 Kabupaten/ Kota se - NTT	2.121.594.350	1.614.660.350	1.614.660.350	-

nan

URUSAN/STRO/ AGENDA/ASASAN DAERAH/PROGRAM/TOLOK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.31.05. Pembinaan Jasa Konstruksi Untas Kabupaten/ Kota	Tertaksananya forum Jakon dan Rakor tim pembina jakon : Tertaksananya pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan jakon se Provinsi NTT	1 kali ; 22 kab/kota	(blank)	659.624.500	659.624.500	659.624.500	-
1.20.1.20.03.31.09. Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, APBD kab/kota dan APBN	Tertaksananya Rapat Evaluasi APBD Prov. NTT ; Tertaksananya pengambilan data pelaksanaan APBD Provinsi ; Tertaksananya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi ; Tertaksananya Bimtek TPPA untuk SKPD se Provinsi NTT ; Tertaksananya Bimtek Aplikasi Money OL untuk SKPD se Provinsi NTT ; Tertaksananya Bimtek Aplikasi Money OL untuk Kabupaten/kota se Provinsi NTT (bahas internal)	4 kali/triwulan, 50 SKPD ; 50 SKPD Provinsi ; 22 Kab/Kota ; 4 kali, 125 peserta SKPD Provinsi ; Instansi/Satker se Prov. se NTT	Jakarta, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	1.998.089.000	1.998.089.000	1.998.089.000	-
1.20.1.20.03. BIRO HUKUM				3.363.072.000	3.363.072.000	3.513.072.000	150.000.000
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sasaran Daerah: Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT dan terdapatnya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat			1.482.060.000	1.482.060.000	1.482.060.000	-
Tolak Ukur : Terwujudnya Pembinaan dan Penguasaan Hukum berupa Asistensi dan Evaluasi Ranperda, Klarifikasi Perda dan Moner Perda Kab./Kota.							
Tarjet Program: 220 Ranperda/Perda di 22 Kab./Kota	Tertaksistensi dan terevaluasinya Ranperda Kab./Kota	220 Ranperda/Perda di 22 Kab./Kota ; terklarifikasi perda Kab/Kota ; termonitoringnya Perda Kab./Kota	Pusat, Provinsi dan Kab./Kota	140.443.000	140.443.000	140.443.000	-
1.20.1.20.03.26.07. Pembinaan dan Penguasaan Produk Hukum Kab./Kota.				630.000.000	630.000.000	630.000.000	-
1.20.1.20.03.26.08. Legislasi Daerah	Tersusunnya Perda & Ranperda baru Provinsi NTT ; Tertaksananya pengkajian Perda Prov. NTT ; Tertaksananya uji Publik Ranperda Prov. ; Tertaksananya Penyusunan Pergub ; Tertaksananya Penyusunan Hukum	6 Ranperda Prov. 4 Perda Kaji Ulang, 20 Pergub, 211 Keputusan/Ingub. 20 MoU/MoA dan Moner MoU/MoA di 11 Kab/Kota, Konsultasi publik di 22 Kab./Kota ,	Pusat, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	132.250.000	132.250.000	132.250.000	-
1.20.1.20.03.26.09. Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Tertaksananya Rakor Bidang Hukum ; Tertaksananya Rapat Teknis Bidang Hukum	1 kali Rakor 65 peserta ; 1 kali Rapat teknis 30 peserta	Kupang	579.367.000	579.367.000	579.367.000	-
1.20.1.20.03.26.10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tersedianya Data dan Informasi Hukum	Tertaksananya Evaluasi dan Pelaporan	Pusat, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota				-
Sasaran Daerah: Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum				1.194.582.000	1.194.582.000	1.344.582.000	150.000.000
1.20.1.20.03.36. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT							
Tolak Ukur : Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat							
Tarjet Program: 5 kasus di dalam Pengadilan, 5 masalah Hukum di luar Pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus Hukum di Kab./Kota	Tertaksananya Penanganan Sengketa/Masalah Hukum Pengadilan masyarakat di dalam dan di luar Pengadilan	5 Kasus di dalam Pengadilan, 5 Masalah Hukum di luar Pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus Hukum di Kab/Kota	Pusat, Provinsi, Kab/Kota	389.820.000	389.820.000	539.820.000	150.000.000
1.20.1.20.03.36.01. Penanganan Kasus di Dalam dan di luar Pengadilan				87.843.000	87.843.000	87.843.000	-
1.20.1.20.03.36.02. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tertaksananya Sosialisasi secara langsung tingkat Provinsi tentang Perundang-Undangan Pusat dan Daerah ; Sosialisasi secara tidak langsung melalui : 1)Media Cetak 15 Puluhan Pusat & Daerah ; 2)Radio 15 Puluhan Pusat & Daerah ; 3)Pencetakan Ueliet dan Kalender Produk Hukum	1 kali sosialisasi langsung tingkat Provinsi 3 produk hukum	Provinsi dan 22 Kab/Kota				-
1.20.1.20.03.36.03. Terselenggaranya Rakernis IDIH Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan IDIH di Kab/Kota	Terselenggaranya Rakernis IDIH Tingkat Provinsi ; Terselenggaranya TOT/ Evaluasi IDIH serta Pengembangan IDIH Tingkat dan Tersedianya Sistem IDIH Pembinaan di 22 Kab/Kota dan Tersedianya Sistem IDIH Tingkat Provinsi	1 Kali Rakernis Tingkat Provinsi, TOT/Evaluasi IDIH serta Pembinaan di 22 Kab/Kota dan Tersedianya Sistem IDIH Tingkat Provinsi	Provinsi dan 22 Kab/Kota	210.115.000	210.115.000	210.115.000	-

na

URUSAN/SKPD/ DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.36.04. Advokasi Pengisian LHKPN	Tertaksananya advokasi pengisian LHKPN ; Tertaksananya pendataan Kelayaan Penyelenggara Negara	Peljabat di 22 Kab/Kota dan berapa peljabat di instansi Lingkup Pemprov. NTT	(blank)	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-
1.20.1.20.03.36.05. Koordinasi Pelaksanaan RAUHAM dan Perumusan Keputusan Hukum.	Tertaksananya Harmonisasi Perda yg berperspektif HAM ; Tertaksananya Yankomas ; tertaksananya Bimtek HAM ; Tertaksananya Rakor Kab/Kota Peduli HAM ; tertaksananya Monev RAN HAM	4 Perda di 2 Kabupaten ; 4 kali di kabupaten ; 1 kali di Provinsi ; 1 kali di Provinsi	Provinsi dan 22 Kab/Kota	185.000.000	185.000.000	185.000.000	-
1.20.1.20.03.36.06. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TK.Prov. & Kab/Kota	Tertaksananya Rakor Aksi PPK di prov ; Tertaksananya pembinaan aksi PPK ; Tertaksananya pendidkan anti korupsi ; Tertaksananya lomba karya tulis anti korupsi	8 Rencana Aksi ; Monev di 21 Kab/Kota ; 8 SMA/SMK di Kota Kupang ; 8 SMA/SMK di Kota Kupang	Provinsi dan 22 Kab/Kota	126.804.000	126.804.000	126.804.000	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				484.100.000	484.100.000	484.100.000	-
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				173.830.000	173.830.000	173.830.000	-
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				28.500.000	28.500.000	28.500.000	-
1.20.1.20.03.03. BIRGO HUMAS				8.003.785.000	8.003.785.000	8.103.785.000	100.000.000
Agenas: Pemberian Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
1.20.1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH				1.461.360.900	1.461.360.900	1.461.360.900	-
Sasaran Daerah: Meningkatkan keterpaduan dalam peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat							
Tolak Ukur : Meningkatnya Pelayanan Kedinmasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
Target Program: 100%							
1.20.1.20.03.17.01. Publikasi Pelayanan Kedinmasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertaksananya Pendampingan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar Daerah ; Tertaksananya Peliputan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah ; Terdokumentasikannya Pelaksanaan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah ; Tersedianya Buku dan Album Foto tentang Kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur ; Tertaksananya pengumpulan data tentang isu-isu aktual yang berkembang dimasyarakat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	1 paket ; 1 paket ; 12 laporan ; 12 buku siaran pers dan 4 album foto/ triwulan ;	22 kabupaten / kota se NTT dan luar Daerah	1.461.360.900	1.461.360.900	1.461.360.900	-
1.20.1.20.03.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA				5.095.018.900	5.095.018.900	5.195.018.900	100.000.000
Tolak Ukur : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelayanan komunikasi dan informasi							
Target Program: 100%							

ma

URUSAN/SDPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BURUK (Rp.)
1.20.1.20.03.18.05. Publikasi Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penerbitan Buletin Warta NTT ; Terlaksananya Penerbitan Buku Buletin Desa Mandiri Anggur Merah ; Terlaksananya Pembuatan Buku Kiprah Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Lensa ; Terlaksananya Pembuatan Buku Agenda 2016, pembuatan Kalender 2016 ; Terlaksananya Jumpa Pers dan Pertemuan wartawan ; Terlaksananya Advertorial ; Terlaksananya publikasi dengan media nasional dan media lokal ; Terlaksananya Rapat Kerja Kehumasan Tingkat Provinsi; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	100 BUKU 4 EDISI ; 500 buku 2 edisi ; 200 Buku, 1 Edisi ; 240 Buku, 12 Edisi ; 250 Buku, 250 Exemplar ; 2 kali, 950 orang ; 1 paket ; 6 kali ; 1 paket ; 1 kali, 80 peserta	Kupang	5.095.018.900	5.095.018.900	5.195.018.900	100.000.000
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelengkapan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				861.204.200	881.204.200	881.204.200	
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				571.951.000	551.951.000	551.951.000	
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMPOKAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				14.250.000	14.250.000	14.250.000	
1.20.1.20.03.03. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				8.150.141.000	7.988.622.000	7.988.622.000	
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Keterpaduan kebijakan bidang agama yang meliputi bina agama Protestan dan Katolik, Bina agama Islam, Hindu dan Budha							
1.20.1.20.03.37. PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA				4.073.207.000	3.969.007.000	3.969.007.000	
Tolak Ukur : Meningkatnya kerukunan hidup beragama di daerah							
Target Program: Fasilitas Koordinasi Kerukunan antar umat beragama selama 12 Bulan							
1.20.1.20.03.37.06. Fasilitas Pelaksanaan STQ, Pespawati, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Sud dan Ziarah Rohani, Penyelenggaraan Okumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	1. Terfasilitasinya perayaan pawai Paskah, 2. Terfasilitasinya buka Puasa Bersama, Malam Takbiran, Idul Fitri, 3. Terfasilitasinya Halal Bihalal, Natal Okumene, 4. Terfasilitasinya Idul Adha dan Pekan OMK (7 Kuskupan), 5. Terlaksananya pertemuan pekan OMK, 6. Terfasilitasinya Natal Okumene ; Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Haji ; 1) Terfasilitasinya masyarakat untuk mengikuti Pekan Suci Lantuka 2016, ; 2) Terfasilitasinya ziarah rohani ke Yerusalem, Arab Saudi, India, Roma ; Terlaksananya pemertuan dan evaluasi atas hasil kesepakatan pertemuan antara Tokoh lintas agama dan pemuda lintas agama ; Terfasilitasinya pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi ; Terfasilitasinya MTO, TK Provinsi dan Nasional ; terlaksananya Pertemuan Pekan OMK	10 Kegiatan Keagamaan, 15 ekor hewan korban ; 7 orang ; 1500 Orang 2 kelompok ; 22 orang ; 200 orang ; MTO tingkat Provinsi di Ende (300 orang) dan Nasional di NTB (29 org)	Kota dan Kabupaten Kupang ; Kupang ; Surabaya, arab saudi ; Flores Timur ; Yerusalem, Arab, India, Roma ; 22 kab kota ; kota kupang ; ende dan NTB	3.529.086.000	3.424.886.000	3.424.886.000	
1.20.1.20.03.37.08. Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1. Terlaksananya dialog antara pemerintah Provinsi dgn pimpinan lembaga Keagamaan ttg strategi percepatan pembangunan dan strategi percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat di kota kupang ; 2. Terlaksananya Temu Pemuda Lintas Agama Tingkat Provinsi Tahun 2016 ; 3. terlaksananya Dialog Kerukunan Lintas Agama tahun 2016	1 kali kegiatan, 90 orang ; 1 kali, 100 orang dari 9 Kabupaten Sederetan Forcs ; 1 Rakor 80 Orang	kota kupang ; kab sika ; kab sumba timur	544.121.000	544.121.000	544.121.000	

~

URUSAN/SPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN/KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	ABD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.39 PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				3.683.947.400	3.626.630.300	3.626.630.300	
Sasaran Daerah: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur							
Tolak Ukur : Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang kesejahteraan masyarakat							
Target Program: 1 kali Koordinasi Pembangunan Bidang Kesra selama 12 Bulan							
1.20.1.20.03.39.01. Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	1). Terlaksananya operasional kesekretariatan dharma wanita, 2). Terlaksananya Peningkatan HUT Kartini dan HUT DWP, 3). Terlaksananya Raker Provinsi NTT	1). 1 sekretariat, 2). 500 orang/ 2 HUT, 3) 150 orang 1 Raker	kota kupang dan jakarta	493.100.000	493.100.000	493.100.000	
1.20.1.20.03.39.08. Peningkatan Pelaksanaan UKS	1. Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat ; 2. Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	1). 21 sekolah di 7 kabupaten	TTU, TTU, SBD, Mabar, Manggarai, Flotim dan Ende	136.673.900	136.673.900	136.673.900	
1.20.1.20.03.39.09. Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	1) Terlaksananya operasional Sekretariat Komda Lansia NTT ; 2) Terlaksananya sosialisasi dan advokasi pembentukan Kelembagaan KOMDA Lansia di Kota Kupang dan 9 kabupaten ; 3). Terlaksana Rapat Koordinasi Lingsup Provinsi tentang Masalah-masalah Kesejahteraan Sosial (Bencana, Tenaga Kerja Bermasalah dan Anak). ; 4). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kesos di Provinsi NTT ; 5)Terlaksananya Rakor Penguatanganan masalah-masalah kesehatan di lingsup Provinsi NTT ; 6)Terlaksananya Rapat Komisi Pengendalian Zoonosis tingkat Provinsi NTT; 7)Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan di kabupaten	1). 1 sekretariat ; 2). Tim sekretariat komda lansia NTT, di 10 kab/kota ; 35 kali Rapat ; 5 orang; 22 kab/kota ; 1 kali kegiatan, 200 orang ; 1) 4 kali rapat; 2) 8 kabupaten	Kota Kupang dan Jakarta : Kab. Flotim, Lembata, Belu, Malaka, TTU, TTU, Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua ; kota kupang ; 22 kab/ kota dan jakarta ; kupang ; 1) Jakarta, Kota Kupang; 2)kab. kupang, TTU, TTU, Mabar, Sikka, Belu, SBD, dan Sumba Timur	1.004.059.500	704.059.500	704.059.500	
1.20.1.20.03.39.12. Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	1) Penerbitan Pengurusan Tinggi Swasta; 2) Terfasilitasinya operasional KOPERTIS ; Terlaksananya Workshop Kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	PTS di 5 Kab/Kota; 2) Koperits PTS NTT, 50 orang	Kota Kupang, TTU, Sumba Timur, Ngada, dan SBD	152.512.600	395.195.500	395.195.500	
1.20.1.20.03.39.13. Pelaksanaan Peringatan Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah (Hardiknas, kebangkitan Nasional, hari Lahirnya Pancasila, HUT Proklamasi RI, Haornas, Hari kesaktian Pancasila, hari sumpah pemuda, hari Pahlawan, HUT NTT	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	10 hari besar Nasional	kota kupang dan papua	1.897.601.400	1.897.601.400	1.897.601.400	
Sasaran Daerah: Terwujudnya pematraan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				280.776.600	280.774.700	280.774.700	
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				95.110.000	95.110.000	95.110.000	

ner

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.06: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				17.100.000	17.100.000	17.100.000	-
1.20.1.20.03.06: BIRU KEUANGAN SETDA PROVINSI NTT				17.653.599.000	17.642.453.000	17.932.453.000	290.000.000
Agenda: Perubahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.03.01: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEKANTORAN				4.649.132.650	4.983.474.600	4.813.474.600	(170.000.000)
1.20.1.20.03.02: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				736.495.500	1.071.645.500	1.191.645.500	120.000.000
1.20.1.20.03.06: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				5.075.000	5.075.000	5.075.000	-
1.20.1.20.03.17: PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH				11.019.347.400	10.340.383.600	10.655.383.600	315.000.000
Tolak Ukur : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepada kepentingan publik							
Target Program: Tata Kelola Keuangan Daerah selama 12 Bulan setiap tahun							
1.20.1.20.03.17.01: Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja dan Pengkajian Standarisasi Sistem Perijinan				564.162.200	514.048.900	464.048.900	(50.000.000)
1.20.1.20.03.17.02: Penyusunan Ranperda tentang APBD dan Rancangan Daerah tentang Penjabaran APBD				1.822.622.200	1.838.150.200	1.838.150.200	-
1.20.1.20.03.17.03: Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran				1.238.534.900	1.237.334.900	1.237.334.900	-

me

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLOK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.17.04. Penyusunan Rancangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya buku Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 dokumen, 600 buku	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	1.041.768.700	1.041.768.700	1.041.768.700	-
1.20.1.20.03.17.05. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semester dan akhir tahun pelaksanaan APBD	7 dokumen	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	1.019.209.900	1.018.649.900	1.093.649.900	75.000.000
1.20.1.20.03.17.06. Penelitian, Penetapan, dan Penerbitan DPA dan DPPA	Tersedianya buku DPA TA. 2016 dan DPPA, SKPD TA. 2016 pada SKPD Provinsi	2 Dokumen, 400 buku		526.907.000	510.871.000	610.871.000	100.000.000
1.20.1.20.03.17.08. Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertaksananya inventarisasi data kerugian negara/daerah ; Terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dari penganggaran sampai pelaporan	1 dok ; 2 modul	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	2.132.344.500	1.411.184.500	1.411.184.500	-
1.20.1.20.03.17.12. Penausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah	Tertibnya pengelolaan kas bendaharawan SKPD dan kas BUD ; Tertibnya pengelolaan kas bendaharawan SKPD dan kas BUD ; Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan daerah dan tertaksananya penerapan accrual basis	4 triwulan ; 4 triwulan ; 2 dokumen	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	1.200.000.000	1.320.000.000	1.370.000.000	50.000.000
1.20.1.20.03.17.18. Penausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Tertaksananya koordinasi penatusahaan belanja PPKD	3 Dokumen	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	950.222.600	926.040.100	966.040.100	40.000.000
1.20.1.20.03.17.67. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertaksananya rapat tindak lanjut evaluasi APBD Ka/Kota dan rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah ; Tertaksananya rapat koordinasi pengelolaan DAK Tahun Anggaran berjalan dan persiapan tahun anggaran berikutnya ; Tertaksananya monitoring pengelolaan keuangan daerah dan monitoring DAK Provinsi dan Kab/Kota; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	1 kali, 1 dokumen ; 1 kali 1 dokumen ; 2 kali 2 dokumen	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	523.575.400	522.335.400	622.335.400	100.000.000
1.20.1.20.03.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./KOTA				1.243.548.450	1.241.874.300	1.266.874.300	25.000.000
Tidak Ukur : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota							
Target Program: Tata kelola keuangan kab/kota selama 12 Bulan							
1.20.1.20.03.18.02. Evaluasi Rancangan tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota dan Perubahan APBD Kab/Kota							
Terevaluasinya Rancangan tentang APBD dan Panperbup/Ranperda tentang APBD dan Panperbup/Ranperda tentang Penjabaran Perubahan APBD							
2 dokumen 22 Kab./Kota ; 2 dokumen 22 Kab./Kota				723.828.600	723.108.600	748.108.600	25.000.000
Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang							

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN/KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.18.03. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terevaluasinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Panperbup/Ranperwall tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen 22 Kab./Kota	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	349.640.000	349.285.850	349.285.850	-
1.20.1.20.03.18.04. Penyusunan Statistik Keuangan Daerah	Tersusunnya buku statistik keuangan daerah yang diperlukan oleh para stahoders	40 buku	Biro Keuangan Setda Prov. NTT-Kupang	170.079.850	169.479.850	169.479.850	-
1.20.1.20.03. BIRU ORGANISASI				2.600.297.000	2.600.297.000	2.932.487.450	332.190.450
Agenda: Penbenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				333.619.925	333.619.925	333.619.925	-
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				81.655.000	81.655.000	81.655.000	-
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				4.485.000	4.485.000	4.485.000	-
1.20.1.20.03.30. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETAHALUKSANAAN				786.459.875	786.459.875	1.118.650.325	332.190.450
Total Ukur : Meningkatkan efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah							
Target Program: Tingkat Efisiensi Kinerja Aparatur sektor 100%							
1.20.1.20.03.30.01. Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Anjab dan ABK Kabupaten /Kota	Terfasilitasinya Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan, Anjab dan ABK ; Terlaksananya Movev dan Pelaporan terpadu Bidang Organisasi ; Tersusunnya Data Base OPD	22 kab/kota ; 22 kab/kota ; 22 kab/kota ; 4 ranperda / ranpergub ; 4 ranpergub ; 1 kali (100 Orang)	22 kab/kota Jakarta dan 22 Kab/kota se-NTT dan SKPD Provinsi	311.404.000	248.298.000	248.298.000	-
1.20.1.20.03.30.02. Penataan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	Tersusunnya ranperda /ranpergub organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran ; Tersusunnya Ranpergub uraian tugas jabatan struktural pada SKPD Prov. NTT ; Terlaksananya rakor organisasi			263.666.400	326.372.400	658.562.850	332.190.450
1.20.1.20.03.30.03. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja SKPD Provinsi	Tersusunnya Laporan Anjab dan Peta Jabatan ; tersusunnya laporan ABK, Tersusunnya Laporan Evaluasi Jabatan	100% OPD baru tk Provinsi ; 100% OPD baru tk Provinsi ; 100% UPT Provinsi	kota Kupang, Jakarta	211.789.475	211.789.475	211.789.475	-
1.20.1.20.03.32. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK				1.394.077.200	1.394.077.200	1.394.077.200	-
Total Ukur : Tersedianya perangkat penilaian kinerja organisasi daerah							
Target Program: Tingkat Penilaian Kinerja Aparatur sektor 100 %							

ma

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/(BERKURANG) (Rp.)
1.20.1.20.03.32.10. Penyusunan LAKIP Gubernur, RKT dan PK Pemerintah Provinsi	Tersusunnya LAKIP Gubernur NTT tahun 2015 ; Tersusunnya RKT Gubernur NTT tahun 2016	1 dokumen ; 1 dokumen	Kupang dan Jakarta	232.820.000	232.820.000	232.820.000	-
1.20.1.20.03.32.11. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Tertibnya SDM Aparatur ; Tertibnya SDM tim SAKIP ; Terlaksananya money dan pembinaan SAKIP ; Tersedianya laporan money SAKIP	115 orang pada 50 SKPD ; 25 orang ; 22 kab/ kota ; 1 dokumen	Kupang, 22 Kab/Kota se NTT	91.245.200	91.245.200	91.245.200	-
1.20.1.20.03.32.17. Pembinaan dan Pengendalian Reformasi Birokrasi	Tersedianya fasilitas dan pembinaan RB di kab/kota ; Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan RB Provinsi (MPRB) Provinsi NTT ; Terlaksananya Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah	22 kab/kota (1 laporan) ; 1 kali/1 laporan ; 1 kali (210 orang/50 SKPD Provinsi dan 22 kab/kota)	Kupang, 10kab/Kota se NTT dan Jakarta	216.927.100	216.927.100	216.927.100	-
1.20.1.20.03.32.18. Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Tersedianya RanPembu SOP Administrasi Pemerintahan dinas-dinas daerah provinsi ; Terlaksananya Fasilitasi dan pembinaan Penerapan SOP dan SPM di Kab/Kota ; Tersusunnya Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM di Prov. NTT	1 Ranpembu (17 Dinas) ; 22 kab/kota ; 1 Laporan (10 Bidang SPM Provinsi dan 22 Kab/Kota)	Jakarta dan 22 Kab/Kota se NTT	166.068.500	166.068.500	166.068.500	-
1.20.1.20.03.32.19. Pengendalian Budaya Kerja	Jumlah kab/kota yang difasilitasi ; Laporan evaluasi pelaksanaan budaya kerja pemprov NTT ; Penandatangan Pakta Integritas ; Laporan pelaksanaan perjalanan dinas Pemprov NTT	18 kab/kota ; 1laporan ; 1 dokumen ; 1 laporan	Jakarta, Kupang dan 9 Kab/Kota	129.041.400	129.041.400	129.041.400	-
1.20.1.20.03.32.20. Penilaian Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik (UKRP)	Tersedianya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ; Terlaksananya Survey Indeks Pengabdian Masyarakat (IPM) ; Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Pelayanan Publik di tingkat kab/kota	2 SKPD Provinsi dan 9 kab/kota ; 1 SKPD Provinsi ; 9 kab/kota	Kupang, 8 Kab/Kota dan Jakarta	152.795.100	152.795.100	152.795.100	-
1.20.1.20.03.32.21. Penyusunan IKU Pemprov NTT dan IKU SKPD	Rancangan Keppub tentang IKU Pemprov NTT dan IKU SKPD yang telah ter revisi	2 Rankeppub	Kupang dan Jakarta	99.970.000	99.970.000	99.970.000	-
1.20.1.20.03.32.22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik ; Terlaksananya Pengelolaan Pengabdian Masyarakat melalui lokakarya pengelolaan Pengabdian masyarakat dan lokakarya analisis penyebab pengabdian masyarakat dan rencana tindak nyata ; Terlaksananya Bimtek Fasilitator Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi masyarakat ; Terlaksananya Coaching Clinic Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	30 orang ; 30 orang ; 30 orang ; 100 orang	SKPD Provinsi dan Jakarta	305.209.900	305.209.900	305.209.900	-
1.20.1.20.03. BIRO PEMERINTAHAN				2.916.267.000	2.891.457.000	4.080.741.950	1.189.284.950
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT			259.306.090	259.306.090	259.306.090	-
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				111.266.000	111.266.000	111.266.000	-
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				9.000.000	9.000.000	9.000.000	-

Wae

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET	KELUARAN/KEGIATAN	TARGET/KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUBNI (Rp.)	APBD MUBNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKEMBANG/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT				1.520.952.750	1.496.142.750	2.500.751.700	1.004.608.950
Tolak Ukur : Meningkatnya Kerjasama antar pemerintah daerah; Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan; Terkoordinasinya pengelolaan data pembihaan ketentraman dan ketertiban umum baik di Provinsi dan Kab/Kota							
TARGET PROGRAM: Kerjasama pemerintah daerah selama 12 bulan; Tereaksalainya permasalahan konflik pertanahan di Provinsi, Kab/Kota; Teridentifikasinya permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Prov dan Kab/Kota							
1.20.1.20.03.25.03. Penguatan Kembangan Kesejahteraan MPU, APSP, Tripartit dan Kerja Sama Provinsi Kepulauan	Rapat Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dan Rumpun Melanesia	MPU 4 kali, APSP 6 kali rapat dan Tri partiet 3 kali rapat, 2 dokumen ; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 1 dokumen		462.466.000	462.466.000	462.466.000	-
1.20.1.20.03.25.04. Koordinasi Pembentukan dan Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB)	Tertaksananya fasilitasi pengusulan pembentukan 8 calon daerah baru dan pemekaran kecamatan di 10 kab/kota se-Provinsi NTT	Dokumen usulan pemekaran calon daerah otonomi baru Kab. Adonara, Kota Maunere, Kab. Pantar, Kab. Amnatun, Kab. Amfoang, Kab. Sumba Timur Bagian Timur, Kab. Sumba Timur Bagian Selatan, Kab. Sumba Timur Bagian Barat, dan kecamatan di 5 kab/kota se-Provinsi NTT (Kec. Alor Barat Daya, Kec. Satermese, Kec. Larantuka, Kec. Bajawa, Kec. Omesuri)	22 kab / kota se Prov NTT dan Jakarta	716.524.000	691.714.000	856.199.950	164.485.950
1.20.1.20.03.25.05. Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi serta terinventarisasinya penyelesaian masalah-masalah pertanahan dan intervensi permasalahan ketentraman dan ketertiban se Prov NTT ; Tertaksananya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di provinsi dan 22 kab/kota	Tertentarnya masalah pertanahan dan ketentraman dan ketertiban di 22 kab/kota ; Terfasilitasinya pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan berupa di 22 kab/kota	22 kab/kota se Prov NTT dan Jakarta	341.962.750	341.962.750	1.182.085.750	840.123.000
1.20.1.20.03.33. PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH				1.015.742.160	1.015.742.160	1.200.418.160	184.676.000
Tolak Ukur : Terfasilitasinya semua kebutuhan tata kelola pemerintahan dan kebutuhan administrasi kependudukan dan Terpentuknya daerah otonomi baru prov, kab, kota							
TARGET PROGRAM: Koordinasi tata kelola pemerintahan dan kependudukan selama 12 Bulan dan makin tingginya tuntutan aspirasi rakyat (9 calon kab/kota dan prov)							
1.20.1.20.03.33.01. Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan pelantikan serta pelantikan Penjabat Bupati Flores Timur dan Lembata	Tertaksananya proses Administrasi pemilihan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di 9 kabupaten serta pelantikan Penjabat Bupati Flores Timur dan Lembata	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di 9 Kabupaten (TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Sabu Raijua) serta pelantikan Penjabat Bupati di Lembata dan Flores Timur	lembata; Flotim dan Kemendagri di Jakarta	116.000.000	116.000.000	300.676.000	184.676.000
1.20.1.20.03.33.02. Fasilitasi Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPRD Asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan Kab/ Kota se NTT	Tertentarnya dan terevaluasinya kelongkapan administrasi PAW anggota DPR, DPRD asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se NTT	Tersedianya Proses administrasi PAW anggota DPR, DPRD asal provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota sebanyak 50 orang	22 kab/kota se Prov NTT dan Jakarta	44.033.500	44.033.500	44.033.500	
1.20.1.20.03.33.10. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Tertaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Nota pengantar LKPJ tahun anggaran 2015 ; Tertaksananya Penyusunan LPD dan informasi LPD ; Tertaksananya Penyusunan EDOB ; Tertaksananya Penyusunan rancangan perda kewenangan provinsi dan kabupaten tahun 2016	Tersusunnya dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun 2015 dan pengantar LKPJ ; Tersusunnya dokumen penyusunan LPD, Terinformasinya ILPD melalui media massa cetak ; Laporan Evaluasi Daerah Otonomi Daerah Baru ; Tersusunnya Ranperda Naskah Akademik tentang	11 kab/kota dan Jakarta	624.763.660	624.763.660	624.763.660	

3

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SSSAAN DAERAH/PROGRAM/LOJAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APSD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.33.11. Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Tertaksananya rapat koordinasi sinkronisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil ; Tertaksananya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dan pengembangan data kependudukan di 22 kab/kota ; aparaturnya Peningkatan kapasitas aparaturnya pengelola SIAK melalui diklat	Terkordinasinya kebijakan kependudukan dan catatan sipil di 22 kab/kota ; 60 buku profil kependudukan ; 3 orang	23 kab/kota se Prov NTT dan Jakarta	230.945.000	230.945.000	230.945.000	-
1.20.1.20.03. BIRKO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT				3.897.810.000	3.897.810.000	3.897.810.000	-
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				301.220.800	302.385.200	302.385.200	-
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				82.625.900	82.625.900	82.625.900	-
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				17.100.000	15.935.600	15.935.600	-
Agenda: Pembedayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif							
1.20.1.20.03.42. PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				928.320.800	928.320.800	928.320.800	-
Tidak Ukur : Kerjasama Investasi, Pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan strategis daerah							
Target Program: Pengembangan perekonomian daerah melalui rapat koordinasi, SDA dan ketahanan pangan, Pembedayaan KI Bolok, KAPET Mbay							
1.20.1.20.03.42.01. Pengendalian dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Tertaksananya Rapat koordinasi pengembangan destinasi pariwisata ; Tertaksananya monitoring dan pemantauan pengembangan infrastruktur perhubungan	75 orang, 1 kali ; 22 kab/kota	kupang ; 22 kab / kota	-	-	-	-
1.20.1.20.03.42.02. Pemberdayaan Kawasan Industri/KI Bolok dan KAPET Mbay	Tertaksananya Rapat dengan BP-KAPET Mbay ; Tertaksananya Sosialisasi BP-KAPET Mbay ; Tertaksananya kajian ilmiah pengembangan KAPET Mbay sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ; Tertaksananya kajian revisi Perda Nomor 6 Tahun 1997 tentang KI Bolok ; Tertaksananya Revisi Perda No. 6 Tahun 1997 tentang KI Bolok	4 kali, 75 orang ; 2 kali, 75 orang ; 1 kajian ; 1 kali	kota kupang ; Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo ; kota kupang ; Jakarta	832.320.800	832.320.800	832.320.800	-
1.20.1.20.03.42.03. Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah	Tertaksananya Pembinaan dan Peningkatan Pengendalian Produktivitas SDA Tkt. Prov. Bersama Kab./kota ; Tertaksananya Review Tapal Batas Kawasan Hutan di NTT	1 kali, 100 orang ; 1 kali, 600 orang (60 orang)	kupang ; kupang	-	-	-	-

~

UNUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.03.42.05. Pengendalian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah	Tersusunnya himpunan peraturan dan kebijakan perundang-undangan pengembangan energi alternatif berbasis potensi lokal ; Tersusunnya himpunan peraturan dan kebijakan perundang-undangan pengembangan himpunan peraturan dan kebijakan perundang-undangan pembangunan ekonomi NTT berbasis maritim (Blue Economy)	1 buku ; 1 bu k u	kupang ; kupang	96.000.000	96.000.000	96.000.000	-
1.20.1.20.03.43. PROGRAM FASILITASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA				2.568.542.500	2.568.542.500	2.568.542.500	-
Total Ukur : Meningkatnya fasilitas kerjasama ekonomi dan pembinaan badan usaha							
Target Program: Pembinaan Badan Usaha, Kerjasama lintas Pemerintah Daerah, lembaga perekonomian dan keuangan, dan pengusaha							
1.20.1.20.03.43.01. Pengendalian Distribusi Komoditi Bersubsidi	Tersusunnya pengendalian inflasi daerah ; Terlaksananya koordinasi teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Prov. NTT ; Terlaksananya Rapat Evaluasi Raskin Semester I	1 kali rapat, 75 orang ; 1 kali ; 1 kali ; 75 orang	Kupang, NTB dan Jakarta ; 13 kabupaten ; kupang	530.352.500	530.352.500	530.352.500	-
1.20.1.20.03.43.02. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan	Tersusunnya Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tkt. Prov. NTT ; Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Lintas Wilayah ; Terlaksananya Rapat	1 kali 90 orang ; 1 kali 90 orang ; 1kali 35 orang ; 1 kali 20 orang	kupang ; kupang ; kupang ; kupang	294.002.000	294.002.000	294.002.000	-
1.20.1.20.03.43.03. Peningkatan Kerja Sama Ekonomi	Tersusunnya koordinasi dan konsultasi pengembangan kerja sama di bidang ekonomi ; Terlaksananya Rakornis pengembangan segitiga pertumbuhan ekonomi (Growth Triangle) bersama Kementerian Perencanaan RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kementerian Dalam Negeri ; Terselenggaranya kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah ;	1 kali ; 1 kali, 100 orang ; 4 kali, 40 orang ; 1 kali, 75 orang ; 1 kali, 3 Provinsi ; 2 naskah, 1BT Centre ; Kawasan Ekonomi Khusus ALTAKA, KI Bolok, KAPET Mbay ; 1 kali 75 Orang	Jakarta ; Jakarta ; kupang ; Kupang ; Bali, NTB, Jawa Timur ; kupang ; Provinsi NTT dan Luar Daerah ; kupang	1.744.188.000	1.744.188.000	1.744.188.000	-
1.20.1.20.03. BIRO UMUM				170.212.373.000	169.257.247.000	177.835.715.092	8.578.468.092
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya pematanaan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				33.484.517.200	33.039.341.200	33.122.486.200	83.145.000
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				126.137.275.800	125.657.325.800	133.632.648.892	7.975.323.092
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				18.000.000	18.000.000	18.000.000	-
1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				10.572.580.000	10.542.580.000	11.062.580.000	520.000.000
Total Ukur : Terafasilitasinya agenda kegiatan Gub & Wagub							
Target Program: Fasilitasi Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur selama 12 Bulan							
1.20.1.20.03.16.01. Koordinasi FORKOPIMDA, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya forum komunikasi pimpinan daerah Gubernur dan Wagub	Fasilitasi Kegiatan selama 12 bulan	22 kab/kota	1.940.000.000	1.940.000.000	2.190.000.000	250.000.000

~

URUSAN/SPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERTURUN (Rp.)
1.20.1.20.03.16.03. Peningkatan kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah	Tertaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya ; Tertaksananya pengamanan kunjungan kerja pejabat negara	1 paket ; 12 bulan	22 kab/kota	2.195.530.000	2.195.530.000	2.615.530.000	420.000.000
1.20.1.20.03.16.10. Penguatan Fungsi Keprotokoleran	Tertaksananya tugas keprotokoleran	1 paket	Kota Kupang	592.050.000	592.050.000	622.050.000	30.000.000
1.20.1.20.03.16.11. Peningkatan komunikasi TOMAS,pimpinan organisasi sosial/keagamaan dengan pemerintah	Tertaksananya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat ; Tertaksananya peringatan HUT RI dan HUT NTT	12 bulan ; 1 paket	Kupang	4.445.000.000	4.435.000.000	4.735.000.000	300.000.000
1.20.1.20.03.16.12. Kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tertaksananya kunjungan kerja inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 paket	22 kab/kota	1.400.000.000	1.380.000.000	900.000.000	(480.000.000)
1.20.1.20.04. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				57.802.282.000	55.335.176.000	59.097.176.000	3.762.000.000
Agenda: Perencanaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi							
1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASTAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				49.618.075.500	46.258.739.500	49.680.739.500	3.422.000.000
Tolak Ukur : Meningkatkan peran DPRD							
Target Program: Advokasi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui DPRD DPRD selama 12 Bulan							
1.20.1.20.04.15.06. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Tertaksananya Kunjungan kerja Anggota DPRD Prov.NTT	3 kunker oleh 65 Anggota DPRD dan 30 PNS pendamping ; 4 kunker oleh 5 Komisi didampingi 20 orang PNS serta 2 kaller kunker oleh 5 anggota Badan Kehormatan didampingi 1 PNS	22 kab/kota	5.910.594.000	5.176.444.000	6.081.054.000	904.610.000
1.20.1.20.04.15.07. Peningkatan Fungsi Pembuatan Perda Provinsi NTT	Tertaksananya proses pembahasan ranperda Usul Prakarsa & Ranperda yg diajukan eksekutif ; Tertaksananya hearing/dialog dengan pejabat Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama ;Tertaksananya kegiatan RESSES ; Tertaksananya kegiatan sosialisasi ranperda yang ditetapkan	Pembahasan Ranperda usul prakarsa : 2 buah dan Ranperda yg yang diajukan oleh Eksekutif : 15 buah ; 2 kali hearing/dialog di tiap kab/kota : 3 kali reses oleh 65 anggota DPRD dan 65 PNS pendamping ke 22 kab/kota ; 2 kali sosialisasi oleh 65 anggota DPRD dan 44 PNS pendamping	22 kab/kota	23.514.210.000	22.930.500.000	24.016.192.000	1.085.692.000
1.20.1.20.04.15.13. Peningkatan Fungsi Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Tertaksananya koordinasi/konsultasi pimpinan dan anggota DPRD ; Tertaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Bimtek: 1 kali, Rapat ADPS: 3 kali, konsultasi ke kementagri: 18 kali, konsultasi ke kementerian lainnya: 12 kali, konsultasi ke daerah lainnya: 8 kali, konsultasi/koordinasi dengan DPR RI: 2 kali,undangan mitra : 10 kali, Podstrbusian Produk Hsl Sdg:22 org x 3kl ; Peliputan dalam daerah: 2 kali, peliputan luar daerah:1 kali, pendampingan protokol: 1 kali, siaran langsung RRI : 10 kali, siaran tunda TV : 9 kali, dialog Interaktif Trilogik, RRI dan TVRI : 1 paket, pameran pembangunan : 1 kali, penerbitan buletin : 6 edisi, penanganan unjuk rasa : 15 kali, fasilitasi pertemuan : 12 kali	Luar Daerah NTT	17.765.548.500	15.751.072.500	17.182.770.500	1.431.698.000
1.20.1.20.04.15.14. Penyelenggaraan Rapat DPRD Provinsi NTT	Tertaksananya rapat alat kelengkapan dewan sesuai jadwal yang ditetapkan ; Tertaksananya rapat paripurna sesuai jadwal yang ditetapkan ; Tertaksananya kegiatan fasilitasi Fraksi	Rapat komisi : 40 kali, Gab.komisi : 6 kali, Bannus : 20 kali, Banleg : 35 kali, Rapim : 12 kali, Banggar : 30 kali, Rapat- Badan Kehormatan : 20 kali, Rapat Kerja : 2 kali ; Rapat- rapat paripurna : 44 kali, Rapat Paripurna istimewa 3 kali ; ATK dan makan minum untuk kegiatan 9 Fraksi	Kota Kupang	2.427.723.000	2.400.723.000	2.400.723.000	-

me

URUSAN/SDP/AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERTURUN (Rp.)
1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEKANTORAN				5.171.665.750	5.188.817.750	5.328.817.750	140.000.000
1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.988.540.750	3.863.618.750	4.063.618.750	200.000.000
1.20.1.20.04.06. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				24.000.000	24.000.000	24.000.000	-
1.20.1.20.05. INSPEKTORAT				9.679.688.000	9.679.688.000	9.691.688.000	12.000.000
Agenda: Pembentukan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Meningkatkan sistem akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur							
1.20.1.20.05.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUAKUAN KEPALA DAERAH				8.519.860.900	8.519.860.900	8.519.860.900	-
Tolok Ukur : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah							
Target Program: Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah selama 12 Bulan							
1.20.1.20.05.20.01. Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal	1. Jumlah LHP Kinerja Tingkat Provinsi; 2. Pemeriksaan Kinerja Tingkat Kab/Kota; 3. Review Laporan Keuangan Pemda Prov. NTT; 4. Pemeriksaan Kinerja pada Inspektorat Kab/Kota; 5. Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kab/Kota; 6. Fasilitas Penyusunan neraca, LRA dan Calk serta penutupan BKU; 7. Pemeriksaan pada Kantor Penghubung NTT di Jakarta; 8. 5. 1 Nota Dinas Pemeriksaan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis 6. 1 Nota Dinas Timau unit XIX Provinsi NTT di Kab.TTS; 9. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD lingkup pemerintah Prov. NTT; 10. 8. 1 LHP Evaluasi SAKIP pada Kabupaten; 11. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Apip dan BPK RI Tingkat Prov. NTT; 12. Rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Prov. Di Kab. TTU dan Manggarai Barat; 13. Rapat pra pemutakhiran data TLHP rtjen Kemendagri dan Kementerian teknis di Jakarta; 14.Rapat Regional pemutakhiran data TLHP rtjen Kemendagri dan Kementerian teknis di Jakarta; 15.Koordinasi pengawasan Tk. Prov. Di Kupang; 16. Koordinasiing bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTTtata naskah dinas ; Terlaksananya Diklat Manajemen Kepegawaian ; Terlaksananya Diklat pengadaan barang dan jasa ; Terlaksananya Diklat bendahara Pengeluaran ; Terlaksananya Diklat Pen	1. 49 LHP 2. 88 LHP 3. 1 Laporan 4. 22 LHP 5. 1 Nota Dinas 6. 1 Nota Dinas 7. 1 LHP 8. 1 LHP 9. 49 Laporan 10. 5 Laporan 11. 1 Laporan 12. 2 Laporan 13. 1 Laporan 14. 1 Laporan 15. 1 Laporan 16. 1 Laporan 17. 1 Laporan 18. 1 Laporan 19. 1 Laporan	Provinsi/Kab/Kota se NTT dan Kantor Penghubung di Jakarta	5.163.990.650	5.163.990.650	5.163.990.650	-
1.20.1.20.05.20.03. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah (2 Kab); 2. Terlaksananya Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota	1. 2 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 2. 22 Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Kabupaten Flores Timur dan Lembata	484.206.750	484.206.750	484.206.750	-
1.20.1.20.05.20.07. Pengawasan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS di Kab/Kota	10 Kab (Malaka,Alor,Lembata, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Barat, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua)	10 kabupaten	532.931.750	532.931.750	532.931.750	-

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SACABAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.05.20.09. Peningkatan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	LHP Khusus/Kasus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang	12 laporan	Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota	155.683.750	155.683.750	155.683.750	-
1.20.1.20.05.20.10. Pengawasan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah	Pemeriksaan program desa/Kelurahan mandiri anggur merah tahun 2016	22 Laporan Hasil Pemeriksaan	Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Kab/Kota	2.183.048.000	2.183.048.000	2.183.048.000	-
Sasaran Daerah: Terbangunnya sistem pengawasan internal pada setiap SKPD Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.05.21. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN				437.100.000	437.100.000	437.100.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya kemampuan aparat pemeriksa							
Target Program: Peningkatan kompetensi pemeriksa 1 paket							
1.20.1.20.05.21.01. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga fungsional auditor dan P2UPD	10 org	Bogor -Clawi dan Jakarta	437.100.000	437.100.000	437.100.000	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				554.859.100	554.859.100	566.859.100	12.000.000
1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				155.518.000	155.518.000	155.518.000	-
1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				12.350.000	12.350.000	12.350.000	-
1.20.1.20.06. KANTOR PENGHUBUNG				5.290.227.000	5.208.579.000	5.208.579.000	-
Agenda: Pembentukan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				3.353.079.000	3.353.079.000	3.353.079.000	-
1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.227.648.000	1.146.000.000	1.146.000.000	-
1.20.1.20.06.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				32.500.000	32.500.000	32.500.000	-

W

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR/PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUJUNI (Rp.)	ABPD MUJUNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.06.16. PROGRAM PENINGKATAN KERASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH RUSAT				105.000.000	105.000.000	105.000.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Daerah dengan Kementerian/Lembaga							
Target Program: Koordinasi Pembangunan dengan Kementerian/Lembaga selama 12 Bulan							
1.20.1.20.06.16.08. Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/mahasiswa, tokoh pers asal NTT se-Jabodetabek			Jakarta	105.000.000	105.000.000	105.000.000	-
1.20.1.20.06.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemerintah di Jakarta							
Target Program: Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan selama 12 Bulan							
1.20.1.20.06.16.07. Dialog/audiensi dengan Tokoh Dialog/audiensi dengan Tokoh tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat			Banten dan Batam	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-
1.20.1.20.06.16.09. Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah lainnya			Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta				-
1.20.1.20.06.25. PROGRAM PENINGKATAN KERASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT				272.000.000	272.000.000	272.000.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Daerah dengan Kementerian/Lembaga							
Target Program: Koordinasi Pembangunan dengan Kementerian/Lembaga selama 12 Bulan							
1.20.1.20.06.25.09. Fasilitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya			Jakarta, Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi	272.000.000	272.000.000	272.000.000	-
1.20.1.20.08. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				20.491.857.000	20.491.857.000	37.509.866.375	17.018.009.375
Agenda: Pemberian Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya aparatur yang profesional							
1.20.1.20.08.34. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASIAN				18.141.134.600	18.141.134.600	35.159.143.975	17.018.009.375
Tolak Ukur : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur							

~

[illegible]

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SSAS/AN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.08.17.64. Penyusunan potensi Penerimaan daerah, Pajak Daerah, dan Statistik Daerah	Terlaksana data/informasi potensi penerimaan daerah, pajak daerah dan statistik pendapatan daerah	Data potensi penerimaan daerah, pajak daerah dan statistik pendapatan daerah	307 Kecamatan, Provinsi 22 Kab./Kota dan Jakarta	99.007.900	99.007.900	99.007.900	-
1.20.1.20.08.17.65. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Terlaksana pengendalian dan pengawasan pendapatan aset daerah	Data pengendalian dan pengawasan pendapatan aset daerah	22 UPTD Kabupaten/Kota	642.417.000	692.617.000	692.617.000	-
1.20.1.20.08.17.66. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	Terlaksana tata kelola aset daerah secara akuntabel ; Terlaksana tata kelola pendapatan secara akuntabel	Peningkatan penerimaan daerah ; 22 UPT Kabupaten/Kota	Provinsi, 22 UPTD, 50 SKPD	9.037.345.996	8.475.147.200	9.071.647.200	596.500.000
1.20.1.20.08.17.67. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pendapatan dan aset Daerah	22 UPT Kabupaten/Kota	22 UPTD, 22 Kab./Kota dan Provinsi	866.286.250	688.170.650	688.170.650	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				11.791.520.375	11.806.594.950	11.806.594.950	-
1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				8.154.058.200	8.501.581.525	14.504.881.525	6.003.500.000
1.20.1.20.08.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				123.147.600	123.147.600	123.147.600	-
1.20.1.20.09. KANTOR PELAYANAN PERJINJAN TERPADU SATU PINTU				2.013.031.000	2.010.531.000	2.010.531.000	-
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				537.339.000	537.339.000	537.339.000	-
1.20.1.20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				206.700.000	206.700.000	206.700.000	-
1.20.1.20.09.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				19.000.000	19.000.000	19.000.000	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD							
1.20.1.20.09.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERJINJAN				770.000.000	767.500.000	767.500.000	-

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
Total Ukur : Meningkatkan pelayanan perijinan							
Target Program: Penerapan SPM Perijinan selama 12 bulan setiap tahunnya							
1.20.1.20.09.18.01. Pengembangan Pelayanan Perizinan	Tersedia media untuk menunjang pelaksanaan proses perizinan ; Tersosialisasi dan terpublikasinya peraturan perundang-undangan dan perkembangan PTSP ; Terselenggaranya kepastian dan ketepatan izin dan non izin yang dikeluarkan ; Adanya kepastian dan ketepatan izin dan Non izin yang dikeluarkan	Leaflet, poster, buku agenda kerja dan radio ; Perusahaan dan aparaturnya Kab. Malaka, 40 orang ; One top service dan 5 bidang pengawasan ; 1 dokumen	Provinsi dan 22 Kab/Kota	770.000.000	767.500.000	767.500.000	-
1.20.1.20.09.46. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERIJINAN				479.992.000	479.992.000	479.992.000	-
Total Ukur : Tersedianya data perijinan dan investasi							
Target Program: Penyediaan dana dan informasi investasi untuk publik 1 paket setiap tahunnya							
1.20.1.20.09.46.08. Pengembangan Data Base Pelayanan Perizinan	Tersedia pengumpulan kumpulnya data dan informasi perkembangan seluruh PTSP di Prov. NTT ; Tersusun standat pelayanan dan SOP ; pelaksanaan perijinan ; Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan	Data base investasi dan perijinan 22 Kabupaten/kota, 60 buku ; Dokumen Standar Pelayanan dan SOP ; Rekomendasi/tindak lanjut	Provinsi dan 22 Kab/Kota	479.992.000	479.992.000	479.992.000	-
1.20.1.20.10. SEKRETARIAT DEWAN KORPRI				2.686.842.000	2.686.842.000	2.897.292.800	210.450.800
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya aparaturnya yang profesional				2.042.677.600	2.042.677.600	2.253.128.400	210.450.800
1.20.1.20.10.38. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERUNDUNGAN KORPRI							
Total Ukur : Terselenggaranya pembinaan KORPRI							
Target Program: Peningkatan Kinerja KORPRI selama 12 bulan							
1.20.1.20.10.38.01. Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI	Terselenggaranya Rapat Kerja Dewan pengurus KORPRI se NTT	100 orang	Kota Kupang	186.676.300	186.676.300	186.676.300	-
1.20.1.20.10.38.02. Pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Budaya Tingkat Provinsi	Terselenggaranya pekan olahraga Tingkat Provinsi	520 Orang	Kupang NTT	806.929.500	806.929.500	1.017.380.300	210.450.800
1.20.1.20.10.38.03. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum PNS	terselenggaranya bintek tata cara beracara di pengadilan: -terselenggaranya bantuan hukum bg anggota KORPRI yg bermasalah: - tersosialisasi nya peraturan perUUan ttg KORPRI	1 M ; 30 Org; target bantuan hukum : 10 org PNS, target sosialisasi : 22 kab/kota	NTT	326.013.700	326.013.700	326.013.700	-
1.20.1.20.10.38.06. Pembinaan Rohani PNS	terselenggaranya penyiangan rohani bg anggota KORPRI Prov NTT	24 kali	Provinsi NTT	144.077.000	144.077.000	144.077.000	-
1.20.1.20.10.38.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	11 Kabupaten se NTT	11 Kabupaten se NTT	97.022.900	97.022.900	97.022.900	-
1.20.1.20.10.38.09. Updeting dan Validasi Data Anggota KORPRI Provinsi NTT	Terselenggaranya Updeting dan validasi Data Anggota KORPRI se NTT	14 Kab/kota; SKPD Prov, instansi vertikal, BUMN/BUMD; lembaga penyiangan daerah; BUD & lembaga hukum pendidikan &1 dokumen	14 Kabupaten dan SKPD se Provinsi NTT	136.881.350	136.881.350	136.881.350	-
1.20.1.20.10.38.10. Fasilitas Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI	terbentuknya Paduan Suara KORPRI Prov;	50 orang anggota PNS	Kota Kupang	148.240.000	148.240.000	148.240.000	-

nee

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
1.20.1.20.10.38.11. Sosialisasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	terfasilitasinya pelayanan BPJS bagi PNS lingkup Pemprov NTT;	150 orang PNS lingkup Pemrov. NTT	kota kupang dan Jakarta	-	-	-	-
1.20.1.20.10.38.12. Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun	Terlaksananya BIMTEK kewirausahaan bagi PNS Anggota KORPRI yang memasuki masa persiapan pensiun	2x dgn peserta 80 org	kota kupang dan Jakarta	122.695.000	122.695.000	122.695.000	-
1.20.1.20.10.38.13. Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI Provinsi NTT	Terlaksananya perayaan HUT KORPRI Tingkat Provinsi NTT	1 kali	Kota Kupang	74.141.850	74.141.850	74.141.850	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT 1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				454.273.126	454.273.126	454.273.126	-
1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				172.791.274	172.791.274	172.791.274	-
1.20.1.20.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.				17.100.000	17.100.000	17.100.000	-
1.20.1.20.11. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				11.052.185.000	11.052.185.000	12.376.185.000	1.324.000.000
Agenra: Pembedahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah Sasaran Daerah: Terwujudnya aparatur yang profesional 1.20.1.20.11.34. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN				216.229.500	216.229.500	240.893.800	24.664.300
Tolak Ukur : Meningkatnya profesionalisme pejabat fungsional PNS							
TARGET PROGRAM: 100%							
1.20.1.20.11.34. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya Rakor Tata Kelola Jabatan Fungsional dan Struktural ; Terlaksananya Bimtek Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional ; Terlaksananya Sekretariat Tim Penilaian Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ; Terlaksananya Workshop Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS melalui Jabatan ; Terlaksananya workshop Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS melalui Jabatan Fungsional tertentu.	110 PNS ; 50 PNS; 1 kegiatan : 50 PNS ; 5 Kegiatan untuk 300 PNS					-
1.20.1.20.11.34.08. Pendidikan Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS	Terlaksananya Workshop Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS melalui Jabatan Fungsional ; Terlaksananya Bimtek Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional ; Terlaksananya Bimtek Karya Tulis Ilmiah ; Terlaksananya Bimtek Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Pertanian ; Terlaksananya Bimtek Jabatan Fungsional Binaan Badan Kepegawaian Negara ; Terlaksananya Penilaian Jabatan Fungsional	20 PNS ; 20 PNS ; 20 PNS ; 20 PNS ; 20 PNS ; 1 kegiatan	Luar Daerah dan Kota Kupang	216.229.500	216.229.500	240.893.800	24.664.300
1.20.1.20.11.35. PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR				9.269.867.750	9.222.470.050	10.521.805.750	1.299.335.700
Tolak Ukur : Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Tolak Ukur : Meningkatnya Kinerja aparatur melalui pembinaan bidang kepegawaian Target Program: Tingkat Kinerja 90-95 %							

~

URISAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKURANG/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.11.35.02. Penerimaan Calon PNS, Calon Praja IPDN serta PNS Tugas dan Ijin Belajar	Terlaksananya proses seleksi CPNSO; Terlaksananya workshop persiapan teknis seleksi CPNS lingkup Pen Prov. Dan Kab/Kota se NTT; Terlaksananya seleksi PNS Tubel; Terlaksananya MOU dengan pihak PT tempat PNS Tubel; Terlaksananya pemberian bantuan Tugas Belajar; Terlaksananya proses seleksi Capra IPDN dan Pendampingan Capra IPDN ; Terlaksananya pemberian bantuan kepada Praja IPDN	7500 Orang ; 1 kegiatan ; 18 PNS; 4 dokumen MOU ; 49 PNS Tubel lanjutan dan baru ; 70 orang ; 70 orang	kota kupang dan luar Daerah	3.265.875.500	3.288.337.500	3.314.077.000	25.739.500
1.20.1.20.11.35.03. Penataan Sistem Administrasi Penempatan PNS dan Pensiun PNS	Terlaksananya proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT yang menjadi kewenangan Provinsi ; Terlaksananya proses penyelesaian administrasi Penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT yang menjadi kewenangan Provinsi dan alih status PNS ; Terlaksananya Proses Penyelesaian administrasi Pensiun PNS, Pensiun Janda/Duda dan Anak yang menjadi kewenangan provinsi ; Terlaksananya Proses Penyelesaian SK Kenaikan Gaji Berkala bagi Pelajar Eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTT ; Terlaksananya Proses Penyelesaian SK Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT ; terlaksananya proses penyelesaian administrasi kartu pegawai (KARPEG) PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ; Terlaksananya proses pengurusan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa percobaannya melebihi ketentuan ; Terlaksananya Bimtek Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Penempatan dan Pensiun PNS pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ; Terlaksananya Proses Penyelesaian SK Inpas014 dan 2015; 1380 guru SMA dan 375 org guru SMK;	3000 PNS yang akan memperoleh kenaikan pangkat periode April dan Oktober ; 750 PNS yang akan pindah tempat tugas ; 245 PNS ; 52 PNS Pelajar Eselon II yang akan memperoleh Kenaikan Gaji Berkala ; 85 PNS BKD Provinsi NTT yang mendapatkan kenaikan gaji berkala ; 192 PNS ; 2 CPNS ; 100 PNS ; 85 PNS BKD Provinsi NTT yang mendapat penyesuaian gaji	50 SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, 22 Kab/Kota se-NTT dan Denpasar serta Jakarta	950.371.400	905.619.400	905.619.400	-
1.20.1.20.11.35.04. Penataan Sistem Administrasi dan Informasi Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Penataan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ; Terlaksananya pengumpulan / pemutakhiran data PNS Prov & Kab/Kota se- NTT ; Terlaksananya penyebaran informasi tentang Peraturan Kepegawaian serta profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT ; Terlaksananya Master Plan Pola Pembinaan karier PNS ; Terlaksananya rekonsiliasi data base PNS Prov dengan BKN X Denpasar dan BKN Pusat Jakarta ; Terjaminnya keamanan website BKD Provinsi NTT; Terlaksananya proses penyelesaian standar pelayanan publik BKD Provinsi NTT ; Terlaksananya proses penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Terlaksananya proses penyusunan nominatif pegawai dan nominatif jabatan PNS di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT ; Terlaksananya proses KPE bagi PNS Prov NTT	100 % ; 100 % ; 2 kali/tahun ; 1 kegiatan ; 300 orang ; 4 plugins web security ; 1 dokumen ; 1 dokumen ; 2 dokumen ; 150 orang	54 SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, 22 Kab/Kota se-NTT dan Denpasar serta Jakarta	376.744.950	337.372.950	337.372.950	-
1.20.1.20.11.35.05. Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dengan masa pengabdian X, XX dan XXX tahun dan PNS Purna Bhakti ; Terlaksananya kegiatan verifikasi dan klarifikasi data usulan PNS penerima SLKS diSKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ; Terlaksananya kegiatan verifikasi dan klarifikasi data usulan PNS penerima SLKS di Kab/Kota se-NTT ; Terlaksananya kegiatan fasilitasi teknis administrasi pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi di Semilipres ; Terlaksananya kegiatan fasilitasi Penyelesaian SLKS di Kementerian Dalam Negeri ; Terlaksananya kegiatan motivation building bagi aparaturn Lingkup Pemprov,NTT ; Terlaksananya Bimtek pembentukan karakter aparaturn Lingkup Pemprov,NTT ; Terlaksananya penyediaan perangkat sistem aplikasi data base SLKS ; Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan	400 PNS berprestasi dan 260 orang Purnabakti ; 52 SKPD; 22 Kab/Kota se NTT ; 1 SK Presiden RI ; 400 sertifikat SLKS K,XX,XXX Tahun dan Lencana ; 400 Orang ; 50 Orang ; 1 paket ; 3 Kegiatan ;		444.918.000	466.918.000	466.918.000	-

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.11.35.06. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Tertaksananya penbenhentukan tim baperjaket dan fasilitasi teknis dan administrasi kegiatan baperjaket bagi PNS ; Tertaksananya Pembentukan Tim Baperjaket dan terfasilitasinya kegiatan Baperjaket serta Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Serta Calon Sekda Kab/Kota ; Tertaksananya kegiatan baperjaket dan fasilitasi teknis serta administrasi pengangkatan Pejabat Eselon II Kab/Kota ; Tertaksananya verifikasi administrasi usulan dan penetapan calon Sekda Kab/Kota se-NTT ; Tertaksananya pelaksanaan penilaian visi, misi dan pengangkatan Sekda Provinsi dan Kab/Kota ; Tertaksananya pembinaan dan pengembangan karier PNS Provinsi dan Kab/Kota ; Tertaksananya Penyusunan Pola Pembinaan Karier PNS ; Tertaksananya input dan validasi data pejabat struktural PNS Provinsi dan Eselon II, III Kab/Kota ; Melakukan Penilaian D33/Prestasi Kerja Eselon II lingkup Provinsi dan Bupati/Wakil Bupati Kab/Kota ; Tertaksananya penilaian prestasi kerja pejabat pimpinan tinggi dan pengawas Lingkup Pemprov. NTT dan Pejabat Negara Kab/Kota ; 014 dan 2015: 1380 guru SMA dan 375 org guru SMK; 1) 226 orang Tenaga pendidik dan kependidikan 2) 58 tenaga pendidik dan kependidik Luar Sekolah dan tenaga fungsional lainnya	4 x setahun ; 350 Calon Pejabat Struktural; 15 orang calon Sekda Kab/Kota ; 44 x setahun ; 5 Kali kegiatan verifikasi dan pemberkasan ; 3 Kab/Kota ; 52 SKPD dan 22 Kab/Kota ; 1 Keputusan Gubernur ; Unit/ SKPD Provinsi dan 22 Kab/Kota ; 50 SKPD Provinsi dan 22 Kab/Kota ; 350 Pejabat struktural ; 2 kali kegiatan dengan unit/skpd provinsi dan 22 kab/kota ; 6 orang asesor dan 7 orang calon asesor ; 25 Pim III 30 orang, Pim IV 90 orang ; 1 kali ; Eselon II 18 org, ikut seleksi, Eselon III 75 org ikut seleksi, Eselon IV 120 org ikut seleksi ; 1094 Pejabat struktural ; 22 Kab/Kota se-NTT ; 6639 File arsip PNS ;	(blank)	2.307.510.900	2.299.775.200	3.299.775.200	1.000.000.000
1.20.1.20.11.35.07. Peningkatan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Tertaksananya pemeriksaan dan penyidikan terhadap laporan kasus PNS ; Tertaksananya proses penanganan PNS yang bermasalah ; Tertaksananya koordinasi dengan unit, kejaksan, pengadilan dan Lapas serta Departemen di pusat terkait penyelesaian kasus ; Tertaksananya Rapat Dewan Kepegawaian (RDK) ; Tertaksananya Workshop Peraturan Disiplin dan Sengketa Kepegawaian bagi PNS ; Tertaksananya klarifikasi kasus-kasus PNS di Kab/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur ; Tertaksananya SIDAK Kehadiran PNS di semua SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota se-NTT serta Kantor Perwakilan NTT di Jakarta ; Tertaksananya presentasi hasil evaluasi kehadiran PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1 paket ; 80 kasus ; 5 kali ; 3 kali pertahun ; 100 PNS ; 22 Kab/Kota se-NTT ; 8 kali ; 2 kali/tahun	Luar Daerah , Kabupaten/Kota se NTT	536.653.500	536.653.500	536.653.500	-
1.20.1.20.11.35.09. Ujian Dinas dan Kenalan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS	Tertaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijazah di Prov dan Kab/Kota se NTT ; Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan pameran layanan kesejahteraan bagi PNS ; Tertaksananya fasilitasi teknis penyetoran dana Taperum PNS di Bapertarum Pusat ; Tertaksananya Munas / Rakor Taperum PNS di Bapertarum Pusat ; Tertaksananya rekonsiliasi setoran tabungan perumahan tingkat Provinsi ; Tertaksananya koordinasi teknis cuti diluar tangungan Negara di BKN X Denpasar	2 kali di Kab/Kota se-NTT ; 2 kali pertahun ; 2 kali ; 1 kali ; 2 kali pertahun ; 2 kali ; 2 kali	kota Kupang an Luar Daerah	199.301.900	199.301.900	312.801.900	113.500.000
1.20.1.20.11.35.10. Pelayanan dan Rekonsiliasi Bantuan Perumahan Bagi PNS	Pelayanan dan Rekonsiliasi Bantuan Perumahan bagi PNS	(blank)		246.491.600	246.491.600	246.491.600	-

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOUAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	PERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.20.1.20.11.35.11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi kinerja PNS Provinsi NTT yang ditempatkan pada UPT dan Kantor Penghubung di Jakarta ; Tertaksananya monitoring, evaluasi kinerja pegawai ; Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi kinerja PNS Tugas Belajar/jin Belajar dan Praja IPDN asal Provinsi NTT ; Tertaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan bidang kepegawaian pada instansi terkait ; Tertaksananya proses tindak lanjut terhadap hasil temuan Inspektoral, RUEN DEPDAGRI dan BPK RI ; Tertaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kepegawaian Tahun 2016	2 kail/tahun pada 22 Kab/kota se-NTT dan Kantor Penghubung Jakarta ; 4 kail/tahun ; 16 Daerah (15 luar daerah dan 1 kota kupang) ; KEMEMPAN & RB RI ; KEMENDAGRI, BKN Jakarta dan BKN X Denpasar ; 3 dokumen ; kabupaten Lembata ;	Luar Daerah, Kab/kota se-NTT dan 54 SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	942.000.000	942.000.000	1.102.096.200	160.096.200
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.20.1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.080.713.550	1.102.440.250	1.102.440.250	-
1.20.1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				459.682.000	469.282.000	469.282.000	-
1.20.1.20.11.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				25.692.200	41.763.200	41.763.200	-
1.21.1.21.01. BADAN KEJAMANAN PANGAN DAN PENYULUHAN				7.758.994.000	7.758.994.000	8.183.994.000	425.000.000
				7.758.994.000	7.758.994.000	8.183.994.000	425.000.000
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				661.325.600	668.972.000	668.972.000	-
1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				262.400.000	262.400.000	262.400.000	-
1.21.1.21.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				23.000.000	23.000.000	23.000.000	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan pangan provinsi, penanganan daerah rawan pangan, penyediaan informasi pasokan harga dan akses pangan serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan							
1.21.1.21.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN				4.562.358.400	4.554.712.000	4.979.712.000	425.000.000
Tidak Ukur : Meningkatkan cadangan ketahanan pangan masyarakat; Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan; Meningkatnya informasi pasokan, harga dan akses pangan; Meningkatnya pengawasan dan pembinaan ketahanan pangan							
Target Program: cadangan ketahanan pangan 140 ton; Persentase penanganan daerah rawan pangan 80%; Persentase penyediaan informasi pasokan dan harga dan akses pasar 100%; Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80%							

na

URUSAN/SCGD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
1.21.1.21.01.16.02. Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan	Tertaksananya Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat serta pembinaan ketersediaan pangan; - ; Tertaksananya pemantauan dan analisis kerawanan pangan Transien dan Kronis serta rekomendasinya ; Tertaksananya penanganan kerawanan pangan kronis melalui Pelatihan FSVA untuk 4 Cluster, apresiasi dan pengembangan Kawasan Mandiri pangan, Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan Menuju Desa Sejahtera dan pertemuan nasional	129 kelompok di 22 kab/kota ; 375 orang di 15 kabupaten, dan 129 Kel di 22 Kab/kota ; 12 laporan Neraca Bahan Makanan ; 22 Kab/kota ; 12 bulan ; Pelat FSVA 4 cluster 21 Kab ; pertemuan 2 kali, pembinaan kawasan 1 kali, DMP 1 kali dan DMF-DS 2 kali, pertemuan Nasional ;	22 Kabupaten / kota; dan Kabupaten Kupang, TTU, Alor, Flores Timur, dan Sumba Timur ; - ; 22 Kab/kota; Luar Daerah : 22 Kab/kota ;175 kel pada 20 kawasan di 12 Kab dan 717 kel di 151 desa di 22 kab/kota	1.114.138.400	1.114.138.400	1.114.138.400	-
1.21.1.21.01.16.03. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Tertaksananya pertemuan kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan tingkat provinsi ; Tertaksananya koordinasi kajian rantai pasokan dan pemasaran ; Tertaksananya pertemuan evaluasi dan pelatihan bagi pendamping, pengurus LDPM tingkat Provinsi ; Tertaksananya pemantauan sarana prasarana distribusi pangan ; Adanya pemantauan kondisi harga pada HBKN ; Tertaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat ; Tertaksananya panel harga pangan; Tertaksananya pembinaan kelompok LDPM	1 kali pertemuan, 30 orang ; 1 kali pendataan, 40 orang ; 1 kali evaluasi ; 2 kali pemantauan ; 4 kali pemantauan ; 3 kali pemantauan, 1 kali analisis ; 48 panel harga mingguan ; 2 kali pembinaan ;	22 Kabupaten / kota, Luar Daerah : - ; - ; 22 kabupaten / kota	700.000.000	700.000.000	700.000.000	-
1.21.1.21.01.16.04. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tertaksananya monitoring, Evaluasi Program ketahanan pangan dan penyuluhan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta koordinasi pelaporan e-money online kementerian maupun e-money sesuai PP. 39 ; Tertaksananya updating dan penyajian data ketahanan pangan dan penyuluhan melalui website serta partisipasi pada pelatihan website dan statistik ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat nasional ; Tertaksananya pertemuan Evaluasi Tahun 2015, Sinkronisasi Tahun 2016, dan Perencanaan Tahun 2017 Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, serta Partisipasi Provinsi NTT pada Evaluasi tahun 2015, Sinkronisasi Tahun 2016, dan Penyusunan Rencana Kerja (e-proposal) Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2017 ; Tertaksananya Operasional Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi NTT; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	2 kali pelaksanaan monitoring Evaluasi, 12 bulan pelaporan e-money kementerian, serta 4 laporan triwulan e-money PP39 ; 1 kali, 22 kab/kota; 12 bulan penyajian melalui website; 2 orang pelatihan teknis website, dan apresiasi statistik ketahanan pangan dan penyuluhan 3 kementerian ; 1 kali pertemuan, 120 orang di Manggarai Barat; 2 kali di 3 kementerian, 6 orang; serta 1 kali advokasi penyusunan program / kegiatan (e-proposal) di 22 kab/kota ; 1 kali pertemuan tingkat provinsi, 75 orang; 1 kali pembinaan DKP Kab/kota	22 Kabupaten / Kota, Luar Daerah	1.225.000.000	1.225.000.000	1.250.000.000	25.000.000
1.21.1.21.01.16.10. Pembinaan Mutu dan Ketahanan Pangan	Tertaksananya sidang pengawasan pangan segar serta analisis mutu pangan; Tertaksananya survey dan analisis pola konsumsi pangan untuk pengukuran keseimbangan konsumsi gizi masyarakat; Tertaksananya optimalisasi peran Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah; Tertaksananya pameran pangan lokal NTT Tahun 2016; Tertaksananya puncak peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi NTT dan partisipasi pada Hari Pangan Sedunia dan pameran pangan lokal tingkat nasional; Tertaksananya pembinaan dan Pengembangan kelompok KRPL; Tertaksananya apresiasi penyusunan menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); Terasilisasinya lomba pengembangan menu konsumsi B2SA berbasis sumberdaya lokal; Tertaksananya sosialisasi konsumsi pangan lokal	3 kali sidang pangan segar di Kota Kupang, 1 kali di Kab. Perbatasan, 1 kali di Lokasi HPS; 1 kali survey dan analisis; Operasional OKKPO 12 Bulan, dan 100 sertifikat ekspor produk pangan unggulan; 1 kali pameran, TTU; 1 kali kegiatan HPS di TTU, luar NTT; 22 Kab/kota; 44 kelompok; 30 orang, 1 kali; 1 kali, 22 tim PKK;	22 Kabupaten / Kota, Luar Daerah; 22 Kabupaten / Kota; Kota Kupang; TTU; 22 Kabupaten / Kota; Kota Kupang; Kota Kupang; se-Daratan Sumba	1.523.220.000	1.515.573.600	1.915.573.600	400.000.000
Sasaran Daerah: Meningkatkan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kompetensi tenaga penyuluh serta peran dan fungsi BP3K, Postudes dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan k							
1.21.1.21.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN USAHA/TANI				2.249.910.000	2.249.910.000	2.249.910.000	-
Tolak Ukur : Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan; Meningkatkan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Pos Penyuluhan Desa (posludes) dan Kelompok Tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan k Target Program: 70% atau 1.752 orang; 296 unit dan 17.695 kelompok tani; 80% atau 245 unit							

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/LOKASI UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURRI (Rp.)	APBD MURRI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.21.1.21.01.15.01. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh dan Pendamping Petani Pelaku Agribisnis	Tertaksananya pelatihan teknis budi daya pertanian bagi tenaga penyuluh di 3 rayon ; Tertaksananya penyelenggaraan penyuluhan telekonferensi kelompok petani dan kelompok petani ; Tertaksananya penyuluhan budidaya pertanian bagi masyarakat pesisir / nelayan ; Tertaksananya workshop penilaian angka kredit bagi penyuluh pertanian	3 kali pelatihan ; 3 sektor, 9 kategori ; 1 kali penyuluhan ; 22 kab/kota	22 kab/kota; Luar Daerah	755.500.000	755.500.000	755.500.000	-
1.21.1.21.01.15.02. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Tertaksananya penyuluhan peningkatan kapasitas kelembagaan petani (lokatan, gapoktan) ; Tertaksananya pendataan, verifikasi dan updating data poktan dan gapoktan ; Tertaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan (BP3K) dan Pos Penyuluhan Desa (Posludes) ; Terdapat kelembagaan tani hutan di 22 kab/kota ; Tertaksananya penyelenggaraan penyuluhan kehutanan ; Tertaksananya penyuluhan penerapan teknologi kehutanan	22 kab/kota ; 19.215 kelompok ; 22 kab/kota; 308 BP3K; 44 Posludes ; 70% ; 16 lokasi: 2 kali ; 22 kab/kota, 44 BP3K	22 Kab/Kota ; - ; 22 Kab/Kota ; - ; Lokasi : Kupang, TTU, Malaka, Alor, Fiotim, Lembata, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Maba, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua ; 22 kab/kota	784.940.000	784.940.000	784.940.000	-
1.21.1.21.01.15.07. Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Tertaksananya kegiatan identifikasi/verifikasi data sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan ; Tertaksananya penyuluhan melalui media elektronik (siaran pedesaan) ; Tertaksananya Apresiasi Simbul Perikanan dan Simbul Pertanian	22 Kab/Kota, 1 kali ; 24 kali ; 2 kali 2 orang	22 Kab/Kota; Luar Daerah	209.470.000	209.470.000	209.470.000	-
1.21.1.21.01.15.10. Penyuluhan Pemastan Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Tertaksananya pertemuan saling tukar menukar informasi antar UP-FMA serta koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ; - ; Tertaksananya temu teknis penyuluhan di 22 kab/kota ; Tertaksananya pertemuan penyusunan program penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten / kota dan Kecamatan	1 kali pertemuan di 6 BP3K serta 4 kali dalam setahun ; - ; 22 BP3K ; 2 kali pertemuan	Belu, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, dan Sumba Barat, serta Luar Daerah ; 22 Kabupaten / Kota dan Luar Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.336.410.000	9.336.410.000	10.324.939.800	988.529.800
1.22.1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA				9.336.410.000	9.336.410.000	10.324.939.800	988.529.800
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
1.22.1.22.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				711.783.750	616.317.750	616.317.750	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya pematatan kelayanan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.22.1.22.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.197.246.700	2.153.100.000	3.091.629.800	938.529.800
1.22.1.22.01.06. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPOARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				21.850.000	21.850.000	21.850.000	-
Agenda: Agenda Khusus							
Sasaran Daerah: Menurunnya angka kemiskinan penduduk dari 20,03% menjadi 15%							
1.22.1.22.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEDESAAN				4.023.944.550	4.095.116.250	4.145.116.250	50.000.000
Tidak Ukur : Jumlah masyarakat desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa							
Target Program: Motivasi masyarakat yang ikut berpartisipasi di 3.245 Desa/Kelurahan							

W

URUSAN/SCPD AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERTURUNGAN (Rp.)
1.22.1.22.01.15.01. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Tertaskannya lomba desa/kelurahan Tk.Provinsi dan Nasional. ; Tertaskannya temu tugas para kepala desa dan kelurahan yang juara tingkat Provinsi NTT ; Tertaskannya lomba posyandu Tk.Kec, Kab/Kota & 1 kail tingkat nasional ; 88 Orang Kader Posyandu ; 1 Kail kegiatan, 126 Orang kader Posyandu	1 kail tingkat provinsi, 1 kail tingkat nasional ; 44 aparat desa/Kel. ; 1 kail tingkat provinsi (1224 kader posyandu) dan kegiatan, 126 Orang kader Posyandu	22 Kabupaten/Kota, Jakarta ; 22 Kab/Kota ; Kota Kupang ; Kota Kupang	1.395.478.550	1.395.478.550	1.395.478.550	-
1.22.1.22.01.15.02. Partisipasi Keluarga Dalam Pembangunan Melalui PKK	Tertaskannya pembentukan masyarakat yang berdaya melalui TP-PKK	200 TP-PKK	22 Kab/Kota	1.848.500.000	1.848.500.000	1.848.500.000	-
1.22.1.22.01.15.03. Pendampingan dan Koordinasi Pelaksanaan PNPM	Tertaskannya Pendampingan dan Koordinasi Pelaksanaan GSC Aparat Pengelola Kabupaten (BPMPPD) Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kel. Faikab, Fakelab, Fasilitator Kec. ; Tertaskannya Pendampingan, Koordinasi Penyelesaian Kasus dan Pendataan Aset PNPM.	Pelaku PNPM-GSC, 78 Kecamatan, 868 Desa/Kelurahan ; 1 kail ke 12 kabupaten, 2 kail ke 9 kabupaten bermasalah	10 Kabupaten (Kab. Kupang, TTU, Belu, Malaka, Flores Timur, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Timur, Lembata, Rote Ndao) ; 21 kabupaten kota se Prov NTT	222.000.000	222.000.000	222.000.000	-
1.22.1.22.01.15.04. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pokja Desa Mandiri Anggur Merah	Tertaskannya anggota pokja yang memahami pengelolaan dana bergulir Program Desa Mandiri Anggur Merah ; Tertaskannya pelatihan pengembangan usaha bagi 23 kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat (UEM) se Provinsi NTT	1 kail pelatihan untuk 24 orang ; - 1 kail pelatihan 45 orang di Kab. Ende pelatihan 24 orang di Kabupaten Sumba Timur	kab Belu ; Ende, Sumba Timur	354.700.000	354.700.000	354.700.000	-
1.22.1.22.01.15.05. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terpadu	Tertaskannya monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang program BPMPPD ; Tertaskannya Rapat Koordinasi BPMPPD se-Provinsi NTT, dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	2 kail per kabupaten ; 1 kail, 52 orang aparatur BPMPPD (22 orang kepala kantor/kabag/Pendes dan 26 prang Kasubag PDE kab/kota)	22 Kabupaten ; kab Ngada	203.266.000	274.437.700	324.437.700	50.000.000
1.22.1.22.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI DAN APARATUR DESA				1.881.585.000	1.950.026.000	1.950.026.000	-
Tolak Ukur : Jumlah kader/aparatur desa yang dilatih							
Target Program: Jumlah Desa yang memiliki Lembaga CPPD/Unit Usaha Pangan Desa							
1.22.1.22.01.16.01. Pengembangan Musrenbang Desa Berspektif Anak	Tertaskannya kegiatan pengembangan musrenbang desa berspektif anak	3 dDesa 60 Orang	Desa Goloros (Kab.Manggarai Timur), Desa Maturuli (Kab Sumba Tengah), Desa Lendola (Kab.Alor)	185.779.000	185.779.000	185.779.000	-
1.22.1.22.01.16.02. Pengembangan Kembangkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.	Tertaskannya pembentukan dan pengembangan kelembagaan CPPD ; Tertaskannya Pelatihan bagi 20 orang pengurus BUM Desa	1 kail kegiatan (37 Orang pengelola CPPD) ; 1 kail pelatihan untuk 20 orang	kab TTU	248.300.000	248.300.000	248.300.000	-
1.22.1.22.01.16.03. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tertaskannya pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi sekretaris desa ; Tertaskannya Bimtek bagi aparatur desa dan pengelola profil desa/kelurahan	7 kabupaten (145 orang sekdes) ; 3 Kail Pelatihan (66 orang)	Kupang, Sikka, Manggarai Barat, dan Sumba Barat Daya ; Kab. Sikka, Sumba Timur, Kota Kupang,	756.007.000	824.448.000	824.448.000	-
1.22.1.22.01.16.05. Pengembangan Sekolah Aplikasi Lapangan bagi aparatur Pendes dan Kader	Tertaskannya pelatihan bagi anggota BPD. Tertaskannya Pelatihan Penataan Keuangan dan Aset Desa ; Tertaskannya Pelatihan Manajemen siaga dan jejaring siaga	40 orang ; 80 orang (bendahara desa) ; 25 orang peserta (Pengurus desa siaga dan Kader Posyandu)	Belu, Ende, Sumba Timur	531.499.000	531.499.000	531.499.000	-
1.22.1.22.01.16.10. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BB-GRM)	Tertaskannya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Rontong	3.000 orang unsur pemerintah dan masyarakat	Kab.Sumba Timur	160.000.000	160.000.000	160.000.000	-
1.22.1.22.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN TEKNOLOGI PEDESAAN				500.000.000	500.000.000	500.000.000	-

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BER TAMBAH/BERKURANG (Rp.)
Tolak Ukur : Jumlah kelompok UKM/Kelompok Usaha Perempuan dengan penggunaan TTG							
Target Program: Kelompok pengguna TTG 705 Kelompok							
1.22.1.22.01.17.01. Pelaksanaan Pekan gelar TTG dan IPTEK Nasional	Tertaksananya pelatihan TTG bagi masyarakat UKM ; Tertaksananya gelar TTG Tingkat nasional dan provinsi	1 kali pelatihan 30 orang ; 1 kali tingkat provinsi, 1 kali tingkat nasional	1 kali kota Kupang ; Sumba Timur dan Prov Gorontalo	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-
1.22.1.22.01.17.02. Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Masyarakat	Tertaksananya pelatihan Pembuatan Peralatan Teknologi TG di Balai Mocibaki ; Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan aparat petugas mampu menyerap teknologi Biogas dan Pompa hidram	35 unit ; 5 orang	Kupang ; Subang (Prov Jawa Barat)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
1.24. KEARSIPAN 1.24.1.24.01. BADAN ARSIP DAERAH				2.468.845.000 2.468.845.000	2.468.845.000 2.468.845.000	2.468.845.000 2.468.845.000	-
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya aparatur yang profesional							
1.24.1.24.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR				594.465.000	594.465.000	594.465.000	-
Tolak Ukur : Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya arsip							
Target Program: Pembinaan Arsiparis di SKPD							
1.24.1.24.01.20.01. Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi	Tertaksanya pembinaan sistem kearsipan pola baru; tertaksanya temu teknis jabatan fungsional arsiparis/calon arsiparis dan penilaian jabatan fungsional arsiparis; terpilihnya pejabat fungsional arsiparis tingkat Provinsi yang memiliki Profesionalisme; tertaksanya Bimbingan teknis kearsipan bagi sekretaris/ruah; tertaksanya rujukan teknis pengelolaan arsip inaktif bagi 4 orang arsiparis dan pengelola arsip	SKPD terkait; 20 orang arsiparis; 3 orang arsiparis; Sekdes/Sektur pada Desa Mandiri Anggur Merah; 4 orang pengelola arsip	Provinsi dan Kab/Kota; Jakarta dan Manggarai dan TTS	395.715.000	395.715.000	395.715.000	-
1.24.1.24.01.20.02. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengelola arsip; tertaksanya pemantauan pengawasan dan pelaksanaan pencetakan sistem kearsipan	22 Kab/Kota; 22 Kab/Kota	Provinsi dan 22 Kab/Kota	198.750.000	198.750.000	198.750.000	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEKANTORAN				514.000.710	513.999.910	513.999.910	-
1.24.1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				170.440.000	170.440.000	170.440.000	-
1.24.1.24.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				23.400.000	23.400.800	23.400.800	-
1.24.1.24.01.15. PROGRAM PENINGKATAN SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN				1.166.539.290	1.166.539.290	1.166.539.290	-
Tolak Ukur : Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya arsip							
Target Program: Pembinaan Arsiparis di SKPD							

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/ISSUASIAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
1.24.1.24.01.15.03. Penelusuran Citra Budaya Daerah tentang Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Tertaksananya Penelusuran sejarah lisan Tokoh2 agama, masyarakat & Organisasi; tertaksananya Penelusuran Citra Budaya tentang keunikan Daerah; tertaksananya penarikan arsip status (asset dan pemerintahan) Provinsi dan Pusat; tertaksananya Daftar Inventaris Tokoh Pemerintahan dan Pahlawan; tertaksananya Akuisisi dan penilaian arsip status; tertaksananya pembuatan arsip media baru melalui pengalihmediaan; tertaksananya fumigasi dan tereproduksi Arsip pada Depo sementara	6 Kab. se Provinsi NTT; 15 Kab./Kota se Provinsi NTT; 15 Kab/Kota se Provinsi NTT; 1 Tokoh Pemerintahan dan Pahlawan; 6 SKPD Provinsi NTT; 250 Data arsip elektronik/digital; 2000 ML Gedung dan 250 ML arsip	Provinsi, Kab/Kota, Jakarta	378.527.490	378.527.490	378.527.490	-
Tolak Ukur : Tersedianya arsip daerah yang lengkap dan terkini							
Target Program: Tata kelola Arsip selama 12 bulan							
1.24.1.24.01.15.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Arsip	Tertaksananya penyuluhan masyarakat sadar arsip dan tertib arsip; tersedianya informasi kearsipan kepada penggunaan jasa kearsipan melalui buletin kearsipan; tertaksananya pameran arsip citra budaya NTT; tertaksananya pameran internal kearsipan; tertaksananya dialog interaktif tentang kearsipan; tertaksananya publikasi dan informasi kearsipan; terpublikasinya film-film dokumenter.	100 orang di 4 kab se NTT; 50 eksemplar buletin; 1 kali pameran di kota kupang; 1 kali pameran di kota kupang; 1 kali pameran di 2 kab se NTT.	Jakarta dan Kota Kupang; Jakarta dan Kota Kupang; Jakarta dan Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang; Jakarta, Kab. Manggarai (desa Carap Kec.Langke, Rembong) dan TTS (Desa Nule Kec. Amanuban barat)	254.589.000	254.589.000	254.589.000	-
1.24.1.24.01.15.02. Penataan dan Pengelolaan Kearsipan	Tertaksananya sosialisasi Perda kearsipan tentang penyelenggaraan kearsipan; tertaksananya lomba tertib arsip; tertaksananya pembuatan peraturan Gubernur NTT tentang pelaksanaan Perda no.3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kearsipan; meningkatkan koordinasi antar lembaga kearsipan Kabupaten/Kota se NTT; tertaksananya Penataan dan Pengelolaan arsip melalui proses pendataan,penataan, penilaian dan pemusnahan arsip inaktif di SKPD lingkup Prov. NTT dan UPTD serta KPUD se- NTT	25 orang di kabupaten Kupang; terpilihnya 3 SKPD sebagai pemenang dan tertaksananya koordinasi ke ANRI; peraturan Gubernur NTT tentang pelaksanaan PERDA No.3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan kearsipan; 1 kegiatan; tertaksanya pendataan/survei arsip 8 SKPD pendataan arsip penliu 4 KPUD Kab akuisisi dan penataan arsip di 10 SKPD (305) pendataan dan penataan arsip inaktif di 5 UPTD Dispenda (10 ml) dan penilaian arsip 100 boks	Provinsi, Kab/Kota, Jakarta dan Bandung	533.422.800	533.422.800	533.422.800	-
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.969.037.000	7.969.037.000	7.999.037.000	30.000.000
1.25.1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.864.145.000	3.864.145.000	3.894.145.000	30.000.000
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD							
1.25.1.25.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH				111.103.000	111.103.000	111.103.000	-
Tolak Ukur : meningkatnya kemampuan aparat pengelola komunikasi dan informasi							
Target Program: Tata kelola informasi publik selama 12 bulan							
1.25.1.25.01.17.01. Peningkatan Kemampuan Pengelola Informasi dan Komunikasi	Tertaksananya Pelatihan software dasar bagi aparatur Dinas Kominfo ; Tertaksananya Sertifikasi Tin Penilai Pranata Humas dan Pranata Komputer	1 kali, 25 org ; 1 kali, 3 org		111.103.000	111.103.000	111.103.000	-
1.25.1.25.01.18. PROGRAM KEBIA SAMPA INFORMASI DAN MEDIA MASSA				1.445.014.500	1.445.014.500	1.475.014.500	30.000.000
Tolak Ukur : Meningkatnya Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
Target Program: Tersedianya Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat							

W

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.25.1.25.01.18.01. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Informasi yang bersifat Penyuluhan	Terlaksananya Pameran HUT RI ; Terlaksananya Dialog Interaktif Televisi ; Terlaksananya Dialog Interaktif Radio ; Terlaksananya Radio Spot ; Terlaksananya Pekan Informasi Nasional ; Terlaksananya Pekan Informasi Daerah ; Penerbitan Bulletin Media Komunikasi ; Pembuatan Kalender ; Pembuatan Buku Agenda ; Pembuatan film dokumenter ; Pengolahan Data dan dokumentasi informasi publik; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	1 kali ; 2 kali ; 5 kali ; 2 kali ; 1 kali ; 1 kali ; 4 edisi ; 500 eksemplar ; 250 buah ; 1 paket ; 1 paket	Belu, Alor, Kupang, Ende, Sumba Timur, Rote, TTU, SBD, Nagekeo, Sikka, Yogyakarta, Jakarta	959.124.400	959.124.400	989.124.400	30.000.000
1.25.1.25.01.18.02. Pembinaan dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Bimtek dan Penguatan Internet bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum ; Terlaksananya Pembinaan Kelompok Media Tradisional ; Terlaksananya Pembinaan Komposdes ; Terlaksananya penilaian terhadap fungsional pranata humas ; Bimtek pengelolaan website berbasis CMS versi 2.5 ; Pelatihan pengelolaan website SKPD berbasis CMS versi 2.5	1 kali, 250 orang (Flotim, Ende, Rote Ndao, TTS, TTU) ; 1 kali, 100 orang (Ende, Manggarai, Sumba Barat Daya, Rote Ndao TTU, TTS, Manggarai, SBD, Alor, Jakarta ; 1 kali, 75 orang (Alor, Manggarai, TTS) ; 1 kali bimtek ; 1 kali pelatihan	Kota Kupang, Flotim, Ende, Rote Ndao, TTU, TTS, Manggarai, SBD, Alor, Jakarta	278.713.500	278.713.500	278.713.500	-
1.25.1.25.01.18.03. Pengembangan E - Government Provinsi NTT	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan data Provinsi dan Kab/Kota berbasis TIK ; Terlaksananya Sosialisasi Penerapan E-Government bagi pemangku kepentingan di daratan Timor ; Terlaksananya Pelayanan Website Dinas Kominfo Prov. NTT, Aplikasi Sipim dan Layanan SMS Gateway	7 kabupaten/kota ; 1 kali sosialisasi ; 100 %	Kota Kupang, Sikka, Flotim, Sumba Tengah, TTS, TTU, Kota Kupang	137.412.600	137.412.600	137.412.600	-
1.25.1.25.01.18.04. Pengawasan Penerapan Standar Teknis dan Standard Pelayanan Alat/Perangkat Postel di NTT	Terlaksananya Sosialisasi Norma Standar Prosedur Kriteria	100%	Kota Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Manggarai, Flotim, Sumba Timur, Manggarai Barat, Ende	69.764.000	69.764.000	69.764.000	-
1.25.1.25.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				601.790.900	601.790.900	601.790.900	-
Tolak Ukur : Berkembangnya kerjasama informasi dan komunikasi							
Target Program: Meningkatkan Informasi yang dipublikasikan lewat media massa							
1.25.1.25.01.20.01. Kerjasama Kemitraan Dengan Lembaga Informasi Masyarakat	Terlaksananya Pembentukan Komunikasi Sosial Pedesaan(Komsodes) ; Terlaksananya Pembentukan media tradisional ; Terlaksananya Dialog Publik ; Terlaksananya Pertunjukan ; Terlaksananya Pemutaran Film	100 % ; 3 kelompok media ; 3 kali ; 3 kali ; 6 kali	Kab. Sikka, Maabar, Lembata, Alor, TTS, TTU, Belu, Sumba Timur	187.291.400	187.291.400	187.291.400	-
1.25.1.25.01.20.02. Pengembangan Informasi Pedesaan	Terlaksananya survey dan sosialisasi pembangunan jaringan networking ; Terlaksananya Rakor Kominfo ; Monitoring dan evaluasi Layanan Informasi	4 kali survey dan sosialisasi di 4 kabupaten perbatasan (Kab Kupang, Belu, TTU, Malaka) ; 1 kali ; 6 kabupaten	Kabupaten Kupang, Belu, Malaka, TTU, Sikka, Ende, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Jakarta	414.499.500	414.499.500	414.499.500	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya 1.25.1.25.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT			904.198.200	904.198.200	904.198.200	-
1.25.1.25.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				755.288.400	755.288.400	755.288.400	-
1.25.1.25.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KELUARAN				46.750.000	46.750.000	46.750.000	-

nan

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.25.1.25.02. KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK				2.757.133.000	2.757.133.000	2.757.133.000	
Agenda: Perbenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Meningkatkan ketepatan dalam peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat							
1.25.1.25.02.15: PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI				413.488.500	413.488.500	413.488.500	
Tolak Ukur : Meningkatnya penggunaan TIK dalam pelayanan daerah							
TARGET PROGRAM: Pelayanan TIK selama 12 bulan							
1.25.1.25.02.15.01. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	(1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan TIK bagi SKPD Provinsi/Kabupaten/K ; (2) Terlaksananya Pengumpulan, updating dan analisis data informasi	(1) 1 Laporan Pembinaan TIK (2) 1 kali sosialisasi jaringan LAN lingkup SKPD Provinsi NTT (50 orang) (3) Pemangangan jaringan untuk 5 titik hotspot ; (1) 1 Laporan Pengumpulan Updating dan Analisis Data (2) 1 Aplikasi sistem basis data (3) 1 Aplikasi SDDKN (4) 1 Aplikasi PPID	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, SBD, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka, Jakarta, Makassar	331.731.300	331.731.300	331.731.300	
1.25.1.25.02.15.02. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu sistem teknologi informasi dan komunikasi	1 laporan hasil monev	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, SBD, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka	81.757.200	81.757.200	81.757.200	
1.25.1.25.02.18. PROGRAM KERUA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA				604.811.500	604.811.500	604.811.500	
Tolak Ukur : Jangkauan informasi pembangunan sampai di kab/kota							
TARGET PROGRAM: Jangkauan informasi pembangunan di kab/kota selama 12 bulan							
1.25.1.25.02.18.01. Penybarisan Informasi Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Informasi yang Berifat Penyuluhan	(1) Terlaksananya publikasi informasi melalui media website www.nttprov.go.id ; (2) Terlaksananya pembangunan situs web Kantor PDE, Dinas Pertanian Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perernakan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindag, Dinas Perikanan Kelautan	(1) www.nttprov.go.id ; (2) 7 situs web dan 1 kali pelatihan (14 org peserta)	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, SBD, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka, Jakarta, Yogyakarta	158.152.500	158.152.500	158.152.500	
1.25.1.25.02.18.03. Pengembangan e- Government Provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah Bidang TIK ke XII di Kabupaten Belu dan pengembangan aplikasi perkantoran elektronik di Kantor PDE Provinsi NTT ;	1 Laporan Rekomendasi pengembangan e-Government dan 1 aplikasi perkantoran elektronik	Kab. Belu dan Kota Kupang	446.659.000	446.659.000	446.659.000	
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya Pemerintah Provinsi NTT							
1.25.1.25.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.248.684.750	1.248.684.750	1.248.684.750	

nan

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.25.1.25.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				482.244.250	482.244.250	482.244.250	-
1.25.1.25.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				7.504.000	7.504.000	7.504.000	-
1.25.1.25.03. SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH				1.347.759.000	1.347.759.000	1.347.759.000	-
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak di bidang penyiaran							
1.25.1.25.03.17. PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH				907.837.350	907.837.350	907.837.350	-
Total Ukur : Kinerja Informasi Publik selama 12 bulan							
Target Program: Meningkatnya peran KPID di daerah							
1.25.1.25.03.17.03. Kegiatan Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran di Provinsi NTT	Tertfasilitasinya proses pertizinan lembaga penyiaran ; Terlaksananya rapat pengawasan tzn penyelenggaraan penyiaran ; Terlaksananya workshop evaluasi kinerja penyelenggaraan penyiaran ; Terlaksananya workshop penguatan kapasitas SDM penyiaran ; Terlaksananya KPID NTT Award ; Terlaksananya proses pemilihan anggota KPID Provinsi NTT periode 2016- 2019 ; Tersedianya honorarium Komisioner KPID dan tenaga tidak tetap	3 kali ; 9 Kabupaten/kota ; 1 kali, 50 orang ; 1 kali, 100 orang ; 1 kali ; 12 BULAN	Jakarta ; Kupang	806.337.350	806.337.350	806.337.350	-
1.25.1.25.03.17.04. Peningkatan Kualitas Saran Lembaga Penyiaran dan Mewujudkan Masyarakat Cerdas serta Kritis Media	Terlaksananya literasi media bagi siswa dan guru ; Terlaksananya sosialisasi P3 dan SPS ; Terbentuknya komunitas kritis media	2 kali, 100 orang ; 1 kali, 60 orang ; 2 kelompok komunitas TV dan Radio	Kota Kupang dan Belu	101.500.000	101.500.000	101.500.000	-
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
1.25.1.25.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				257.043.450	257.043.450	257.043.450	-
1.25.1.25.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				181.115.950	181.115.950	181.115.950	-
1.25.1.25.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				1.762.250	1.762.250	1.762.250	-
1.26. PERPUSTAKAAN				4.194.926.000	4.194.926.000	4.194.926.000	-
1.26.1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH				4.194.926.000	4.194.926.000	4.194.926.000	-
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							

me

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEJUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PRAS MURNI (Rp.)	APRD MURNI (Rp.)	PRAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1.26.1.26.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				899.928.850	899.928.850	899.928.850	-
1.26.1.26.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				670.672.550	670.672.550	670.672.550	-
1.26.1.26.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				32.000.000	32.000.000	32.000.000	-
Agenda: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan							
Sasaran Daerah: Meningkatkan mutu dan layanan pelayanan perpustakaan							
1.26.1.26.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBIYAHAN PERPUSTAKAAN/PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA				2.592.324.600	2.592.324.600	2.592.324.600	-
Tolak Ukur : Terdapatnya masyarakat yang gemar membaca bagi masyarakat							
Target Program: Terlaksananya Pemasyarakatan minat baca							
1.26.1.26.01.15.01 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya Pustaka Anak/Story Telling ; Terlaksananya Lomba minat baca bagi pelajar, Mahasiswa, Organisasi Profesi, dan Masyarakat umum ; Terlaksananya lomba penyusunan sinopsis ; Terlaksananya lomba bercerita ; Terselenggaranya Pemilihan Duta Baca Anak dan Remaja ; Terlaksananya Lomba Berpidato bagi siswa SLTA ; Terlaksananya Lomba Pustakawan Teladan ; Terlaksananya Pemilihan Pengelola Perpustakaan Terbaik ; Terlaksananya Lomba Penulisan Karya ilmiah Perpustakaan ; Terlaksananya lomba Perpustakaan Terbaik ; Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan keliling ; Terlaksananya Lomba Taman baca ; Terlaksanya Security book ; Apresiasi kepada Pemustaka ; Terselenggaranya Promosi dan publikasi perpustakaan ; Terlaksananya Pameran Buku ; Tersedianya SDM Pelestarian	5000 anak TK/ PAUD ; 22 kab/ Kota ; 25 Siswa SMP se Prov. NTT ; 25 Siswa SMP se Prov. NTT ; 22 Anak dan Remaja ; 22 siswa ; 22 pustakawan ; 22 pengelola ; 22 karya tulis ; 21 Perpustakaan ; 21 Perpustakaan keliling ; 15 Taman Baca ; Pengamanan 10.000 buku ; 12 Pemustaka Terbaik Yang memanfaatkan jasa layanan Perpustakaan (P2) ; 1.500 koleksi ; Peningkatan 1 SDM Pelestarian Bahan Pustaka	Kota Kupang ; Jakarta	630.344.900	630.344.900	630.344.900	-

ura

URUSAN/SPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APSD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURUPANG (Rp.)
2.01.2.01.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN / PEMBIBITAN				5.194.302.480	5.102.287.480	5.102.287.480	-
Tolak Ukur : Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit sesuai kebutuhan							
2.01.2.01.01.19.01. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi	Sasaran Daerah: Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahanan pangan nasional Target Program: ketersediaan bibit untuk 21 kab/kota Target Program: 51,14% Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani	Benih tanaman pangan dan hortikultura di 22 Kabupaten/Kota ; 5 komoditi di 22 Kabupaten/Kota ; 250 Ha di 9 Kabupaten ; 500 Ha di 13 Kabupaten ; 35 Ha di 3 Kabupaten ; 50 Ha di 3 Kabupaten ; 10 Ha di 2 Kabupaten ; 36 Ha ; Tanaman buah dan sayuran	881 Nobeaki Kupang, BBU Bulsan Rote Ndao, BBU Iewa Sumba Timur, BBU Waimanu Sumba Tengah, BBU Lembor Mabur ; 881 Tarus, 881 Mbay, BBU Magepanda Sikka, BBU Bulsan Rote Ndao, BBU Waimanu Sumba Tengah, Kebun Dinas Anakoli Nagekeo	5.194.302.480	5.102.287.480	5.102.287.480	-
2.01.2.01.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN PERKEBUNAN				37.549.358.200	36.844.457.000	33.013.093.000	(3.831.364.000)
Tolak Ukur : Luas lahan komoditi perkebunan yang berteknologi							
2.01.2.01.01.17.01. Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani	Tertaksana Lomba dan penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis tanaman pangan ; Tertaksana Lomba UPJA berprestasi ; Tertaksana Lomba P3A tingkat provinsi dan pusat ;	22 Kabupaten/Kota, 42 pok, ; 22 Kabupaten/Kota, 66 pok ; 22 Kabupaten/Kota, 110 pok P3A	42 kelompok tani di 22 Kabupaten/Kota ; 22 kabupaten/kota		371.268.000	371.268.000	-
2.01.2.01.01.17.02. Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	Tertaksananya Intensifikasi, pemerajaan/perluasan tanaman kopi, kakao, kelapa, jambu mete, cengkeh, tembakau ; Tertaksana Pengelolaan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) ; Tertaksana Pengembangan tanaman kebun dinas	Intensifikasi kopi 150 Ha, kakao 200 Ha, kakao 350 Ha, kelapa 600 Ha, jambu mete 500, cengkeh 200 Ha dan tembakau 200 ha ; 200 Ha dan 125 petani ; 7 kebun dinas	TTS, Alor, Ngada, Manggarai, Ende, Mabur, Fiodim, Sikka, Lembata, Sumba Timur, Sumba Barat, Kab. Kupang, Nagekeo, Sarai, Malaka, Belu, Sumba Tengah, Matim, SBO,	9.422.453.400	8.296.153.400	8.130.153.400	(166.000.000)
2.01.2.01.01.17.03. Pemasaran Produk Pertanian Unggulan Daerah	Tertaksana Pemasaran produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan Daerah ; Tertaksana keikutsertaan Pameran buah ; Tertaksananya Publikasi, siaran pedesaan melalui Radio dan Media Massa.	3 Pameran lokal dan expo ; 3 Erend pameran dan expo ; Petani dan pelaku agribisnis di 22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota		421.983.000	421.983.000	-
2.01.2.01.01.17.04. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi	Tertaksana pelatihan pembuat pupuk Bokashi ; erfaksana surveillance II, sertifikat pertanian organik sub sektor hortikultura dan perbunan serta surveillance III pertanian organik sayur dan jambu mete ; Tertaksana SL di 5 kabupaten ; Kelompok tani di 7 kabupaten ; 1 lokasi Asintan Transpiater ; Tertaksana Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) kakao ; Tertaksana Pengendalian hama Oryctes pada tanaman kelapa ; Tertaksana Pengendalian hama PBK pada tanaman kakao ; Tertaksana SL Pengendalian Hama Terpadu (PHT) padi, jagung, jeruk ; Tertaksana Gerakan SPOT STOP pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura ; Tertaksana Demplot Jagung sistem Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) ; Tertaksana Pengembangan Klon-klon ubi jalar sebagai calon varietas unggul nasional	3 kali ; 9 kali ; 5 kali ; 3 kelas di 3 Kabupaten ; 200 ha di 4 22 kabupaten/ kota Kabupaten/Kota ; 30 Ha di Kabupaten Sikka ; Kelompok tani di 5 kabupaten ; Kelompok tani di 7 kabupaten ; 1 lokasi demplot ; 1 Ha di tiga lokasi		1.154.669.200	1.090.593.200	1.090.593.200	-

me

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURINI (Rp.)	APBD MURINI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKURANG/BERKURANG (Rp.)
2.01.2.01.01.17.05. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Pertebunan	Tertaksana Pengadaan Asintan, peralatan bengkel dan sarana kerja petugas bengkel ; Tertaksana Pemeliharaan Asintan/traktor ; Tertaksana Penyelesaian kontribusi jasa Asintan pola KSO ; Penyediaan sarana produksi kebun dinas dan perlengkapan kantor/mess dan laboratorium ; Tertaksana Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi ; Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) ; Verifikasi penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi ; Penyediaan prasarana dan sarana produksi untuk BBU dan BBI ; Penyediaan prasarana dan sarana produksi untuk BBH ;	Kelompok tani di 22 Kabupaten/Kota, 42 unit traktor roda dua, 45 unit pompa air, 1 paket peralatan bengkel, 8 unit kendaraan roda 2 dan 1 paket sarana kerja petugas ; Aset daerah/kantor dinas, 4 unit traktor roda empat dan 1 unit traktor roda dua ; 13 Kabupaten/Kota ; 11 kebun dinas dan laboratorium agens hayati, kantor dan mess ; 22 Kabupaten/Kota ; KPPP Provinsi NTT ; RDKK 22 Kabupaten/Kota ; 4 BBU dan 3 BBI ; 7 BBH ;	22 Kabupaten/Kota ; BBU/BBI	26.272.235.600	25.603.389.400	21.913.025.400	(3.690.364.000)
2.01.2.01.01.17.06. Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian	Tertaksana sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota	1 kali, 22 Kabupaten/Kota	Kupang		361.850.000	361.850.000	-
2.01.2.01.01.17.07. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertaksana monitoring dan evaluasi program/kegiatan pertanian dan pertebunan, pemutakhiran data aset ; Pengumpulan, validasi, tabulasi dan penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan pertebunan ; Penyusunan data base Asintan ; Identifikasi dan pemutakhiran data kelompok P3A, dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	22 Kabupaten/Kota ; 22 Kabupaten/Kota ; 22 Kabupaten/Kota ; 16 kabupaten	22 Kabupaten/Kota	700.000.000	699.220.000	724.220.000	25.000.000
2.01.2.01.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA				11.483.505.500	12.114.204.500	12.111.954.500	(2.250.000)
Total Ukur : meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; Produkt tanaman pangan							
Target Program: 14.500 ha							
2.01.2.01.01.18.01. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis	Tertaksana Pelatihan manajer UPJA ; Tertaksana Pembinaan pengembangan pemanfaatan Asintan ; Terselenggara Pengawalan LM3 dan PUAP ; Tertaksana Pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen tanaman pangan dan pertebunan (jagung, padi, pisang) ; Tertaksana Pelatihan pemanfaatan air ; Tertaksana Pembinaan dan pembentukan P3A/GP3A ; Bimtek penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan ; Tertaksana penanganan pasca panen, pendampingan dan pengalihan kelapa dan jambu mete	Para manajer UPJA sedaratan Sumba, 25 Orang ; 22 Kabupaten/Kota ; 7 Kabupaten LM3, 21 Kabupaten PUAP ; 22 petani dan pelaku usaha di 3 Kabupaten, 60 orang ; Maba, Sumba Timur, Belu ; TTS, Matim, Kabupaten, 60 orang ; 4 Kabupaten, 80 orang	22 Kabupaten/Kota ; Kota Kupang, Belu ; TTS, TTU, Ngada, Ende, SBD (LM3) ; Maba, Sumba Timur, Belu ; TTS, Matim, Kabupaten, 60 orang ; 4 Kabupaten, 80 orang		635.759.000	635.759.000	-

Wac

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN/KEGIATAN	TARGET/KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.01.2.01.01.18.03. Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura	Intensifikasi dan pengembangan kawasan jagung ; Intensifikasi Padi ; Intensifikasi kedelai ; Intensifikasi kacang tanah ; kacang hijau; Terlaksananya pengembangan produk unggulan hortikultura (jeruk), tanaman obat (jahe) dan sayuran (bawang merah, cabe, kentang, wortel)	6.500 Ha Intensifikasi di 11 Kabupaten dan 7.500 Ha pengembangan kawasan di 8 Kabupaten ; 1.400 Ha di 6 Kabupaten ; 90 Ha di 3 Kabupaten ; 50 Ha di 3 Kabupaten ; 20 Ha di 3 Kabupaten ; Jeruk 30 ha, Jahe 17 ha, bawang merah 76 ha, cabe 32 ha, kentang 5 ha, wortel 10 ha	Intensifikasi Padi : Kab. Kupang, Rote Ndao, Malaka, Sumba Tengah, Sikka, Nagekeo ; Intensifikasi Jagung Non Kawasan : Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Sarai, Sumba Timur, Sumba Tengah, Lembata, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Mabar ; Intensifikasi Jagung Kawasan Pengembangan : Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, SBD, Fiotim, Sikka, Nagekeo ; Intensifikasi Kedelai : Kab. Ngada, Manggarai dan Mabar ; Intensifikasi Kacang : Kab. SBD dan Sumba Timur ; TTS, Rote Ndao, Kab. Kupang, Kota Kprang, Belu, Sikka, Manggarai, Nagekeo, SBD, Ende, Belu	11.483.505.500	11.478.445.500	11.476.195.500	(2.250.000)
2.01.2.01.02. DINAS PETERNAKAN				39.090.574.000	39.090.574.000	36.164.074.000	(2.926.500.000)
Agenda: Perbenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
2.01.2.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.161.851.400	1.236.357.600	1.284.857.600	48.500.000
2.01.2.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				224.903.000	187.703.000	187.703.000	-
2.01.2.01.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				15.406.000	15.406.000	15.406.000	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan pendapatan peternak							
2.01.2.01.02.21. PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN				6.352.909.600	6.331.057.800	6.331.057.800	-
Tolak Ukur : Meningkatkan populasi, produkt dan produktifitas ternak							
Target Program: jumlah Populasi Ternak Sapi 974.971 Ekor; pengadaan bibit sapi sebanyak 390 Ekor							

me

URUSAN/SKOP/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK URUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEJARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.01.2.01.02.21.03. Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak	Tertaksananya pengadaan ternak sapi bali ; Tertaksananya pengadaan ternak sapi ongle ; Tertaksananya pengadaan ternak kambing PE ; Tertaksananya pengadaan ternak Kerbau ; Tertaksananya pengadaan ternak Babi ; Tertaksananya pengadaan semen beku ; Tertaksananya pengadaan Nitrogen cair dan container ; Tertaksana pengadaan mesin minilab Nitrogen cair ; Tertaksananya pengadaan Hormon PGF2a ; Tertaksananya Operasional pelaksanaan inseminasi Buatan ; Tertaksananya pertemuan teknis bibit ternak ruminansia, pertemuan evaluasi PSDS dan workshop petugas IB, PKB, ATR, dan P3M ; Tertaksananya pengadaan bahan pengolah limbah peternakan ; Tertaksananya pengadaan ternak babi, kambing PE dan unggas untuk kelompok tani ternak ; Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan ternak untuk kelompok tani ternak ; Tertaksananya Pengadaan alat ukur sapi (tongket ukur stiales steel dan peralatan aplikasi) ; Tertaksananya Pembangunan Konstruksi biogas ; Pelatihan Ketrampilan Teknis bagi Petugas Teknis IB dan Manajemen Pembibitan ; 014 dan 2015; 1380 guru SMA dan 375 org guru SMK; 1) 226 o	220 ekor ; 220 ekor ; 110 ekor ; 44 ekor ; 160 ekor ; 2.000 dosis ; 1.500 liter/20 unit ; 1 unit/Kapasitas 40 liter perhari ; 500 dosis ; 500 dosis ; 1 kali ; 1 kali ; 1 paket ; 45 kelompok ; 1 paket ; 1 paket ; 1 unit ; 16 orang ; 4 orang	Instalasi Lili, Besipae ; Instalasi Waihbur ; Instalasi Sunlil ; Instalasi Laura ; Instalasi Tarus ; Disrak NTT ; Instalasi Tarus, Sunlil, Lili, Besipae, Boawae, Kabaru dan Waihbur ; Instalasi Boawae ; Boawae	6.352.909.600	6.331.057.800	6.331.057.800	(3.000.000.000)
2.01.2.01.02.21.02. PENGGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan Obat-obatan dan Vitamin untuk Ternak di Instalasi ; Tertaksanaaynngan pengadaan pakan ternak babi ; Tertaksananya pengadaan pakan dedak mineral untuk sapi ; Tertaksananya pengadaan pakan konsentrat ternak kambing ; Tertaksananya panen benih dan pengawetan pakan ; Tertaksananya penanaman dan pengolahan HPT lamtoro tarumba di kelompok tani ;	1 paket ; 254,850 kg ; 22.688 kg ; 5.663 kg ; 162,5 Ton ; 50 kelompok	Instalasi Tarus, Lili, Sunlil, Besipae, Boawae, Kabaru, Waihbur dan Laura ; Instalasi Tarus dan Boawae ; Instalasi, Lili, Besipae, Boawae, Kabaru dan Waihbur Kondamaloba ; Instalasi Sunlil, Besipae dan Boawae ; Instalasi Tarus, Lili, Sunlil, Besipae, Boawae, Kabaru dan Waihbur Kondamaloba ; Kab/Kota se NTT	4.408.640.250	4.408.928.850	4.408.928.850	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-
2.01.2.01.02.22.01. PENCEGAHAN DAN PENYAKIT TERNAK	Tertaksananya pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin ternak ; Tertaksananya pendistribusian vaksin dan obat-obatan ternak ; Tertaksana pelatihan petugas vaksinasi dan inseminator (IB)	1 paket ; 22 kab/Kota ; 152 orang	Disrak Prov. NTT ; 22 kab/Kota	3.594.280.000	3.594.280.000	3.594.280.000	-

2002

URUSAN/SEPO/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR/PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.01.2.01.02.22.02. Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan Hewan dalam Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	Tertaksananya Pengadaan bahan obat-obatan hewan dan kedokteran hewan ; Tertaksananya vaksinasi dan pengobatan ternak besar ternak kecil dan unggas dan monitoring pos vaksinasi ; Tertaksananya Pembinaan Pos Kesehatan Hewan dan Pelatihan Kader Kesehatan Hewan dan Kesmayet, pelayanan vaksinasi dan pengobatan ; Tertaksananya pelatihan bedah di rumah sakit hewan di pusat ; Tertaksananya Pengadaan alat laboratorium kesman dan kesmayet (paket) ; Tertaksananya Pengadaan bahan dan peralatan diagnosa laboratorium kesman dan kesmayet (paket) ; Tertaksananya Pengujian laboratorium kesman dan kesmayet (paket) ; Tertaksananya pengadaan alat-alat kedokteran hewan (paket)	1 paket ; 21 Kabupaten 1 Kota ; 21 Kabupaten 1 Kota ; 4 orang ; 4 orang ; 1 paket ; 1 paket ; 1 paket ; 1 paket	UPT Veteriner dan Rumah sakit hewan Disnakh Prov NTT ; 22 Kabupaten/kota	814.360.250	814.648.850	814.648.850	-
2.01.2.01.02.23. PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PETERNAKAN				1.921.156.750	1.905.413.750	1.930.413.750	25.000.000
Total Ukur : Meningkatnya pengawasan lalu lintas ternak antar pulau							
Target Program: jumlah ternak yang dihantar pulbukan sebanyak 60.000 Ekor							
2.01.2.01.02.23.01. Peningkatan Surveillance Penyakit, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	Tertaksananya pelatihan kader kesehatan hewan dan kesmayet (orang) ; Tertaksananya Survei dan diagnosa penyakit hewan (sampel) ; Tertaksananya Pembinaan laboratorium kesman dan kesmayet ; Tertaksananya Dokumen Sistem Mutu Daging ; Terpeliharanya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab	220 orang ; 8000 sampel ; 18 Kab 1 Kota ; 1 Dokumen ; 1 Paket	Kota Kupang ; 21 Kabupaten 1 Kota se NTT ; 12 kab dan 1 kota se NTT ; UPT Veteriner dan Rumah sakit hewan Disnakh Prov NTT ; UPT Veteriner dan Rumah sakit hewan Disnakh Prov NTT	468.218.000	468.218.000	468.218.000	-
2.01.2.01.02.23.02. Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah	Terselenggara pengawasan lalu lintas antar pulau setiap tahun. ; Tertaksana peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka kerjasama antar daerah	Ternak Sapi 60.000 ekor, Kerbau 7.000 ekor, Kuda 5.000 ekor, Kambing 12.000 ekor, daging 150 ton, telur 1.680 ton dan kulit 90 ton. ; 1 Tindakan/ikut Kesepakatan kerjasama DKI-NTT	22 Kabupaten/Kota	345.351.750	345.351.750	345.351.750	-
2.01.2.01.02.23.03. Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Tertaksananya sosialisasi Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak ; Tersiarinya informasi peternakan melalui media elektronik ; Tertaksananya kontes ternak dan pameran pembangunan peternakan ; Tertaksananya lomba kelompok petani peternak dan petugas berprestasi ; Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi harga komoditi peternakan melalui radio kepada peternak dan stakeholders ; Tertaksananya bimbingan teknis bagi 30 anggota kelompok agribisnis daging di kab/kota ; Tertaksananya bimbingan teknis bagi 30 anggota kelompok agribisnis Pakan di kab/kota setiap tahun.	66 Kelompok Tani ; 100 Naskah ; 40 peternak, 40 ekor sapi bali, 20 ekor sapi ongol, 20 ekor sapi kawin silang ; 21 Kabupaten 1 Kota ; 365 kali ; 30 orang anggota kelompok kelompok Pelaku Usaha Agribisnis Daging ; 30 orang anggota kelompok Pelaku Usaha Agribisnis Pakan	21 kabupaten 1 Kota se NTT ; kota Kupang, Pasar Ternak Campilong dan Dinas Peternakan/Yang menangani Fungsi Peternakan kab/kota ; Kota TTS dan Rote Ndao ; Kab. Belu dan Sumba Barat Daya	808.507.000	792.764.000	792.764.000	-
2.01.2.01.02.23.04. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tertaksananya sosialisasi dan penerapan kartu ternak ; Tertaksananya pengumpulan analisis, dan penyajian data statistik peternakan ; Morev Terpadu dalam rangka perencanaan ; Tersedianya data inventaris dan verifikasi aset (buku); dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	21 Kabupaten 1 Kota	Dinas peternakan/yang menangani fungsi peternak Kabupaten/kota dan BPS Kab/KotaSe- NTT ; 22 kabupaten / kota	299.080.000	299.080.000	324.080.000	25.000.000
2.02. KEHUTANAN 2.02.2.02.01. DINAS KEHUTANAN				19.411.916.000	19.331.916.000	18.840.916.000	(491.000.000)
				14.435.195.000	14.355.195.000	14.380.195.000	25.000.000
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTORAN				608.599.300	640.599.300	640.599.300	-

~

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				433.768.000	371.768.000	371.768.000	-
2.02.2.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				26.528.500	26.528.500	26.528.500	-
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Meningkatkan perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana							
2.02.2.02.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN SUMBER DAYA HUTAN				1.881.329.700	1.881.329.700	1.881.329.700	-
Tolak Ukur : Tersedianya potensi hasil hutan non kayu untuk peningkatan ekonomi masyarakat							
Target Program: Peningkatan produksi hasil hutan non kayu							
2.02.2.02.01.15.01. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terbentuk dan terbiayanya Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui dukungan pengembangan HIBK, terdiri dari :; Pengembangan budidaya kudu lak di 3 lokasi ; Pengembangan budidaya lebah madu di 3 lokasi ; Pengembangan budidaya jenis tanaman obat-obatan di 5 lokasi	600 pohon kesambi, 3 kab ; 90 stup, 3 kab ; 95 ha, 5 kab	Alor, Sumba Tengah,SBD, Lembata, Matim, TTS, Kab.Kupang, Sumtim, Sikka, Ngada, Flores Timur	801.428.800	801.428.800	801.428.800	-
2.02.2.02.01.15.02. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Tertaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan HTR ; Tertaksananya diklat dan fasilitasi penyusunan RKU/RKT 14 KTH pemegang IUP HTR ; Tertaksananya inventarisasi data primer dan sekunder dan penyusunan RKU/RKT IUP HHK-HTR 14 KTH ; Tertaksananya sosialisasi HTR kepada masyarakat ; Tertaksananya rapat fasilitasi pendampingan pengelolaan hutan kemasyarakatan ; Tertaksananya inventarisasi hutan alam pada kawasan hutan Bitemasi Sommahole ; Tertaksananya pemeliharaan batas kawasan hutan lintas kabupaten ; Tertaksananya penyediaan peta tematik kehutanan Prov.NTT ; Tertaksananya penyusunan data base pembangunan kehutanan lengkap dan terkini	100 org ; 2 kab (TTS dan Riutim ; 60 orang ; 100 orang ; 9 kali kabupaten ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	Kab.Ngada (Wolobolo dan Watupiji), Kupang (Kaeluntu dan Tesbaran), Sumba Timur (Kapolhak Perangi), Flores Timur (Ile Wokoh Lewolohoh), Sikka, TTU, Alor (Gunung Besar), Manggarai, Manggarai Barat ; kawasan hutan Bitemasi Sommahole	-	-	-	-
2.02.2.02.01.15.05. Operasi Pengamanan Hutan Terpadu Lintas Kab/Kota	Tertaksananya pembentukan PAMHUT SWAKASA atau masyarakat Mitra Pohut (MMP) ; Tertaksananya koordinasi penyelesaian kasus ; Tertaksananya sosialisasi peraturan bidang kehutanan pada kelompok PAMHUT SWAKASA atau MMP ; Tertaksananya penyediaan sarana pendukung di Pos Pemantau Peredaran hasil hutan ; Tertaksananya pengawasan mutu dan monitoring evaluasi kayu masuk di pelabuhan dan peningkatan penerimaan daerah ; Tertaksananya pembinaan dan bimtek Gans dan Wasanis PUIH ; Tertaksananya Lacak Balak penebangan ; Tertaksananya pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api ; Tertaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan pada kelompok MPA	2 keg, 2 kab ; 20 kali ; Skali , 5 kab ; 1 paket ; 1 keg, 9 TTS, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, pelabuhan ; 4 kab ; 2 kab (TTS dan Belu) ; 4 kelompok ; 6 Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, SBD, Rote Ndao, Kab. Kupang ;		1.079.900.900	1.079.900.900	1.079.900.900	-
2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN				10.139.336.500	10.089.336.500	10.114.336.500	25.000.000
Tolak Ukur : Terbangun tanaman hutan, jumlah bibit Cendana yang ditanam s/d 2016							
Target Program: luas lahan hutan yang direhabilitasi 270.950 ha, luas lahan hutan yang dipertahankan 1.808.990 ha							

me

URUSAN/SPD/ AGENDA/SARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.02.2.02.01.16.03. Pengelolaan Cendana Lestari	Terbangunnya hutan tanaman cendana ; Terlaksananya pemeliharaan tanaman cendana (pemeliharaan tahun I) ; Terlaksananya pemeliharaan tanaman cendana pemeliharaan tahun II ; Terlaksananya pemeliharaan tanaman cendana pemeliharaan tahun III ; Terlaksananya pemeliharaan tanaman cendana pemeliharaan tahun IV ; Terlaksananya pemeliharaan tanaman cendana pemeliharaan tahun V ; Terlaksananya pembangunan potensi cendana masyarakat melalui kegiatan "Gerakan Cendana Keluarga" Tahun 2014 ; Terlaksananya fasilitasi keberlanjutan "Gerakan Cendana Keluarga" Tahun 2015 ; Terlaksananya Gerakan Cendana Sekolah Tahun 2016 ; Terlaksananya penyebaran informasi pengembangan cendana melalui gerakan cendana keluarga (GCK) ; Terlaksananya penyediaan bibit/bibit tanaman berkualitas ; Terlaksananya pembuatan jalan inspeksi dan rak anakan persediaan mapoli	30 ha, 3 kab (Alor, Flotim, Sumba Timur) ; 30 ha, 3 kab (Alor, Flotim, Sumba Timur) ; 90 ha, 6 kab (Kota Kupang, Belu, Lembata, Alor, Flotim, Sikka, Kab.Kupang, Flores Timur, Alor, Sumba Timur, Lembata) ; 80 ha, 5 kab (Kab.Kupang, Belu, Alor, Flores Timur, Sumba Barat,Sumba Timur,Sumba Tengah,Sumba Barat, SBD dan Rote Timur) ; 150 ha, 4 kab (Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU) ; 140 ha, 4 kab (Kab.Kupang, TTU,Belu, Alor) ; 10 kab ; 10 kab ; 10 kab ; 14 kab ; - ; 100.000 anakan	Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Ngada,Matim,Manggarai,Manggarai Timor,Sumba Barat,Sumba Tengah,Sumba Barat, SBD dan Rote	9.000.000.000	8.950.000.000	8.950.000.000	-
Tolak Ukur : Terbangun tanaman hutan, jumlah bibit Cendana yang ditanam s/d 2017							
Target Program: luas lahan hutan yang direhabilitasi 270.950 ha, luas lahan hutan yang dipertahankan 1.808.990 ha							
2.02.2.02.01.16.05. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya penyusunan Naskah Akademis dan rampers organisasi tata kerja KPH ; Terlaksananya sosialisasi KPH di tingkat tapak		TTU, Ende, Manggarai Barat, Flores Timur				-
Tolak Ukur : Terbangun tanaman hutan, jumlah bibit Cendana yang ditanam s/d 2018							
Target Program: luas lahan hutan yang direhabilitasi 270.950 ha, luas lahan hutan yang dipertahankan 1.808.990 ha							
2.02.2.02.01.16.09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan ; Terlaksananya Tenu konsultasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan NTT ; Terlaksananya rapat kerja pengelolaan cendana lestari; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	22 kab/kota ; 22 kab/kota 1 kali ; 22 kab/kota 1 kali	22 kab / kota	806.934.500	806.934.500	831.934.500	25.000.000
Tolak Ukur : Terbangun tanaman hutan, jumlah bibit Cendana yang ditanam s/d 2019							
Target Program: luas lahan hutan yang direhabilitasi 270.950 ha, luas lahan hutan yang dipertahankan 1.808.990 ha							
2.02.2.02.01.16.06. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Terlaksananya rapat koordinasi ; Terlaksananya sosialisasi hasil perubahan peruntukan	1 kali ; 2 kali	Kota Kupang	332.402.000	332.402.000	332.402.000	-
Sasaran Daerah: Rehabilitasi dan lahan seluas 3.500 Ha							
2.02.2.02.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN DAS TERPADU				1.345.633.000	1.345.633.000	1.345.633.000	-
Tolak Ukur : Manlingkatnya luas rehabilitasi hutan dan lahan							
Target Program: 3 DAS/Kelompok masyarakat di 10 Kabupaten	Terlaksananya pembangunan demplot agroforestry ; Terlaksananya pemeliharaan potensi tanaman cendana di hutan flomamora Kota Kupang ; Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pemilik/pengunduh benih cendana	200 ha, 7 kab ; 20 ha	Kab.Kupang, TTS, TTU, Flores Timur, Sikka, Sumba Barat, Malaka	1.345.633.000	1.345.633.000	1.345.633.000	-
2.02.2.02.02. KPHIL MUTIS TIMAU				4.976.721.000	4.976.721.000	4.460.721.000	(516.000.000)
Agenda: Pembenahan Sistem Hukum da.1 Birokrasi Daerah Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							

ura

URUSAN/SPRO/ AGENDA/SASARAN/ DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.02.2.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				381.897.500	381.897.500	381.897.500	-
2.02.2.02.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				96.030.000	96.030.000	96.030.000	-
2.02.2.02.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				11.628.500	11.628.500	11.628.500	-
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 3.500 Ha							
2.02.2.02.02.17. PROGRAM PENGELOLAAN DAS TERPADU							-
Total Ukur : Meningkatnya jumlah rehabilitasi hutan dan lahan							
Target Program: 3 DAS/Kelompok masyarakat di 10 Kabupaten							
2.02.2.02.02.17.01. Pembangunan Model Pengelolaan DAS Terpadu		2 kelompok	KPHL Mutis Timau				-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan Hasil Hutan							
2.02.2.02.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PEMERTIBAN SUMBER DAYA HUTAN				668.675.000	668.675.000	668.675.000	-
Total Ukur : Tersedianya potensi hasil hutan non kayu untuk peningkatan ekonomi masyarakat							
Target Program: Target kegiatan produksi hasil hutan non kayu							
2.02.2.02.02.15. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan		100 km : 100 ha	Ds. Tunua, Bijaepunu, Tutem, Fatumnasi, Nunbena, Leloboko, Kuan Noel, Noebesi, Nenas, Tanetod, Nuapin kab.TTS, Ds. Binafun, Bonmuti, Fatumonas, Bitobe kab. Kupang				-
2.02.2.02.02.15.01. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu		2 kelompok	Kab. Kupang Ds. Neobei, Kec Nunbena Kab.TTS dan Ds Binafun Kec Amloang Tengah kab.Kupang	155.875.000	155.875.000	155.875.000	-
2.02.2.02.02.15.02. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan		1 kel ; 4 kali ; 3 kasus ; 1 kel	Kab.Kupang, Kab. TTS, Kab.TTU	248.000.000	248.000.000	248.000.000	-
2.02.2.02.03.15.05. Operasi Pengaman Hutan Terpadu Untas Wilayah		1 kel; 4 kali; 3 kasus; 1 kel	Lokasi : kab.Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU	264.800.000	264.800.000	264.800.000	-
Tertaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan pada kelompok pengaman hutan swakarsa; Tertaksananya operasi pengaman hutan dan pemberian pederatan hasil hutan; Tertaksananya penyelesaian kasus kehutanan dan resolusi konflik; Tertaksananya pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MAP) dan tertaksananya pencegahan pengendalian kebakaran hutan							

W

URUSAN/SCPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.02.2.03.02.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN				3.818.490.000	3.818.490.000	3.302.490.000	(516.000.000)
Tolak Ukur : Terbangun tanaman hutan, jumlah bibit Cendana yang ditanam s/d 2016							
Target Program: Luas lahan hutan yang direhabilitasi 270.950 ha, luas lahan hutan yang dipertahankan 1.808.990 ha							
2.02.2.02.02.16.07. Pengelolaan Tanaman Cendana	Terlaksananya penanaman cendana di Kab. Kupang ; Terlaksananya pemeliharaan tanaman cendana Tahun I ; Terlaksananya sosialisasi pengembangan cendana		KPHL Mutis Timau			-	-
Tolak Ukur : Terbangun tanaman hutan, jumlah bibit Cendana yang ditanam s/d 2017							
Target Program: Luas lahan hutan yang direhabilitasi 270.950 ha, luas lahan hutan yang dipertahankan 1.808.990 ha							
2.02.2.02.02.16.08. Reboisasi Pengkayaan Tanaman di Wilayah KPHL Mutis Timau	Terlaksananya pembangunan potensi jenis dan populasi tanaman ; Terlaksananya pemeliharaan potensi jenis dan populasi tanaman pada KPHL Mutis Timau	100 ha ; 100 ha (Kemiri 15 ha, Sengon 15 ha, cendana 20 ha, kenari 30 ha, sukun 20 ha) ; 150 ha (Mahoni 25 ha, Kayu merah 25 ha, cendana 15 ha, kemiri 5 ha, sukun 25 ha, kenari 50 ha dan asam 5 ha)	Kec. Amfoang Timur, Amfoang Barat laut Kab. Kupang dan Kec. Mutis Kab. TTU	3.818.490.000	3.818.490.000	3.302.490.000	(516.000.000)
2.03. ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL				28.827.344.700	28.827.344.700	29.493.125.100	665.780.400
2.03.2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI				28.827.344.700	28.827.344.700	29.493.125.100	665.780.400
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
2.03.2.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				503.116.300	529.488.300	529.488.300	-
2.03.2.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				62.600.000	97.804.000	97.804.000	-
2.03.2.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				22.339.500	22.339.500	22.339.500	-
Agenda: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup							
Sasaran Daerah: Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan akibat Pertambangan							
2.03.2.03.01.15. PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN, MIGAS DAN PANAS BUMI				17.344.908.700	17.562.765.700	18.228.546.100	665.780.400
Tolak Ukur : Pengelolaan pertambangan dan kompetensi SDM pengelola pertambangan							
Target Program: Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan pertambangan di 22 Kab/Kota							
2.03.2.03.01.15.01. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penertiban usaha pertambangan	269 lokasi IUP	22 kabupaten kota	188.291.900	188.291.900	188.291.900	-

me

URUSAN/SPRD / AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERKAS/BAH/BERKUPANG (Rp.)
2.03.2.03.01.15.02. Pembinaan, Pengawasan dan Pemberian Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi, Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam, Non Logam	Tertindakannya pengawasan pertambangan tanpa ijin (PETI) mineral logam, non logam dan batuan serta lahan bekas tambang ; Tertindakannya pengawasan teknis IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi (OP) yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati	66 lokasi PETI di 22 kab/kota ; 269 IUP (244 IUP Eksplorasi); 22 Kabupaten/Kota 62 IUP OP di 22 kab/kota	22 Kabupaten/Kota	237.333.100	237.333.100	237.333.100	-
2.03.2.03.01.15.04. Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Pajak Air Permukaan	Tertindakannya perhitungan, penetapan dan optimalisasi pajak air tanah ; Tertindakannya PERDA Pengelolaan Air Tanah	19 kab ; 1 perda	19 kab/kota	717.192.000	717.192.000	717.192.000	-
2.03.2.03.01.15.05. Survey Potensi Air Tanah (Geolistrik) dan Pengeboran Air Tanah	Tertindakannya penyelidikan potensi air tanah (geolistrik) di daerah krisis air bersih ; Tertindakannya pengeboran air tanah ; Tertindakannya optimalisasi sumur bor produksi ; Tersedianya SDM yang berkompetensi dalam pengelolaan pemanfaatan air tanah	5 lokasi ; 2 lokasi ; 8 sumur bor produksi ; 2 SDM terlatih	Sumba Barat, SRD, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, Flotim, Lembata, Alor, TTS, Malaka, Sabu Raijua, TTU, Sumba Tengah 14 Kabupaten/Kota	15.500.000.000	15.659.158.000	16.324.938.400	665.780.400
2.03.2.03.01.15.06. Pembinaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Tertindakannya kegiatan pembinaan reklamasi lahan bekas tambang	14 kab	14 Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.03.2.03.01.15.07. Penelitian dan Penyelidikan Kawasan Rawan Bencana Geologi Gerakan Tanah	Tertindakannya pendataan daerah-daerah rawan bencana gerakan tanah	5 kab rawan bencana (Lembata, Rote, Sabu Raijua, Alor, Manggarai Barat)	Lembata, Rote, Sabu Raijua, Alor, Manggarai Barat	58.699.000	58.699.000	-	-
2.03.2.03.01.15.09. Pembinaan Pengusahaan yang Bergerak di Bidang Migas dan Pemantauan Pendistribusian BBM	Tertindakannya pemantauan pendistribusian BBM ; Tertindakannya sosialisasi pengusahaan yang bergerak di bidang Migas ; Tertindakannya Rekonsiliasi usulan kuota BBM Bersubsidi ; Tertindakannya inventarisasi pengusahaan yang bergerak di bidang migas	22 kab/kota ; 4 kab ; 1 keg ; 22 kab/kota	22 kab/kota	432.091.700	432.091.700	432.091.700	-
2.03.2.03.01.15.10. Inventarisasi Potensi Panas Bumi	Tertindakannya survey/inventarisasi/pendataan potensi panas bumi	6 lokasi, 6 kabupaten	Ranamasa-Manggarai Timur, Mangruda-Ngada, Komandaru-Ende, Roma Ujulwung-Lembata, Sirung-Alor, Egon-Sikka	270.000.000	270.000.000	270.000.000	-
2.03.2.03.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN				179.910.400	273.263.400	273.263.400	-
Tolak Ukur : Meningkatkan pertambangan							
Target Program: Pengembangan pertambangan berdasarkan potensi geologi							
2.03.2.03.01.18. Potensi Mineral Logam, Non Logam, Hidrologi dan Pengadaan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Tertindakannya pemantauan mata air sebagai dasar perencanaan kegiatan penurunan ; Tertindakannya penyusunan dokumen terkait data mineral logam dan sebarannya ; Tertindakannya peningkatan SDM melalui diklat pengelolaan SIG ; Tertindakannya pengadaan peta-peta dasar serta pemasangan jaringan internet untuk SIG	8 kab ; 1kab ; 3 orang ; 1 paket	Bandung, TTU,Belu, Malaka, Sumba Barat, Sikka, Flotim, Lembata dan Alor	-	-	-	-
2.03.2.03.01.18.01. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tertindakannya data evaluasi program/kegiatan pertambangan dan energi	22 kab / kota	22 kab/kota	179.910.400	179.910.400	179.910.400	-
2.03.2.03.01.18.03. Promosi dan Investasi Sumber Daya Mineral	Tertindakannya penyebaran informasi dan data potensi sumber daya mineral, energi dan panas bumi ; Tertindakannya studi pengembangan dan pemanfaatan potensi mineral industri	285 booklet ; 1 dok	Sumba Barat	93.353.000	93.353.000	93.353.000	-
Sasaran Daerah: Penggunaan Energi Baru Terbarukan							

me

URUSAN/SPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLOK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APPD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BETAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.03.2.03.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEENAGALISTRIKAN						-	-
Tolak Ukur : Ratio Elektrifikasi Listrik							
Target Program: Meningkatkan ratio elektrifikasi 73%							
2.03.2.03.01.15.10. Pelatihan dan Pembuatan RUKO dan Sosialisasi RUKO	Terlaksananya sosialisasi RUKO	4 Kabupaten	Flotim, Alor, Sabu Raijua, Malaka			-	-
2.03.2.03.01.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN				10.714.469.800	10.341.683.800	10.341.683.800	-
Tolak Ukur : Ratio Elektrifikasi Listrik							
Target Program: Meningkatkan ratio elektrifikasi 73%							
2.03.2.03.01.16.02. Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi dan Keteneaglistrikan	Terlaksananya pengadaan PLTS dan peralatan biogas ; Terlaksananya pengadaan kompor biomassa ; Terlaksananya survey potensi kelayakan pembangunan PLTS terpusat ; Terlaksananya FS dan detail engineering design (DED) PLTMH di Kab. Manggarai Timur ; Terlaksananya FS dan DED PLTS Terpusat ; Terlaksananya survey awal potensi PLTMH ; Terlaksananya pengadaan alat penunjang/alat ukur bidang energi ; Terlaksananya inventarisasi desa-desa belum belistrik	550 PLTS, 4 unit biogas untuk 3 kab ; 500 unit untuk 2 kab ; 9 lokasi : 1 dok ; 2 dok ; 2 lokasi ; 5 alat ; 7 dok	Kab. Flotim, TTU, Sumba Tengah (KAT) ; Kota Kupang dan Kabupaten Lembata ; Kabupaten Lembata dan Manggarai Timur ; Kabupaten Ende dan Nagekeo ; Desa desa perbatasan, pulau terluar	10.714.469.800	10.341.683.800	10.341.683.800	-
2.04. PARIWISATA				17.938.247.000	17.739.147.000	22.074.371.050	4.335.224.050
2.04.2.04.01. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				17.938.247.000	17.739.147.000	22.074.371.050	4.335.224.050
Agenda: Penbenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
2.04.2.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEKANTORAN				880.402.500	897.783.700	897.783.700	-
2.04.2.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				146.000.000	146.000.000	146.000.000	-
2.04.2.04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				31.568.000	33.568.000	33.568.000	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan							
2.04.2.04.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEBUDAYAAN, DESTINASI DAN PROMOSI PARIWISATA				15.901.323.000	15.695.841.800	20.031.065.850	4.335.224.050
Tolak Ukur : Kerjasama promosi, Event Pariwisata							
Target Program: Peningkatan dan lama kunjungan wisatawan							

Handwritten signature

URUSAN/SEPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLOK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MUHNI (Rp.)	APBD MUHNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.04.2.04.01.19.01. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemasaran Parwisata	Tertaksananya Analisa Pasar Parwisata ,a. Survey dan Pendataan, b. Analisa dan Penyusunan Buku ; Pengembangan Pasar, a. Pengembangan Pasar TK,Provinsi, b. Pengembangan Pasar di Jawa Timur, Jakarta dan Jawa Barat, c.Bimtek MICE, d. Raker Sunda Kecil, e. MPU, f. Kerjasama dengan Mitra Parwisata ; Terjalinnya/Kerjasama Publikasi/promosi Parwisata NTT dengan media lokal/daerah, Nasional (Cetak dan elektronik) ;Tersedianya Bahan-bahan Promosi Parwisata ; Tertaksananya Dukungan Event Budaya Daerah ; Tertaksananya Partisipasi pada Festival - festival, a. dalam daerah, b. Luar daerah ; Tertaksananya ENTEX ; Tertaksananya KTM,Tertaksananya Promosi Wisata , a. dalam negeri, b. Luar Negeri ; Tertaksananya Kampanye Sadar Wisata; Tertaksananya Tour de Flores	100 buku ; 3 Provinsi/Pengusaha parwisata ; 5 mitra usaha (PHRI, HPI, ASTRA, BPPD, Seiber MPU) ; Media cetak daerah 5 media, 1 media cetak daerah berskala nasional, 1 tabloid lokal bahasa kelisasa dengan maskapai, media cetak nasional (1 media), media elektroniklokal 1 media, media elektronik nasional 1 media, vidiotron 2 lokasi, website parwisata NTT ; DVD parwisata 500 bh, peta parwisata 3000 bh, hand bag 800 bh, calendar of event 900 bh, guide book 900 bh, neon box 2 pintu masuk, bahan promosi khas NTT 50 bh ; 12 event budaya daerah : Fest komodo, fest sepekan, pesta kelimutu, fest hoas ndao, samana santa, loka po'o, fest bui lhi hole, kure, pasola, pesta karcang, alai balaoel, caci, reba, pawai paskah. ; 22 penari ; 2 event ; 3 negara 4 mitra ; Badan Promosi Parwisata Daerah ; 50 Kelompok, 22 Kab./Kota; Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat (5 Etape melintasi 8 kab)	11 Kabupaten/Kota Jakarta, Batam, Manado , Denpasar ,Lampung, Darwin, Belanda , Beijing, 10 Prov dan Kab. Sumba BARAT Daya , 6 pintu masuk (Manggarai Barat, Ende , Sikka, Kupang Belu, dan Sumba Barat Daya) Alor- Kota Kupang, Jakarta, Surabaya, Denpasar dan labuan Bajo	5.413.815.200	5.188.386.500	9.657.886.500	4.469.500.000
2.04.2.04.01.19.02. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Parwisata	Terselenggaranya Bimtek pemandu wisata ; Terselenggaranya Bimtek dive guide dan diklat menyelam ; Terselenggaranya Bimtek pengelola desa wisata ; Terselenggaranya Workshop pengembangan usaha parwisata ; Terselenggaranya front office dan table manner ; Terselenggaranya pelatihan fotografi jurnalistik ; Terselenggaranya penulisan kreatif	2 kail, 60 orang ; 1 kail, 20 orang ; 11 orang ; 1 kail, 25 orang ; 60 orang ; 60 orang ; 20 orang	Ngada dan TTU ; manggarai Barat ; Kota Kupang dan Bali ; Kota Kupang ; Ende dan TTU ; Kota Kupang Dan Jogja ; Kota Kupang dan Jakarta	1.030.350.000	1.030.350.000	1.030.350.000	-
2.04.2.04.01.19.03. Pembinaan dan Pengembangan Potensi Parwisata	Tertaksananya pelatihan penyusunan materi iklan di media ; Tertaksananya fasilitas TMO dan DMO ; Tertaksananya Sail Flobamora ; Tertaksananya fotografi bawah laut ; Tertaksananya forum mitra usaha parwisata dan pemerintah daerah ; Tersusunnya pola perjalanan wisata ; Tertaksananyapembangunan Lasiana tahap II ; Tertaksananya festival/jambore parwisata 22 sanggar/22 kab./kota ; Terselenggaranya ajang pemilihan dan pemberdayaan duta wisata NTT ; Tertaksananya dukungan terhadap festival Flobamora Rayon I, II dan III ; Berpartisipasinya NTT pada pawai budaya nusantara ; Tersedianya buku database kepariwisataan dan ekonomi kreatif ; Tertaksananya event minat khusus (tracking, mancing, renang dan surfing) ; Tertaksananya pemilihan putri parwisata Tkt. Provinsi dan Nasional ; Berpartisipasinya perupa NTT pada pameran seni rupa ;	1 kl pelatihan 15 org ; 1 kail, 50 org ; 22 kabupaten/kota ; 1 kail, 50 org ; 1 kail, org ; 3 destinas ; 1 lokasi Lasiana ; 1 kail, 22 sanggar ; 1 pasang dan 4 angkatan ; 1 kail, 3 lokasi ; 1 kail, 22 orang ; 50 buku ; 8 event ; 1 orang ; 1 kail 6 orang	Kota Kupang dan Jogja , kab ende , kab sikka ; 22 kab/kota ; kota kupang ; kota kupang ; kota kupang dan papua ; Kab. TTU, Kab. Sumba Timur, Kab. Kab. Lembata ; Jakarta ; kota kupang ; Kab. Kupang, Kota Kupang dan Kab. Rote Ndao ; Kota Kupang dan Jakarta ; Batam, Jakarta dan Malang	9.131.335.800	9.151.283.300	8.992.007.350	(159.275.950)
2.04.2.04.01.19.04. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kepariwisata Terpadu	Tertaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program parwisata dan ekonomi kreatif di 22 kab/kota, dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	1 dokumen	22 kab / kota	325.822.000	325.822.000	350.822.000	25.000.000
2.04.2.04.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN EKONOMI KREATIF				978.953.500	965.953.500	965.953.500	-
Tolak Ukur : Pengembangan Sumber Daya Parwisata							
Target Program: Peningkatan media parwisata dan ekonomi kreatif	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas 40 orang pelaku usaha kreatif seni dan budaya ; Terselenggaranya lomba foto NTT sepanjang masa ; erselenggaranya Bimtek souvenir bambu	2 kail, 40 orang ; 1 kail, ... orang ; 1 kail, 30 orang	kab sikka ; kota kupang ; kab ngada	749.480.000	736.480.000	736.480.000	-

Wae

[illegible]

2002

URUSAN/SEPO/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APRO MURNI (Rp.)	PPAS PERUSAHAAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
2.05.2.05.01.21.01. Peningkatan Pelayanan PPI/TPi	Tertaksana peningkatan pelayanan PPI/TPi berupa :Pembangunan Ruang Kantor PPI Oeba ; Tertaksana Pembangunan Ruang Pelayanan PPI Oeba 100 KVA,1 unit Gedung dan Instalasi ; Pembangunan Cold Storage PPI Oeba	1 paket ; 1 paket ; 1 unit, kapasitas 12 ton, 1 unit Genset PPI Oeba		2.749.000.000	2.867.722.000	2.867.722.000	-
2.05.2.05.01.21.02. Pengadaan Kapal Tangkap	Tertaksana pengadaan sarana dan prasarana kapal untuk masyarakat 65 unit kapal 3 GT ; Bagan Apung 3 unit ; 3 unit Mini Purse 22 Kab/Kota nelayan, berupa : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 3 GT ; Bagan Apung ; Seine ; Jaring/Gill Net, 168 piece ; Mesin Inboard 33 PK, 4 Alat Tangkap Mini Purse Seine ; Jaring/Gill Net ; Pengadaan Mesin Inboard unit ; 24 unit ; Peralatan Navigasi, 76 unit ; coil box,20 unit 33 PK ; Mesin Ketinting ; Peralatan Navigasi ; Pengadaan cool box	22 Kab/Kota		22.824.500.000	25.007.500.000	23.746.910.000	(1.260.590.000)
2.05.2.05.01.21.03. Pelayanan Perbaikan Sarana Penangkapan, Alat Tangkap dan Permesinan	Tertaksana peralatan dan Bahan Operasional Perbenkulan Permesinan ; Tertaksana jasa pelayanan perbenkulan	1 Paket ; 1 Tahun/mesin perahu, alat tangkap	UPMB /DKP Prov. NTT, Namosain	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
2.05.2.05.01.23. PROGRAM PENGEMBANGAN PENYULUHAN, KAPASITAS KELEMBAGAAN & PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Sasaran Daerah: Meningkatkan produksi, export dan PAD			3.826.876.000	6.945.653.280	7.789.903.280	844.250.000
Tolak Ukur : Peningkatan produksi perikanan							
Targer Program: Peningkatan kualitas SDM perikanan							
2.05.2.05.01.23.01. Peningkatan Sistem Informasi, Promosi Perikanan Kompetensi UPPMHP Kupang	Tertaksana keikutsertaan Expo Perikanan ; Tertaksana Pemetaan Peluang usaha dan investasi ; Terpubikasi dan advokasi Pembangunan Sektor Perikanan melalui media informasi ; Tersedianya bahan laboratorium dan pengadaan sarana dan prasarana UPPMHP; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	6 even expo perikanan ; Peta potensi komoditi hasil perikanan ; 1 paket media buletin ; Media Regensia, 70 media ; Uji Profisiensi, 3 jenis ; blakan murni 4 jenis ; Kalibrasi Peralatan Lab, 23 jenis ; Peralatan Pengujian, 1 paket ; Pelatihan Aparat Penguji, 6 jenis keahlian ; 1 unit mobil laboratorium keilling	UPPMHP - Kupang				844.250.000
2.05.2.05.01.23.02. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keragaan Produk Hasil Perikanan	Tertaksananya Survelien UPI ; Tertaksana Pemantauan produk perikanan untuk pasar lokal, antar pulau dan ekspor ; Tertaksana Pelatihan Pengawas Mutu ; Tersedia Pengadaan Sarana Pengawasan mutu ; Tertaksana assesmen/evaluasi implementasi SNI ISO/IEC 17025 oleh KAN, 1 kali ; Tertaksananya Gab Analisis UPI, 15 UPI ; Tertaksananya Pembinaan Pra SKP di UPI ; Tertaksananya Amandemen Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ; Tertaksana Assesmen Implementasi SNI/ISO/IEC 17025 oleh KAN ; Tertaksananya Gab Analisis pada UPI	22 Kabupaten/kota ; UPI yang menerapkan standar PMMT,18 UPI ; 1 kali ; 1 paket ; 1 kali ; 15 UPI ; 6 Kabupaten/kota ; Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ; 1 paket ; 1 paket	UPPMHP - Kupang	591.890.000	591.890.000	591.890.000	-
2.05.2.05.01.23.03. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tenau Kupang	Tertaksananya Pelayanan PPP dan SHTI, 1 paket ; Tertaksana Pengadaan Pompa Sumur Bor, 1 buah ; Tersedia dokumen Ardal/UKL/UPL, PPP Tenau, 1 dokumen ; Tertaksana Perbaikan Jaringan Listrik ; Tersedia Instalasi Air Bersih dan Meteran Air ; Tertaksana Pendaftaran dan Penandaan Kapal ; Tertaksana Pengurusan dokumen Perijinan SPDN, di PPP Tenau	1 Paket ; 1 unit mesin sumur bor ; 1 paket dokumen ; 1 paket ; 1 paket ; 150 kapal ; 1 paket dokumen/1 unit	(blank)	885.000.000	2.563.008.000	2.563.008.000	-
2.05.2.05.01.23.04. Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Pengolahan (GEMARIKAN)	Tertaksananya Inovasi olahan ikan, 1 paket ; Tertaksananya desiminasi ATI Produk olahan ; Tertaksananya Rapat Koordinasi FORIRKAN ; Tertaksana Workshop Perhitungan Tingkat Konsumsi Ikan ; Tertaksananya pembinaan UKM menuju Ritel modern ; Tertaksana Sosialisasi, advokasi standar CPPIB dan Informasi Pasar	1 paket ; 1 paket, 6 kab/kota ; 1 kali ; 1 kali 1paket ; 5 UKM ; 6 Kab,15 Pasar.	22 Kabupaten/kota	800.000.000	754.528.000	754.528.000	-

Handwritten signature

URUSAN/SDP/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERTURUN (Rp.)
2.05.2.05.01.23.05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Terlaksana Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Perikanan Budidaya ; Terlaksana Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data Statistik Perikanan Tangkap ; Terlaksana Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data Statistik P2HP ; Terlaksana Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan KP ; Terlaksana Raker bidang peraturan hukum kelautan dan Perikanan ; Sosialisasi, Perda Sonasi wilayah Pesisir ; Terlaksana Gelar pengawasan kelautan dan perikanan melalui Operasi Terpadu	1 kali, 22 Kabupaten/Kota ; 1 kali, 100 orang ; 22/22 kabupaten / kota ,WPP 573 kabupaten/kota ; Patrol rutin/3 kali operasi		1.050.000.000	994.241.280	994.241.280	
2.05.2.05.01.23.06. Peningkatan Kualitas SDM Penyuluhan Perikanan dan Pendampingan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha Budidaya Rumput Laut Bagi Wanita Nelayan, 8 Angkatan/Paket ; Terlaksananya Pembinaan KUB, 1 paket ; Terlaksananya Raker Penyuluhan Tk. Propinsi ; Terlaksananya Diklat Dasar Penyuluh, 1 angkatan ; Terlaksananya Diklat Teknis Penyuluh, 1 angkatan ; Terlaksananya Upgrading SKK Anakapin/Atkapin, 1 angkatan ; Terlaksananya Operasional Kapal Penyuluh, 1 paket ;	Wanita Nelayan Pembudidaya Rumput Laut terampil, 240 org ; Terbina 220 KUB, di 22 kab/kota. ; 1 kali ; Sertifikasi Penyuluh, 40 org ; Penyuluh Terampil, 30 org ; ABK bersertifikat 30 org ; Beroperasinya Kapal Penyuluh, 1 unit	22 kab / kota	499.986.000	2.041.986.000	2.041.986.000	
2.06. PERDAGANGAN				5.403.054.300	5.340.519.300	5.340.519.300	
2.06.2.07.01.DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				5.403.054.300	5.340.519.300	5.340.519.300	
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata Sasaran Daerah: Meningkatkan aktifitas perdagangan dalam negeri dan ekspor				4.132.606.500	4.082.606.500	4.082.606.500	
2.06.2.07.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN							
Tolak Ukur : Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap kecurangan pedangan							
Target Program: Perlindungan konsumen di 4 kabupaten							
2.06.2.07.01.15.01. Pengawasan Beredaran Barang dan Jasa	1.) Terlaksana Pengawasan Barang Beredar, Pengawasan terhadap barang Non Pangan yang bersandar SNI) dan Pengawasan Kemetrolagian, ; 2.) Terlaksananya Pasar Murah bersubsidi	1.) 20 Jenis Produk dan UTTP, 22 kab/kota 2.) 7500 paket subsidi	22 kab / kota	1.673.722.500	1.673.722.500	1.673.722.500	
2.06.2.07.01.15.02. Operasional UPT Kemetrolagian	1)Terlaksananya sidang tera uang UTTP, 2)Terlaksananya verifikasi/kalibrasi alat standar, 3)Terlaksananya kegiatan interkomperasi, 4)Terlaksana pertemuan teknis kemetrolagian, 5)Terlaksananya pembuatan leaflet/brosur kemetrolagian, 6)Terlaksananya pembuatan stiker untuk penambahan PAD, 7)Terlaksananya kegiatan pengawasan UTTP (Represi), 8)Terlaksananya kegiatan konsultasi kemetrolagian, 9)Terlaksananya kegiatan kordinasi kemetrolagian, 10)Terlaksananya diklat kemetrolagian, 11)Terlaksananya bimbingan teknis kemetrolagian,	1)22 kab/kota, 2)8 unit, 3)Banjarماسin dan Medan, 4)1 kali, 5)750 lbr, 6)1.800 lbr, 7)Jalor, Mabbar, Flotim, TTS, 8)2 kali, Bandung dan Jakarta, 9)Alor, Suntim, Mabbar, Flotim, SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, 10)11 orang, Bandung, 11) 3 orang, 12)100%	22 kab/kota, Jakarta dan Bandung	2.458.884.000	2.408.884.000	2.408.884.000	
2.06.2.07.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI				1.270.447.800	1.257.912.800	1.257.912.800	
Tolak Ukur : Promosi produk unggulan, distribusi dan pemasaran perdagangan dalam dan luar negeri							
Target Program: Promosi produk unggulan, terjaminnya cadangan dan distribusi seta pemasaran perdagangan							
2.06.2.07.01.16.01. Pemasaran Produk Ekonomi Daerah	1. Terlaksananya Promosi Produk ekspor ; 2. Terlaksananya Pasar Ekspo Perbatasan ; 3. Terlaksananya Pengembangan Ekspor Daerah (forum koordinasi ekspor Tkt. Prov. , desiminasi kebiasaan perdagangan luar negeri, identifikasi komoditi unggulan daerah, sosialisasi regulasi di bidang ekspor) ; 4. Terlaksananya Pemasaran Produk Ekonomi Daerah (misi dagang lokal, pameran Nusa, pameran HUT RI, pameran HUT NTT, pameran Pangan Lokal)	5 kali, Jakarta, Jogjakarta, Makassar dan Batam ; 1 kali, Daerah Perbatasan Timor Leste ; 1 kali, 50 orang, 3 Daerah Perbatasan Timor Leste ; 22 kab Kab./kota 120 orang, 22 Kab./kota, 2 kali, 50 orang ; 5 kali, kota ; Surabaya, Jakarta, Kota Kupang Surabaya, Jakarta, Kota Kupang	Jakarta, Jogjakarta, Makassar dan Batam ; Daerah Perbatasan Timor Leste ; 22 kab	550.000.000	537.465.000	537.465.000	

W

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERURANG (Rp.)
2.06.2.07.01.16.02. Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi Pasar	1. Terlaksananya Pengumpulan data informasi perdagangan dalam negeri, 2. Terpantainya harga kebutuhan masyarakat ; 3. Terlaksananya Sosialisasi/Edukasi Publik dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	22 kab kota ; 2.) Pasar Impres, Pasar Oeoba dan Pasar Oebobo 3 kali, 60 orang, 3 Kab.	22 kab kota : kota kupang ; Ende, TTU dan Sumba Timur	720.447.800	720.447.800	720.447.800	-
2.07. INDUSTRI				8.117.548.700	8.102.083.700	8.127.083.700	25.000.000
2.07.2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				8.117.548.700	8.102.083.700	8.127.083.700	25.000.000
Agenda: Pembinaan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah							
Sasaran Daerah: Terwujudnya penataan kelembagaan dan Sumber Daya pada Pemerintah Provinsi NTT							
2.07.2.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.174.680.200	1.163.883.500	1.163.883.500	-
2.07.2.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				101.204.000	116.180.700	116.180.700	-
2.07.2.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KELUANGAN				98.159.900	98.159.900	98.159.900	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan pertumbuhan jumlah Industri							
2.07.2.07.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				6.743.504.600	6.723.859.600	6.748.859.600	25.000.000
Tolak Ukur : Omzet Industri Kecil dan Menengah, Kemampuan IKM dalam penggunaan teknologi Industri, Komoditi unggulan daerah							
Target Program: Meningkatkan omzet industri kecil dan Menengah, kapasitas penggunaan teknologi Industri, peningkatan omzet IKM produk unggulan daerah							
2.07.2.07.01.16.. Fasilitas, Sertifikasi dan Sosialisasi, Haki, Halal, Pendaftaran Merek, Desain Kemasan, Pelabelan dan PIKT	1.) Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Halal ; 2.) Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi PIKT dan Merk ; 3.) Terlaksananya Pendampingan Seleksi Upakarti ; 4.) Terlaksananya Bantuan Kemasan	1.) 105 Sertifikat Halal, Sumba Barat, Rottim, Sikka, Ngada, Alor, Manggarai Ende ; 2.) 50 Sertifikasi PIKT, Kab. TTS, Manggarai Ende, TTs, Jakarta kab. Rottim, Sikka, alor, TTs	Sumba Barat, Rottim, Sikka, Ngada, Alor, Manggarai Ende, TTs, Jakarta				-

Handwritten signature

URUSAN/KEPP/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELURAHAN/KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.07.2.07.01.16.02. Peningkatan Kapasitas Industri Kecil, Pengolahan dan Komoditi Unggulan Daerah	1. Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif dan Produk Budaya NTT (Tenun, Fashion, pendampingan Ahli Tenun, gerabah, Sekolah tenun, Rumah Kerajinan) ; 2. Terlaksananya Pengembangan Perkampungan Industri Kecil (pewarnaan alam, busana modifikasi, aneka produk dari kain tenun, Pendampingan ahli, Bantuan alat dan bahan tenun, Bantuan papan nama/gapur kampung tenun, Bantuan Barak Kerja Semi Permanen, Show Room, Fasilitas pemasaran) ; 3. Terlaksananya Pengembangan IKM Ndao, Ende, Lembata, Sumba Tengah,Kab. Kupang, TTS,TTU, berbasis potensi lokal daerah (meubler dari kayu,bambu/bebek, bahan bangunan dari semen,kerajinan cendera mata dari batu, sepatu sandal dari kulit, Meubel sofa) ; 4. Terlaksananya Pengembangan Industri Garam Teknologi Geomembran ; 5. Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Teknologi (Pelayanan Perbaikan Asintan dan Pengembangan Pertengkalan Asintan dan UPT Logam, Pelatihan Pengecoran komponen asesoris kendaraan bermotor roda dua, Bimtek Pandai Besi Modern, Pelatihan Pertengkalan Las Konstruksi Logam, TTU, TTS, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Timur,Sumba Bimtek Perbengek-014 dan 2015; 1380 guru SMA dan 375 org guru SMK; 1) 226 orang Tenaga pendidik dan kependidikan 2) 68 tenaga pendidik dan kependidik Luar Sekolah dan tenaga fungsional lainnya	7 Timpk (90 Org), 10 IKM, Rumah Kerajinan, Sekolah Tenun, Kab. Ende, Nagekeo, Belu, Kab. Kupang, TTS, TTU, Sumba Timur, Manggarai Barat, Sikka, Flotim, Manggarai Timur, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Kota Kupang ; 1 pertampungan industri, Kab. Manggarai, Jakarta ; 12 kelompok (120 org), Kabupaten belu, Manggarai, Alor Rote, Sikka, Jawa Timur (Sidoarjo) ; 6 kelompok (70 org), Kota Kupang, Kab. Alor, Flotim, Sikka, Rote Ndao dan Kab. Timor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Nagekeo, Ende, Belu, TTU, Kota Kupang, Kab. Kupang dan Sabu Raijua, Alor dan Rote Ndao : 37 kelompok IKM, Kab. Flores Timur, Sikka, Alor, Ngada, Lembata, Ende, Nagekeo, TTU, TTS, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Timur,Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sabu Raijua , Belu, Rote Ndao, Kota Kupang, Semarang, Yogyakarta,Bandung ; 3 kali, Kota kupang, Jakarta	Kab. Ende, Sikka, Flotim, Nagekeo, Lembata, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Belu, Kab. Kupang, TTS, TTU, Sumba Barat, Sumba Tengah, Dayu, Sumba Barat, Sumba Tengah, Alor, Rote Ndao, Sabu raijua, Kota Kupang, Jakarta, sidoarjo, Yogyakarta, Bandung	6.238.666.850	6.219.021.850	6.219.021.850	-
2.07.2.07.01.16.03. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Data Indag	1.Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan Perindustrian dan perdagangan ; 2.Terlaksananya pengambilan dan penyusunan data Indag ; 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas (Focus Group Discussion penanganan hambatan perdagangan lintas batas, pemantauan dan evaluasi kinerja perdagangan di perbatasan; dukungan penyelenggaraan Hari Nusantara 2016	1.) 22 kab/kota ; 2.) 22 kab/kota; 3.) 1 kali, Kupang, Belu dan Kab. TTU, Sikka, Sumba Timur dan Kab. Manggarai	22 kab/kota ;Kupang, Belu dan Kab. TTU, Sikka, Sumba Timur dan Kab. Manggarai	504.837.750	504.837.750	529.837.750	25.000.000
2.08. KETRANSMIGRASIAN				1.949.119.500	1.949.119.500	1.949.119.500	-
2.08.1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				1.949.119.500	1.949.119.500	1.949.119.500	-
Agenda: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata							
Sasaran Daerah: Meningkatkan jumlah peserta transmigrasi dalam wilayah NTT dan keluar wilayah NTT							
2.08.1.14.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN WILAYAH TRANSMIGRASI				1.949.119.500	1.949.119.500	1.949.119.500	-
Tolak Ukur : Meningkatkan pengembangan dan pembinaan wilayah transmigrasi							
Target Program: Jumlah transmigran baru yang difasilitasi							
2.08.1.14.01.18.02. Pelatihan IMPOSMA dan Pelatihan Integrasi Sosial	Tertindakannya baru yang difasilitasi	Imposma; Tertindakannya	Pelatihan Integrasi	90 orang warga di UPT; 60 orang warga trans di UPT; 4 lokasi di UPT Transmigrasi	304.478.000	304.478.000	304.478.000
Tertindakannya Pelatihan Integrasi Sosial; Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi							

Handwritten signature

URUSAN/SKPD/ AGENDA/SASARAN DAERAH/PROGRAM/TOLAK UKUR PROGRAM/TARGET PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	PPAS MURNI (Rp.)	APBD MURNI (Rp.)	PPAS PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
2.08.1.14.01.18.03. Penataan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan usaha warga transmigran untuk pertumbuhan ekonomi; Terlaksananya Rehabilitasi sarana air bersih (SAB) perpipaan; Terlaksananya Pembentukan kelembagaan ekonomi di UPT; Terlaksananya Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi di UPT	1). 1000 bibit tanaman, 2). Pupuk 1 ton; 1 paket; 6 lokasi UPT; 5 lokasi UPT	UPT Kius Kualin Kab. TTs; UPT Nansusina Kabupaten Flores Timur; UPT Kius Kualin Kab. TTs, UPT Uluksbuk Kab. Belu, UPT Ulor Kab. Rote Ndao, UPT Kakaha Kab. Sumba Timur, UPT Hatiluku Kab. Belu, UPT Walandimu Kab. Sumba Barat; UPT Lalira Kabupaten Sumba Timur, UPT Ulu Kab. Flores Timur, Kius Kualin kab. TTs, UPT Uluwae Kab. Ngada dan UPT Wewaria Kab. Ende	570.145.000	570.145.000	570.145.000	-
2.08.1.14.01.18.04. Pembangunan Transmigrasi Baru	Terlaksananya kegiatan Perencanaan Teknis Lokasi/Kawasan Transmigrasi; Terlaksananya kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Lokasi HPL Transmigrasi; Terlaksananya kegiatan Identifikasi Pemanfaatan lahan; Terlaksananya Identifikasi calon lokasi Transmigrasi baru; Terlaksananya kegiatan Identifikasi permasalahan Sarana Prasarana Transmigrasi; Terlaksananya Sosialisasi informasi ketransmigrasian	1 Dokumen Perencanaan Teknis Lokasi / Kawasan Transmigrasi; 3 lokasi HPL Transmigrasi; Inventarisasi data proses sertifikasi kepemilikan lahan oleh warga transmigrasi; lokasi potensial calon lokasi UPT Transmigrasi; terdapatnya permasalahan Sarana Prasarana Transmigrasi di 7 lokasi; sosialisasi informasi ketransmigrasian di 5 lokasi	Kabupaten manggarai barat; Kabupaten kupang, Malaka dan Nagekeo; Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten TTU, Ngada dan Sumba Barat; Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Ngada, Manggarai Barat dan Sikka; Kabupaten Malaka, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten TTs, Kabupaten Belu	1.074.496.500	1.074.496.500	1.074.496.500	-
Grand Total				1.425.159.869.000	1.459.002.857.000	1.531.637.648.684	72.634.791.684



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 FRANS LEBU RAYA